



BUKU AJAR

MASYARAKAT DESA DAN KOTA (TINJAUAN GEOGRAFIS, SOSIOLOGIS DAN HISTORIS)



Oleh:

**Dra. Suparmini, M.Si
Agustina Tri Wijayanti, M.Pd**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2015**

BAB I

MASYARAKAT DESA

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang perkembangan masyarakat desa dan kota terlebih dulu dipahami pengertian baik masyarakat desa maupun masyarakat kota.

Hasan Shadly (1963:20) memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Sedangkan Bouman memberikan definisi masyarakat sebagai berikut: "Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka. Lysen selanjutnya menjelaskan bahwa "Masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu. Dengan demikian dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah pengumpulan manusia yang banyak dan bersatu dengan cara tertentu oleh karena hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Jadi ada beberapa syarat untuk timbulnya masyarakat, yaitu: 1) harus ada pengumpulan manusia yang banyak, 2) telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama, 3) adanya aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.

Hidup bermasyarakat merupakan sekelompok orang atau manusia yang hidup bersama yang mempunyai daerah atau tempat tertentu untuk jangka waktu yang lama. Masing-masing anggotanya saling berhubungan satu sama lain, hubungan yang dimaksudkan baik itu sikap, tingkah laku ataupun perbuatan. Segala tingkah laku dan perbuatan itu diatur dalam suatu tata tertib, undang-undang, peraturan tertentu, yang biasanya disebut hukum adat.

Kehidupan bermasyarakat umumnya berbeda-beda antara masyarakat satu dengan lainnya, perbedaan itu dapat disebabkan oleh antara lain struktur masyarakat tersebut dan juga faktor tempat atau daerah yang mempunyai peranan penting. Perbedaan yang menonjol tampak pada kehidupan masyarakat desa dan

masyarakat kota. Dalam kehidupan masyarakat desa gotong royong merupakan ciri kehidupan masyarakat yang menonjol. Faktor gotong royong ini dapat mendekatkan rasa kekeluargaan yang mempererat hubungan, mempererat solidaritas antara anggota masyarakat satu dengan lainnya. Demikian pula dengan faktor pendidikan, umumnya pendidikan di perdesaan lebih rendah dibanding dengan masyarakat perkotaan. Hal ini juga menyebabkan perbedaan antara perkembangan masyarakat desa dan kota. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih maju akan mendorong perkembangan masyarakat lebih cepat, begitu pula sebaliknya. Faktor ekonomi, perkembangan perekonomian di perdesaan lebih rendah dibanding perkotaan, hal ini dapat diketahui misal dari besarnya *income* perkapita masyarakat perdesaan. Oleh karena itu kebutuhan sehari-hari lebih sederhana disebabkan kemampuan untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Daya beli masyarakat perdesaan lebih rendah.

Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang menunjukkan perbedaan yang nyata dengan kondisi masyarakat perdesaan. Kehidupan masyarakat perkotaan lebih maju, misalnya dilihat dari segi pendidikan, ekonomi. Demikian pula dalam hal kegotong royongan masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat perdesaan. Masyarakat perdesaan umumnya digambarkan sebagai masyarakat tradisional yang lamban perkembangannya, sedang masyarakat perkotaan digambarkan sebagai masyarakat modern yang cepat mengalami perkembangan. Sebenarnya eksistensi adanya perdesaan-perkotaan justru terletak pada adanya perbedaan, adanya kesenjangan di antara desa dan kota, baik perbedaan karakter fisik wilayah maupun perbedaan masyarakatnya.

Pembahasan lebih lanjut mengenai karakter fisik, masyarakat, dan perkembangan diantara perdesaan dan perkotaan akan dibahas pada bab-bab berikutnya, dengan dasar tinjauan dari berbagai aspek, yaitu aspek geografis, historis, sosiologis dan ekonomi.

A. Terbentuknya Masyarakat Desa

Desa berasal dari bahasa Sanskerta *dhesi*, yang mempunyai arti sebagai tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) disebutkan desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Sedangkan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.

Desa terlepas dari istilah lokal dan regionalnya, merupakan suatu fenomena universal. Keberadaannya tidak terlepas dari penemuan bercocok tanam dalam kehidupan manusia. Desa dalam pengertian awalnya merupakan tempat tinggal dari orang-orang yang hidup dari bercocok tanam tersebut. Dalam konteks evolusi kehidupan manusia, desa memiliki arti penting, yaitu sebagai tonggak sejarah awal perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Bermula dari desa lahirlah kota, kota merupakan proses lanjutan dari perkembangan desa. Lewia Mumford (1938) menyatakan bahwa kota merupakan puncak peradaban, artinya kota adalah merupakan puncak kemajuan dari proses perkembangan desa pertanian.

Masyarakat dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan faktor yang saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan timbal balik. Manusia sebagai bagian dari masyarakat sangat berperan dalam mempengaruhi kondisi lingkungannya, manusia hidup dalam suatu lingkungan. Sebaliknya lingkungan yang berubah dari waktu ke waktu juga memengaruhi aktivitas dan pola kehidupannya. Manusia tumbuh berkembang menempati suatu wilayah yang sama membentuk satu perkumpulan

yang disebut masyarakat. Masyarakat tersebut semakin lama semakin berkembang dalam satu wilayah tertentu, sehingga terbentuk masyarakat desa.

Dalam membahas tentang sejarah terbentuknya desa, ada beberapa pendapat. Kern dan Van den Berg menyatakan bahwa desa-desa di Jawa dibentuk atas pengaruh Hindu yang berasal dari India. Sedang ahli lainnya Van Vollen Hoven dan Brandes menyatakan bahwa desa-desa di Indonesia bukan dibentuk atas pengaruh Hindu, melainkan terbentuk sendiri oleh bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada realita bahwa sebagian besar daerah di luar pulau Jawa tidak mendapat pengaruh Hindu.

Apabila dicermati, dapat dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia memang dibentuk sendiri oleh bangsa Indonesia, namun juga dipengaruhi unsur luar yang dapat memperkaya bentuk, corak, serta isi dari desa. Menurut sejarah nenek moyang kita, bangsa Indonesia berasal dari Asia. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi terjadi gelombang perpindahan bangsa-bangsa dari daerah Tonkin dan Yunan ke arah selatan. Bangsa-bangsa tersebut sampai ke kepulauan Indonesia dengan membawa peradaban dan kebudayaannya. Akhirnya bangsa tersebut tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Kemudian sekitar 1000 tahun sebelum Masehi berkembanglah suatu tingkat kebudayaan Neolithikum, manusia hidup dengan cara yang disebut food gathering, yaitu hunting, fishing dan meramu (Kuntjaraningrat,1967). Oleh karena itu manusia mulai tinggal menetap dan membentuk komunal. Sejak manusia mengenal bercocok tanam manusia mulai hidup menetap bermasyarakat dan berkebudayaan. Desa dalam pengertian awalnya merupakan tempat tinggal dari orang-orang yang hidup dari bercocok tanam.

Khusus tentang sejarah pertumbuhan masyarakat desa, para ahli membedakan beberapa prinsip yang mengikat warga desa menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan yang bulat. Koentjaraningrat (1967) mengemukakan adanya empat prinsip hubungan yang mengikat kelompok manusia, yaitu: 1) prinsip hubungan kekerabatan (persekutuan hukum genealogis; 2) prinsip hubungan tempat tinggal (persekutuan hukum teritorial); 3) prinsip tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis; 4)

prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat perdesaan sendiri, tetapi datang dari atas, seperti adanya aturan-aturan, undang-undang yang dibuat pemerintah. Jadi proses lahirnya masyarakat desa sebagai suatu kesatuan diawali dengan hubungan sekitar individu yang mencakup kaum keluarga, kerabat, dan tetangga-tetangga dekat saja. Dalam lingkungan kecil itu tumbuh aktivitas-aktivitas sosial, biasanya mengenai lapangan kehidupan sehari-hari sekitar rumah tangga yang semuanya itu terikat oleh prinsip kekerabatan dan hubungan tinggal dekat. Kemudian hubungan-hubungan sosial itu berkembang ke aktivitas-aktivitas yang lebih luas, seperti bidang pertanian dan mata pencaharian lain yang lebih luas.

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di perdesaan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang mereka miliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan Warren (1963: 78) sebagai berikut:

- a. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku)
- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bekerja sama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh pada kehidupan yang ada (misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya)
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih banyak.

B. Sejarah Perkembangan Masyarakat Desa

1. Masa-masa kerajaan Nusantara

Keberadaan desa sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dalam cerita rakyat yang disampaikan secara lisan banyak diperoleh informasi bahwa usia desa sudah sangat tua. Seorang ahli purbakala bangsa Belanda menemukan prasasti yang diperkirakan ditulis pada pertengahan abad ke 14 atau kurang lebih tahun 1350, prasasti tersebut menginformasikan adanya desa. Pada

tahun 1880 ditemukan pertulisan Walandit oleh seorang perempuan bangsa Indonesia di daerah Penanjangan Tengger Jawa Timur dan pada tahun 1899, tulisan tersebut disalin oleh Brandes. Dari piagam/tulisan tersebut diketahui bahwa warga Desa Walandit pada bulan terang (tetileman) dikenakan pungutan untuk upacara menghormati Berahma (gunung Bromo di Pegunungan Tengger). Perintah raja mengenakan pungutan kepada wara Desa Walandit tersebut ditulis dalam piagam Loyang. Prasasti dan piagam tersebut membuktikan bahwa pada masa itu di wilayah Nusantara sudah terdapat desa.

Demikian pula dengan yang terjadi di Aceh, sistem pemerintahan desa asli Aceh sebelum pemerintahan Hindia Belanda secara efektif telah menguasai Aceh. Unit pemerintahan desa di Aceh disebut Gampong, dimana sistem pemerintahan Gampong ini terdiri atas tiga unsur, yaitu: Keuchi, yang dibantu oleh beberapa wakil; Teungku, dan Ureung Tuha.

2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Desa sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sejak pemerintahan Stamford Raffles (1811 – 1816), adalah istilah yang mengandung pengertian “komunitas dan wilayah” di perdesaan Jawa dan Madura. Ke dua pulau ini yang paling lama dan secara intensif diatur dan diperintah oleh pemerintah jajahan selama satu abad. (Tjondronegoro,S.M.P,2011:22). Di tahun 1895 diperkirakan terdapat 30.000 desa di Jawa dan Madura, dengan jumlah penduduk 21.237.031 jiwa (Regering Almanak, 1895), walaupun sekitar 409.216 jiwa sudah tinggal di ibukota masing-masing wilayah. Artinya kurang lebih 19,2 % sudah dapat digolongkan sebagai penduduk kota.

Bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah politik dan kehidupan sosial ekonominya, sejak kerajaan Mataram, Banten, Cirebon, Aceh, Deli, Kutai, Pontianak. Goa, bone, Ternate,Klungkung, Karangasem, Bima dan lain-lainnya kehilangan kedaulatan dan kemerdekaannya.Kerajaan-kerajaan itu satu persatu menyerahkan kedaulatan politiknya kepada V.O.C, mulai tahun 1602 sampai terbentuknya Pemerintah Hindia Belanda, penyerahan kedaulatan kerajaan-kerajan tersebut masih berlangsung terus.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkuasa dari tahun 1798 sampai 1942 telah mengatur sebagian besar aspek kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menguntungkan Pemerintah Hindia Belanda dan harus ditaati oleh bangsa Indonesia. Tidak sedikit pula dibuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Desa atau yang sederajat dengan desa. Secara formal dan politis pemerintah Hindia Belanda memang menghormati dan mengakui serta “mempersilahkan” adat dan Hukum Adat berlaku dan digunakan sebagai landasan hukum bagi berbagai kegiatan hukum “Golongan Pribumi” dan sebagai hukum dasar bagi desa-desa, tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan politik dan sistem kolonialisme pemerintah Hindia Belanda.

Pada zaman penjajahan Belanda terdapat peraturan perundang-undangan mengenai desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura, serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten* yang berlaku bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Pemerintah Hindia Belanda memberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri kepada Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukumn Pribumi dengan sebutan *Inlandsche Gemeente* yang terdiri atas dua bentuk, yaitu Swapraja dan desa atau yang dipersamakan dengan desa. Bagi Swapraja-swapraja yaitu bekas-bekas kerajaan yang ditaklukkan tetapi masih diberi kelonggaran berupa hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan hukum adatnya dengan pengawasan penguasa Belanda, dan dengan pembatasan atas hal-hal tertentu.

Pada tahun 1854 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang merupakan cikal bakal peraturan tentang daerah dan desa. Desa atau *Inlandsche gemeente* adalah suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kepada Hukum Adat dan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu, dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintah Kabupaten dan Swapraja.

Kedudukan desa pada zaman pemerintah Hindia Belanda ini, kepala desa dan pemerintah desa dipilih sendiri dan disahkan oleh kepala daerah (residen). Kepala

desa berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). Gubernur jenderal menjaga hak tersebut terhadap seluruh pelanggarannya. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Kepala desa dan anggota pemerintahan desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk keperluan itu. Kepala Desa Bumiputera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangga desa, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah dan Residen dan Pemerintah otonom. Ada tiga hak desa sesuai dengan ketentuan tersebut, yaitu: 1) desa berhak memilih sendiri Kepala desa; 2) Desa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; dan 3) Desa yang terletak di kota (kota praja) dihapus.

3. Masa Pemerintahan Jepang

Sejak bulan Maret 1942 seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda jatuh ke dalam kekuasaan militer Jepang. Dengan sendirinya Jepang berkuasa atas segala sesuatunya di wilayah bekas jajahan Belanda di Indonesia. Pemerintah militer Jepang tidak banyak mengubah peraturan dan perundang-undangan yang dibuat Belanda, sepanjang tidak merugikan strategi Perang Asia Timur Raya, yang harus dimenangkan Jepang. Hukum adat juga tidak diganggu sepanjang tidak merugikan Jepang. Pada zaman pemerintahan Jepang pengaturan tentang desa diatur dalam Osamu Seirei yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret Tahun Syoowa 19 atau tahun 1944). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa sebutan kepala desa diseragamkan dengan sebutan Kuco. Tata cara pemilihan dan pemberhentian diatur dalam Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 2604 (1944). Nama desa diganti menjadi "Ku", Kepala Ku, desa (Kucoo) diangkat dengan cara pemilihan. Sedangkan dewan yang berhak menentukan tanggal dengan masa jabatan selama 4 tahun. Desa-desanya pada masa pendudukan Jepang dinilai sebagai bagian vital bagi strategi memenangkan "Perang Asia Timur Raya". Desa dijadikan basis logistik perang. Kewajiban desa –desanya semakin bertambah dan bebannya semakin berat. Desa harus menyediakan pangan dan tenaga manusia yang disebut Romusya untuk keperluan pertahanan militer Jepang. Rakyat desa dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan milisi seperti Heiho, Kaibodan, Seinendan. Kepala Desa

difungsikan sebagai pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki Jepang, seperti tanaman jarak, padi dan tebu.

Pada masa Jepang pengertian Desa (Ku) adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda serta pemerintah Jepang, yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, merupakan kesatuan ketata negaraan terkecil dalam daerah Syu (karesidenan), kepala desanya dipilih sendiri oleh rakyat, dan merupakan bagian dari sistem pertahanan militer Jepang.

4. Masyarakat Desa Pra Modernisasi

Masyarakat desa masa Pra modernisasi dicirikan oleh adanya masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya banyak dipengaruhi oleh adat istiadat. Adat istiadat merupakan suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan sosialnya. Masyarakat tradisional dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitarnya tanpa menerima pengaruh luar. Ciri dari kehidupan masyarakat tradisional adalah ketergantungan mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap lingkungan alam ditandai dengan proses adaptasi terhadap lingkungan alam tersebut.

Kehidupan masyarakat tradisional yang merupakan ciri masyarakat pra modernisasi banyak bergantung pada alam, oleh karenanya mereka merupakan masyarakat pertanian. Bidang pertanian menjadi kegiatan utama dan merupakan sumber utama kekayaan dan kekuatannya di masyarakat. Dalam masyarakat pertanian kepemilikan lahan merupakan hal sangat penting dan akan menentukan status sosial seseorang di samping faktor lainnya yaitu keturunan. Dalam kondisi semacam ini tuan tanah memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar atas perorangan. Pemilik tanah dapat membagikan tanah, pekerjaan dan sangat

berpengaruh terhadap hidup matinya rakyat perdesaan yang melarat dan tidak memiliki sarana produksi sendiri, dan menggantungkan hidup dari tuan tanah.

Perkembangan masyarakat desa masa pra modern, terjadi dengan adanya transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Masyarakat transisi merupakan masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Ciri-ciri masyarakat transisi adalah:

- a. Adanya pergeseran dalam aspek kehidupan. Contohnya dalam bidang pekerjaan, terjadi pergeseran dari pekerjaan pertanian ke pekerjaan non pertanian. Pertanian mulai ditinggalkan, banyak penduduk merantau ke kota dan meninggalkan kehidupan di desa karena adanya anggapan bahwa dengan bekerja di kota kesejahteraan akan menjadi lebih meningkat.
 - b. Adanya pergeseran tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang dulunya rendah karena masyarakat belum menyadari pentingnya pendidikan, mulai sadar pentingnya pendidikan terutama dalam mencari pekerjaan.
 - c. Masyarakat menjadi lebih maju, masyarakat mulai terbuka dengan hal-hal baru, sehingga masyarakat cenderung mengikuti perkembangan zaman untuk menghindari ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Mobilitas masyarakat lebih tinggi, pergeseran kedudukan sosial masyarakat berubah, baik vertikal maupun horizontal sebagai dampak profesi dan tingkat pendidikan.
 - e. Masyarakat mulai terbuka dengan berbagai perubahan dan kemajuan zaman.
 - f. Masyarakat sudah memiliki akses ke kota dengan semakin membaiknya sarana prasarana transportasi.
5. Perkembangan Desa Tahap Modernisasi.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan desa dan masyarakat desa modern terjadi pada masa pasca Indonesia merdeka sampai sekarang. Peraturan perundang-undangan tentang desa yang dibuat pada zaman Belanda dan zaman pendudukan Jepang masih bertahan cukup lama. Walaupun terbit Undang-undang Nomor 14 Tahun 1946 yang mengatur tentang syarat-syarat pemilihan kepala

desa. Semua warga desa yang telah berumur 18 tahun l atau lebih dan atau mereka yang sudah menikah berhak untuk ikut memilih. UU nomor 1 Tahun 1948 mengatur masa jabatan kepala desa yang tidak terbatas waktunya.

Pengaturan tentang desa baru diganti dengan terbitnya UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Terdapat kesamaan pengaturan antara pengaturan *Inland Gemeente dan Gemeente voor Buitengewesten* dengan UU Nomor 19 tahun 1965 dalam memandang desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak adat istiadat dan asal usul. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Desa atau desa Praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan harta benda sendiri.

Pada masa Orde Baru, peraturan perundang-undangan tentang desa mengalami perubahan dengan diterbitkannya UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Berdasarkan undang-undang ini, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut jelas bahwa pola hubungan antara desa dengan pemerintah pusat bersifat hierarkis, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dibuat oleh pemerintah pusat dan diberlakukan secara nasional. Dengan demikian hak otonomi desa sebenarnya kabur, administrasi desa dipisahkan dengan hak adat istiadat, desa diharuskan mengikuti pola baku dan seragam. Hak otonomi yaitu hak mengatur rumah tangga sendiri ditiadakan, desa hanya merupakan satuan administratif dalam tatanan pemerintah.

Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan, yaitu dengan terbitnya UU NO.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. dalam undang-undang tersebut secara jelas diakui adanya otonomi desa. Otonomi menurut UU No.22 Tahun 1999, adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Dengan terbitnya UU No 22 tahun 1999, terjadi perubahan dalam aspek pemerintahan desa. Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, dua hal yang tidak dikenal dalam UU No 5 tahun 1979.

6. Perkembangan Masyarakat Desa Tahap Modernisasi.

Dalam perkembangan selanjutnya tingkat laju perkembangan desa dan kota terdapat perbedaan yang tajam. Tingkat kemajuan di desa berjalan lambat, sementara dilekati ciri yang khas yaitu statis dan tradisional. Sedangkan kota mengalami tingkat kemajuan yang pesat jauh melampaui tingkat perkembangan masyarakat desa, sehingga terjadi kesenjangan di berbagai aspek antara desa dengan kota. Apabila diperhatikan, sebenarnya desa secara umum hakekatnya terletak pada adanya perbedaan sosial budaya yang signifikan antara desa dengan kota. Perbedaan itu dipertajam oleh adanya tatanan spasial desa- kota dalam dua kesatuan teritorial yang terpisah atau bahkan terisolasi satu sama lain. Perbedaan desa – kota ini dilestarikan oleh sistem pemerintahan / politik feodal. Feodalisme tidak hanya melestarikan perbedaan antara desa dan kota, tetapi juga menciptakan pola kebudayaan masyarakat perdesaan (rural society/community) yang sering disebut kebudayaan tradisional yang menjadi tipikal masyarakat desa yang khas (Everett M. Rogers,1969; Rahardjo,2008). Teknologi yang mengantar kemajuan peradaban manusia, pada awalnya mempertajam perbedaan antara desa dengan kota. Kesenjangan antara desa dan kota yang terjadi pada awal industrialisasi, atau ketika teknologi komunikasi dan transportasi yang berpadu dengan industri modern dan kapitalisme belum mengantar dunia ke arah era globalisasi.

Kesenjangan antara desa dan kota pada masa awal industrialisasi sampai era sebelum globalisasi sering direpresentasikan sebagai contoh empirik dari proses perkembangan evolusi sosial, sebagaimana teori evolusinya C.Darwin. Secara garis besar teori evolusi ini menjelaskan bahwa proses perkembangan masyarakat manusia terjadi dari tingkat yang serba sederhana berkembang menjadi bersifat serba kompleks (Herbert Spencer dalam Rahardo,2008:23). Teori evolusi ini lebih lanjut berkembang menjadi paradigma modernisasi. Dalam paradigma

modernisasi masyarakat akan berkembang dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat modern. Kerangka pemikiran dalam paradigma modernisasi ini tidak berbeda dengan teori evolusi sosialnya Herbert Spencer. Teori evolusi dengan sebuta kebersahajaan ke kompleksitas, sedang paradigma modernisasi dengan sebutan tradisional ke modern.

Pengaruh paradigma modernisasi terhadap pemahaman tentang perdesaan juga berpengaruh terhadap pencirian masyarakat perdesaan. Secara umum paradigma modernisasi menempatkan perdesaan sebagai representasi dari masyarakat tradisional, sedangkan perkotaan sebagai representasi dari masyarakat modern. Paradigma modernisasi melahirkan model-model konsep dikotomik seperti : *Gemeinschaft* vs *Gesellschaft*, solidaritas mekanik vs solidaritas organik, kelompok primer vs kelompok sekunder dan sebagainya. Paradigma modernisasi telah menciptakan perpektif dualistik yang menandai masyarakat perdesaan dengan ciri-ciri yang berseberangan dengan ciri-ciri masyarakat perkotaan.

Melihat adanya kenyataan kesenjangan desa- kota, maka pemerintahpun melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan atau membangun wilayah perdesaan, agar dapat : (a) menempatkan warga desa dalam kedudukan yang sama dengan penduduk kota, (b) mengusahakan agar corak kehidupan dan penghidupan warga desa dapat ditingkatkan atas dasar pikiran yang logis pragmatis dan rasional, (c) mengusahakan agar warga desa lebih kreatif dinamis dan fkelsibel dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sehingga lebih dapat meningkatkan pembangunan (Bintarto, 1983:18-19). Dengan demikian desa mengalami proses modernisasi, yang akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan di perdesaan, baik yang bersifat positif serta ada pula ekse negatipnya.

Modernisasi merupakan proses menjadi modern, modernisasi sering diartikan sebagai cara hidup yang sesuai dengan situasi saat ini, atau konteks “kekinian”. Modernisasi deas umumnya diartikan sebagai pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju atau modern sesuai dengan situasi kondisi zamannya. Biasanya modernisasi mencakup antara lain proses urbanisasi, industrialisasi, rasionalisasi, birokrasi, demokratisasi,

kapitalisme dan sebagainya. Modernisasi merupakan proses transformasi yang dilalui masyarakat tradisional atau masyarakat prateknologi untuk menjadi masyarakat yang ditandai oleh teknologi mesin, sikap rasional, serta struktur sosial yang sangat terdiferensiasi

Dalam buku *Interaksi Desa Kota*, Bintarto (1983:20) mengemukakan tujuan modernisasi, antara lain:

- a. Memberi gairah dan semangat hidup baru serta menghilangkan monotoninya kehidupan di desa, sehingga warga desa tidak jemu dengan lingkungan hidupnya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga desa sehingga dapat menahan arus urbanisasi.
- c. Meningkatkan pendidikan secara merata sehingga dapat mengurangi arus pelajar ke kota, dan tenaga terdidik akan tetap tinggal di desa.
- d. Modernisasi di bidang transportasi akan dapat menghilangkan sifat isolasi desa.
- e. Modernisasi merupakan tumpuan bagi pengembangan teknologi perdesaan, dan dalam proses pengembangannya warga desa dapat diikuti sertakan.

Modernisasi tidak lepas dari kemajuan teknologi, agar masyarakat perdesaan dapat ditingkatkan kehidupan dan penghidupannya, maka yang diperlukan disini adalah kemampuan masyarakat untuk dapat menyerap dan mengontrol teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia agar dapat meminimalkan efek negatifnya.

7. Desa di Era Globalisasi

Modernisasi dengan teknologi modernnya menimbulkan kesenjangan antara desa dengan kota. Masih tampak jelas isolasi geografis yang memisahkan desa dan kota sebagai satuan teritorial yang berbeda, dengan satuan komunitas yang berbeda pula. Kemajuan teknologi belum sepenuhnya mampu menembus isolasi geografis yang ada. Kemudian dengan kemajuan teknologi terutama kemajuan teknologi komunikasi yang pesat, akhirnya mampu mengubah perbedaan yang nyata antara desa dengan kota. Demikian pula dengan transportasi

modern dengan jaringan sarana prasarananya telah mampu menembus isolasi geografis yang memisahkan masyarakat perdesaan dan perkotaan. Media komunikasi modern mampu pula menembus isolasi sosial budaya antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan. Penyebaran teknologi modern tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh tingkat kemajuan teknologi, tetapi juga oleh arus utama dalam kehidupan manusia yang tercipta oleh ekspansi sistem kapitalisme modern yang berkembang menjadi sistem dunia (world system). Proses tranparansi yang mengiringi globalisasi telah menembus batas-batas sosial, budaya, politik, ekonomi, teritorial sehingga dunia seolah-olah menjadi tanpa batas.

8. Desa-desa di Indonesia

Proses perkembangan masyarakat manusia di dunia ini bersifat universal, oleh karena itu perkembangan desa /masyarakat desa di Indonesia juga tidak terpisahkan dari gejala universal . Desa di Indonesia juga mempunyai karakteristik yang sama. Jenis matapencaharian utama pertanian, hubungan antar warga yang cenderung bersifat intim dan informal, adanya homogenitas dalam berbagai aspek kehidupan, mobilitas yang relatif rendah merupakan sekian ciri-ciri masyarakat perdesaan di berbagai daerah di dunia yang juga dimiliki oleh masyarakat desa di Indonesia.

Dalam kerangka paradigma modernisasi, desa-desa di Indonesia juga memiliki ciri-ciri tradisional seperti ciri yang dilabelkan pada paradigma modernisasi ini. Desa di Indonesia juga merupakan masyarakat *Gemeinschaft*, suatu masyarakat yang bercirikan hubungan dasar yang bersifat pribadi, tidak rasional dan awet. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terintegrasi atas dasar solidaritas mekanik dan dominan kelompok primer. Namun hal ini tidak berarti bahwa desa di Indonesia sepenuhnya sama dengan country di Amerika Serikat, village di Inggris atau dorf di Jerman. Desa-desa di Indonesia tidak dapat digeneralisasikan dalam generalisasi desa-desa di dunia. Jangankan di tingkat dunia, di Indonesia sendiri sulit untuk mencari bentuk generalisasi desa yang seragam, khas Indonesia. Kemajemukan kondisi Indonesia dari berbagai aspek berdampak terhadap pemahaman tentang desa-masyarakat desa di Indonesia. Ada

banyak istilah yang digunakan untuk merujuk tentang desa, misalnya huta, mukim, nagari, kampung, maraga, dsb. Demikian pula karakteristik sosial budayanya sangat beragam. Pengertian yang seragam tentang desa di Indonesia dapat diperoleh apabila penyebutan tentang desa didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan pada masa orde baru yang mengatur tentang desa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kemudian pada periode kepemimpinan berikutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tentang Kelurahan, dan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan menjelaskan pengertian desa dan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan memiliki masyarakat lebih heterogen, longgar dalam norma adat istiadat, kelurahan tidak memiliki otonomi karena sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota hanya memiliki kewenangan administratif dalam bentuk penetapan keputusan kepala kelurahan.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

C. Karakteristik Wilayah Perdesaan

1. Batasan Pengertian *Settlement*, Desa, Unsur-unsur, Potensi dan Fungsi Desa

a. Pengertian *settlement*

Sebelum dibahas pengertian tentang desa dan perdesaan terlebih dulu dipahami terlebih dulu arti "*settlement*". *Settlement* atau tempat kediaman penduduk dapat diartikan sebagai: Pertama, dalam arti sempit, merupakan tempat kediaman penduduk dengan memperhatikan susunan dan persebaran bangunan yang ada seperti: rumah-rumah, gedung-gedung, sekolah, kantor, dan sebagainya. Kedua, dalam arti luas, dengan memperhatikan bangunan-bangunan, jalan-jalan dan pekarangan yang menjadi salah satu sumber kehidupan penduduk. Mengingat bahwa fungsi *settlement* tidak hanya sebagai tempat berteduh dan untuk tidur dalam jangka pendek, tetapi merupakan suatu ruang untuk hidup secara turun temurun, maka lebih tepat digunakan arti *settlement* dalam arti luas.

Land settlement adalah suatu tempat atau suatu daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, mereka menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Pengertian Dasar Perumahan dan Permukiman, disebutkan bahwa : yang dimaksud permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik di perdesaan maupun di perkotaan, dan memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat hunian, serta tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan penduduk.

Pengertian permukiman dalam arti luas juga dikemukakan oleh Hadi Sabari Yunus (1987:3), permukiman mempunyai arti perihal tempat tinggal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah tempat tinggal, bangunan tempat tinggal. Lebih lanjut Suparlan (dalam Imam Setyobudi, 2001:187), permukiman bukan sekedar sebagai suatu tempat tinggal, tetapi merupakan suatu satuan yang kompleks, yang melibatkan berbagai unsur-unsur kebudayaan yang mewujudkan

bukan hanya kegiatan biologis, tetapi juga kegiatan sosial, ekonomi, politik, agama dan sebagainya.

Jadi permukiman merupakan tempat tinggal manusia dan merupakan salah satu hasil budaya manusia dalam berinteraksi beradaptasi dengan lingkungan. Sebagai suatu kenampakan geografis, wilayah permukiman dapat dibedakan atas permukiman di perdesaan dan perkotaan, dimana diantara keduanya terdapat perbedaan yang jelas, baik perbedaan ciri fisik wilayah maupun kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Desa merupakan land settlement yang bersifat rural. Umumnya desa digambarkan sebagai unit-unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan letaknya relatif jauh dari kota.

b. Batasan pengertian desa

Desa dan perdesaan dewasa ini telah menjadi obyek kajian berbagai disiplin ilmu, seperti geografi, sosiologi, administrasi, hukum, lingkungan dan sebagainya. Istilah desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu desi yang berarti dusun, tempat tinggal, negeri asal, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah perdesaan merupakan pengembangan dari istilah desa yang lebih mengacu pada ciri-ciri wilayah yang lebih luas. Desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village, dibandingkan dengan kota dan perkotaan (city/town dan urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu pada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada satuan wilayah administrasi atau teritorial. Batasan pengertian desa dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya aspek geografi, sosiologi, demografi dan administrasi perundang-undangan.

1) Batasan pengertian desa dari aspek sosiologis

Banyak ahli sosiologi yang memberi batasan pengertian tentang desa, antara lain:

P.J. Bouman (1976: 81), desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama yang intinya adalah tinggal bersama dengan beberapa orang, di dalam suatu desa beberapa orang tersebut hampir semuanya saling mengenal, terdapat ikatan kekeluargaan yang rapat, ketaatan pada

tradisi dan kaidah sosial, jiwa keagamaan yang tumbuh kuat, tergantung kepada alam.

Sementara itu Talcot Parsons menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*), dengan ciri-ciri kesetia kawan, mementingkan kebersamaan, kebiasaan dan keturunan, tidak banyak terpengaruh dari luar, corak kehidupan didasarkan ikatan kekeluargaan yang erat, memiliki gotong royong yang masih kuat, masyarakatnya merupakan “face to face group”. Egon E. Bergel (1995), desa merupakan permukiman para petani (Muta’ali, 2013:40). Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada sub bab “Karakteristik Masyarakat Desa”.

2) Batasan pengertian desa: aspek demografi

Batasan pengertian desa tinjauan demografis didasarkan atas jumlah penduduk. BPS mengklasifikasikan desa dengan batasan jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa. Selain itu juga dipertimbangkan kepadatan penduduk, persentase jumlah penduduk petani, serta ketersediaan sarana prasarana (Muta’ali,2013:41). Batasan desa adalah suatu tempat yang mempunyai penduduk kurang lebih 2.500 orang. Paul Landis, di samping menggunakan parameter jumlah penduduk 2.500 jiwa, juga menambahkan ciri-ciri masyarakatnya sebagai berikut:

- 1) Mempunyai pergaulan hidup saling kenal mengenal satu sama lain.
- 2) Terdapat pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan
- 3) Cara berusaha di bidang agraris, yang umumnya dipengaruhi faktor alam seperti iklim,keadaan alam, kekayaan alam, sedang pekerjaan non agraris hanya merupakan pekerjaan tambahan.

Selanjutnya Highsmith & Ray M.Northam (1968), Northam (1976) (Yunus,2009:47) berdasarkan hirarki permukiman menyebutkan bahwa desa (*village*) adalah suatu permukiman dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 8, ayat (3) disebutkan bahwa terkait dengan jumlah penduduk, desa dapat dibentuk bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Wilayah Jawa, paling sedikit jumlah penduduk 6.000 jiwa, atau 1.200 kepala keluarga;
- 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;
- 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
- 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga;
- 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
- 6) Wilayah Sulawesi tengah, Barat, tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
- 7) Wilayah Kalimantan Timur, Barat, Tengah, dan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
- 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
- 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penentuan desa di berbagai wilayah di Indonesia sangat beragam, sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing, khususnya jumlah dan kepadatan penduduk wilayah yang bersangkutan.

- 3) Batasan pengertian desa: aspek geografis.

Desa merupakan land settlement yang bersifat rural. Sebenarnya tidaklah mudah untuk mendefinisikan baik desa ataupun kota secara tepat, seperti yang dikemukakan oleh Lowry Nelson:” while *precice definitions of rural and urban are not possible, nor necessary for our purposes, it is important that the two fields be roughly defined. Because every one have a general idea of the meaning of these terms, the student*

may be surprised to learn that a precise definition can not be given". Bila ditinjau pendapat Lowry Nelson tersebut, maka memang sulit memberikan definisi desa secara tepat karena materinya sendiri tidak merupakan sesuatu yang statis, dan tidak mudah diamati secara tepat. Hal senada dikemukakan oleh Bintarto, namun sebagai seorang geograf Bintarto mendasarkan pada adanya faktor-faktor geografi yang mempengaruhi desa, sehingga ia mendefinisikan desa adalah: Desa adalah suatu perwujudan geografis yang merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. (Bintarto, 1983:11). Selanjutnya Bintarto membedakan desa berdasarkan arti umum, yaitu desa sebagai unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris, dan terletak jauh dari kota. Sedang desa dari segi administratif diartikan sebagai wilayah kesatuan administratif yang dikenal dengan istilah kelurahan (terdapat di kota).

4) Batasan pengertian desa : aspek administrasi dan perundang-undangan.

Pada bagian terdahulu sudah disebutkan bahwa pada masa Orde Baru diterbitkan peraturan perundang-undangan tentang desa, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan," desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut maka diketahui bahwa dalam suatu desa harus ada unsur wilayah, penduduk serta organisasi pemerintahan, desa juga memiliki hak otonomi, yang dinyatakan dalam " berhak untuk menyelenggarakan rumah tangga perdesaan sendiri.

Berdasarkan batasan pengertian tersebut desa-desa di Indonesia tidak sekedar sebagai satuan teritorial administratif, tetapi desa obyek berbagai program pemerintah pusat, sehingga bersifat sentralistik. Berbagai kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat desa sebagai nobyek dalam jangka panjang mengakibatkan ketergantungan masyarakat desa terhadap pemerintah. Dengan demikian kemandirian desa pada masa orde baru menjadi lemah.

Setelah Orde Baru jatuh, peraturan perundangan yang mengatur tentang perdesaan adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengatur tidak hanya sektor perdesaan tetapi juga mengatur tentang pemerintahan daerah. Walaupun undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, namun masih banyak mengenai jumlah maupun beberapa ciri yang terlekat pada desa belum sepenuhnya disesuaikan dengan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999.

Selanjutnya pada tahun 2004, terbit Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, disebutkan;” desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka desa adalah sekelompok manusia yang tergabung dalam kesatuan masyarakat hukum dan bertempat tinggal di suatu wilayah yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan serta memiliki pemerintahan yang hendak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian jelas bahwa desa memiliki kewenangan : mengatur, mengurus dan administrasi.

Dalam perkembangan terkini, batasan pengertian lebih luas tentang desa, diatur dalam Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, didalamnya disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. |Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota, desa terdiri dari Desa dan Desa Adat.

Dalam penjelasan selanjutnya dikemukakan bahwa, desa yang disebut dengan nama lain, mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Sedangkan desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, peneglolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa Adat, agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat mempunyai hak asal usul yang lebih dominan dibandingkan hak asal usul Desa, sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial, yang berwenang mengatur menurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan atau genealogis dan teritorial. Undang-Undang ini mengatur kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam hal ini negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Unsur-Unsur Desa

Menurut Bintarto (1986:47), desa terbentuk oleh adanya tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Ke tiga unsur tersebut adalah wilayah, penduduk dan tata kehidupan.

1. Daerah atau wilayah.

Daerah atau wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas, baik sosial ekonomi, maupun budaya. Pemilihan wilayah sebagai tempat aktivitas dipengaruhi banyak faktor seperti iklim, keadaan tanah, topografi, air dan sebagainya.

Adanya perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Wilayah atau daerah mencakup produktif tidaknya tanah serta penggunaannya, luas wilayah, unsur lokasi, batas wilayah yang semua itu merupakan lingkungan geografis setempat.

2. Penduduk, merupakan salah satu unsur desa yang penting, mencakup jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk setempat.

3. Tata kehidupan

Tata kehidupan masyarakat perdesaan meliputi tata pergaulan, adat istiadat, organisasi pemerintah dan ikatan-ikatan yang melatar belakangi kehidupan masyarakat desa. Jadi tata kehidupan dalam hal ini meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

Ketiga unsur desa tersebut tidak lepas satu samalain, artinya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan. Unsur daerah/wilayah, penduduk dan tata kehidupan merupakan satu kesatuan hidup atau "living unit". Daerah menyediakan kemungkinan hidup, penduduk menggunakan kemungkinan yang

disediakan oleh daerah itu untuk melangsungkan kehidupan. Tata kehidupan dalam arti yang baik, akan memberikan jaminan ketenteraman dan keserasian hidup bersama di perdesaan (Bintarto,1977:15). Dengan demikian setiap desa memiliki “*geographical setting*” dan “*human efforts*” nya masing-masing, yang satu sama lain dapat berbeda-beda. Oleh karena itu tingkat kemakmuran dan kemajuan desa tidak sama.Maju mundurnya desa memang banyak dipengaruhi tiga unsur desa, yang dalam kenyetaannya ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human efforts*) dan tata geografi (*geographical settings*).

Unsur lain yang termasuk unsur desa adalah unsur letak. Umumnya letak suatu desa jauh dari kota, atau pusat-pusat keramaian. Unsur letak akan menentukan aksesibilitas desa, menentukan besar kecil isolasi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Desa yang letaknya strategis, aksesibilitas tinggi mudah dijangkau apalagi misalnya berbatasan dengan kota mempunyai kemungkinan berkembang lebih cepat dibanding desa di pedalaman.

Unsur penduduk, penduduk merupakan unsur yang penting bagi desa. Tenaga potensial banyak terdapat di desa yang kehidupannya masih terikat dalam bidang pertanian. Kadang-kadang di perdesaan dirasakan adanya tenaga-tenaga kerja yang berlebihan di bidang pertanian pada musim-musim tertentu, karena pekerjaan pertanian bersifat musiman. Namun demikian pada saat banyak pekerjaan di bidang pertanian membutuhkan banyak tenaga kerja, dirasakan kurangnya tenaga kerja pertanian. Hal ini disebabkan tingginya urbanisasi, dan semakin rendahnya minat untuk bekerja di bidang pertanian, terutama bagi generasi muda.

Tata kehidupan, corak kehidupan di perdesaan didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang relatif masih erat, dibanding dengan kehidupan di kota. masyarakatnya merupakan masyarakat “*gemeinschaft*” yang memiliki gotong royong yang kuat, walaupun di beberapa daerah menunjukkan adanya gejala semakin meluntur sebagai dampak dari arus globalisasi. Pembahasan tentang gotong royong masyarakat desa dapat dibaca lebih lanjut pada bahasan tentang Karakteristik Masyarakat Desa.

Desa-desanya di Jawa pada awal mulanya dihuni oleh orang-orang seketurunan, mereka mempunyai nenek moyang sama yaitu para cikal bakal yakni pendiri permukiman yang bersangkutan. Bila suatu desa telah penuh, masalah-masalah ekonomi bermunculan, beberapa keluarga keluar untuk mendirikan permukiman baru dengan cara membuka hutan. Tindakan ini disebut tetruka. Menurut Marbun dalam (Daldjoeni,1998:55) di Tapanuli pembukaan desa baru sebagian disebabkan keinginan kelompok baru dalam proses mencapai hak dan kewajiban sebagai raja adat atau karena tanah desa sudah tidak memadai lagi untuk menghidupi penghuninya.

Dapat dikatakan bahwa di masa lalu desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki tiga hal yang disebut : rangkalah (wilayah), darah (satu keturunan), dan warah (ajaran atau adat). Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dikemukakan Bintarto yang menyebutkan unsur desa ada tiga, yaitu daerah atau wilayah, penduduk dan tata kehidupan. Kesimpulan; setiap desa pasti memiliki “ *geographical setting* dan *human effortnya* masing-masing yang berbeda-beda. Ada desa bersumberdaya menguntungkan, tetapi semangat membangun, keterampilan dan pengetahuan masyarakatnya kurang. Sebaliknya ada dengan sumberdaya yang terbatas tetapi dapat maju perekonomiannya karena kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan alam.

c. Fungsi Desa

Dalam hubungannya dengan kota maka fungsi desa, pertama merupakan *hinterland* atau daerah penyokong/dukong berfungsi sebagai daerah pemberi bahan makanan pokok baik yang berasal dari nabatai maupun hewani. Kedua, ditinjau dari segi potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Ketiga, dari segi kegiatan kerja (okupasi) desa dapat merupakan desa agraris, manufaktur, industri, nelayan dan sebagainya.

Menurut Sutopo Yuwono (dalam Bintarto,1983:16), salah satu peran pokok desa terletak di bidang ekonomi. Daerah perdesaan merupakan tempat produksi pangan dan komoditi ekspor. Peranan vital dalam rangka menyangkut produksi pangan akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan

pangan nasional. Oleh karena itu peranan masyarakat perdesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan penting sekali.

d. Potensi Desa

Hasil akhir dari proses pembangunan wilayah perdesaan dapat diketahui dengan menganalisis perkembangan desa dari waktu ke waktu. Semakin cepat perkembangan desa, semakin dekat pencapaian tujuan pembangunan. Di lain pihak perkembangan desa erat kaitannya dengan potensi yang dimiliki desa yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk melihat perkembangan desa, tidak dapat lepas dengan analisis potensi desa., umumnya semakin tinggi potensi desa, semakin besar tingkat perkembangan wilayah.

Potensi desa merupakan kemampuan yang mungkin dapat diaktifkan dalam pembangunan, mencakup kondisi alam dan manusianya, serta hasil kerja manusia itu sendiri. Komponen-komponen potensi desa pada dasarnya meliputi unsur-unsur seperti: alam, lingkungan hidup manusia, penduduk, usaha-usaha manusia, serta sarana prasarana yang dibuat.

Bintarto (1983:17-18), membedakan potensi desa atas potensi fisis dan potensi non fisis.

Potensi fisis, meliputi:

1. Tanah, dalam arti sebagai sumber bahan tambang dan mineral, sumber tanaman, yang merupakan sumber mata pencaharian dan kehidupan
2. Air, dalam arti sumber air, kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, dan keperluan sehari-hari.
3. Iklim yang berperan penting dalam kegiatan pertanian.
4. Ternak, dalam arti ternak sebagai sumber tenaga kerja, sumber bahan pangan dan sumber pendapatan.
5. Manusia dalam arti sebagai pengolah tanah dan juga sebagai produsen.

Potensi non fisis, meliputi antara lain:

1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong yang dapat merupakan kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian diantara sesama warga desa.

2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, yang dapat membantu dan membimbing warga desa.
3. Aparatur dan pamong desa, yang merupakan sumber kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa.

Potensi desa satu dengan lainnya tidak sama, karena lingkungan geografis dan keadaan penduduknya berbeda, luas tanah, macam tanah, kesuburan tanah yang tidak sama. Sumber air dan tata air yang berbeda menyebabkan cara penyesuaian atau cara kehidupan yang berbeda pula. Hal inilah yang menyebabkan berbagai tingkat kemajuan desa, ada desa yang kurang berkembang, sedang berkembang, dan desa yang maju. Sebagai kesimpulan tentang faktor yang dapat mempengaruhi maju mundurnya desa, dapat disebutkan antara lain: a) potensi desa yang mencakup potensi sumber daya alam, potensi penduduk warga desa serta aparatur desa; b) interaksi antara desa dengan kota, antara desa dengan desa lainnya yang dipengaruhi perkembangan transportasi dan komunikasi; c) lokasi desa terhadap daerah sekitarnya yang lebih maju.

Sebagai tambahan, tentang unsur-unsur yang mempengaruhi perkembangan desa, Sajogyo (1984:152) mengemukakan bahwa tingkat perkembangan desa ditentukan oleh:

- a. Imbang daya unsur-unsur dari dalam desa itu sendiri.
- b. Pengaruh unsur-unsur dari dalam desa itu sendiri.
- c. Intensitas pengaruh unsur dari luar yang ditentukan oleh posisi desa terhadap pusat-pusat unit wilayah yang lebih besar dan pusat-pusat pelayanan.
- d. Komposisi jenis dan karakteristik kegiatan ekonomi yaitu primer, sekunder, tersier.

Indikator potensi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Data Profil Desa.

Tabel 1. Indikator Potensi Desa

No	Potensi desa	Indikator
1	Sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1) potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak; 2) pertanian 3) perkebunan 4) kehutanan 5) peternakan 6) perikanan 7) bahan galian 8) sumberdaya air 9) kualitas lingkungan 10) ruang publik/taman 11) wisata
2	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah 2) usia 3) pendidikan 4) mata pencaharian pokok 5) agama dan aliran kepercayaan 6) kewarganegaraan 7) etnis/suku bangsa 8) cacat fisik dan mental 9) tenaga kerja
3	Sumber daya kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) lembaga pemerintahan desa dan kelurahan 2) lembaga kemasyarakatan 3) organisasi profesi 4) partai politik

4	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 5) lembaga perekonomian 6) lembaga pendidikan 7) lembaga adat 8) lembaga ketertiban dan keamanan 1) transportasi 2) informasi dan komunikasi 3) prasarana air bersih dan sanitasi 4) prasarana dan kondidi irigasi 5) prasarana dan sarana pemerintahan 6) sarana prasarana lembaga kemasyarakatan 7) prasarana peribadatan 8) prasarana olah raga 9) prasarana dan sarana kesehatan 10) prasarana dan sarana pendidikan 11) prasarana dan sarana energi penerangan 12) prasarana dan sarana hiburan dan wisata 13) prasarana dan sarana kebersihan
---	----------------------	---

e. Karakteristik Masyarakat Desa

Tidak ada garis pemisah yang tegas antara masyarakat desa dengan kota, sebaliknya pertemuan antara masyarakat desa dengan kota adalah suatu perkembangan penting menuju kehidupan modern. Namun demikian dalam kajian kemasyarakatan sering dibedakan antara msyarakat perdesaan dengan masyarakat kota. Menurut Soekanto (1994), perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana yang ditujukan untuk ciri masyarakat perdesaan. Karena dalam masyarakat modern, betapapun kecilnya suuatu desa, pasti sudah mendapatkan pengaruh dari kota.

Demikian pula sebaliknya, dalam masyarakat perkotaan masih dapat ditemukan ciri karakter desa.

Soemarjan,(1993) dalam Muta'ali (2013:49) menyebutkan bahwa tata kehidupan “ruralisme” masih berlaku kental pada masyarakat perdesaan, walaupun diakui bahwa ada kecenderungan pergeseran ke arah “urbanisme”. Ruralisme adalah tata hidup masyarakat di perdesaan (rural areas) yang pada dasarnya merupakan tata hidup agraris, yang berpegangan kuat pada adat yang diturunkan dari generasi kepada generasi berikutnya tanpa perubahan. Di dalam “ruralisme” terdapat unsur-unsur kekeluargaan, gotong royong dan sikap pada kekuatan-kekuatan alam di sekitarnya. Selain itu adat dan agama merupakan suatu sumber inovasi bagi kehidupan masyarakat yang mampu menjaga dan melestarikan solidaritas sosial yang kuat.

Banyak pendapat yang mendeskripsikann perbedaan kehidupan antara masyarakat desa dengan kota. Roucek (1984:102-111), menjelaskan ciri-ciri tertentu yang membedakan kehidupan masyarakat desa dengan kota sebagai berikut:

- 1) Pentingnya kelompok inti dan peranan kelompok inti di kalangan penduduk desa.
- 2) Masyarakat desa saling kenal secara akrab.
- 3) Adanya homogenitas dalam hal mata pencaharian, kelas sosial, latar belakang etnik dan ideologi.
- 4) Mobilitas sosial rendah.
- 5) Keluarga sebagai unit produksi ekonomi.
- 6) Tingginya jumlah anak pada rumah tangga petani.
- 7) Merupakan masyarakat agraris.

Selanjutnya Sorokin dan Zimmerman dalam Smith dan P.E Zpo (1970),mengemukakan sejumlah faktor yaitu mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan solidaritas sosial sebagai indikator yang membedakan karakteristik masyarakat desa dengan kota. Apabila diperhatikan secara teliti,

karakteristik masyarakat desa dan kota menyangkut berbagai aspek kehidupan. karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Pekerjaan (*occupation*)

Pada umumnya pekerjaan di peresaan masih tergantung kepada alam, di samping itu jenis pekerjaan juga kurang bervariasi seperti halnya di perkotaan. oleh karena itu walaupun t5erdapat diversifikasi mata pencaharian, namun masih dapat dikatakan bahwa masyarakat perdesaan merupakan masyarakat agraris, baik yang hiudp dari bercocok tanam, beternak, perikanan ataupun kehutanan. Seperti yang dikemukakan oleh Lynn Smith (1951:44), bahwadi desa mempunyai obyek tentang tanaman dan hewan. Di desa masyarakat bekerja di tempat terbuka dibawah terik matahari, pekerjaan banyak dipengaruhi oleh lingkungan alam.

2) Ukuran Masyarakat (*size of community*) perdesaan relatif kecil. Sifat pekerjaan pertanian menuntut adanya tanah tertentu bagi per orangnya, tingginya rasio tanah dan manusia merupakan realita yang membuat besarnya komunitas hampir tidak mungkin. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya kepadatan penduduk perdesaan, dengan kata lain ukuran komunitas dan kepadatan penduduk, ke duanya secara langsubg tergantung pada sifat pekerjaan pertasnian. Komunitas kecil dianggap sinonim dengan komunitas perdesaan, seperti halnya komunitas luas sebagai perkotaan. jadi ukuran luas didasarkan padasifat-sifat pekerjaan pertanian membuat komunitas besarnya penduduk pertanian hampir tidak mungkin. Hal ini disebabkan perlu adanya daya dukung lingkungan dengan batasan tertentu yang harus dipenuhi agar masyarakat masih dapat didukung dan dapat hidup sejahtera.

3) Kepadatan penduduk (*density of population*)

Kapadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah per kilometer persegi. Kepadatan penduduk perdesaan dibandingkan dengan seluruh luas tanah yang ada relatif rendah. Kepadatan penduduk yang rendah ini memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang intim dan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam

kelompok sosial yang menyebabkan orang tidak terisolasi secara psikologis

4) Lingkungan (*environment*)

Bernard, dikutip oleh Lynn Smith (1951:47), mengklasifikasikan lingkungan terdiri atas: a) lingkungan fisik atau inorganik; b) lingkungan biologis atau organik; c) lingkungan sosial; d) campuran atau institusionalisasi yang berasal dari lingkungan kontrol. Menurut Bernard, lingkungan fisik adalah termasuk semua sumber-sumber kosmis dan fisiografis, tanah, iklim, sumber-sumber inorganik, kekuatan-kekuatan alam seperti angin, pasang surut, gravitasi dan lain-lainnya. Lingkungan ini bagi masyarakat perdesaan sangat berpengaruh. Lingkungan biologis atau organik adalah mikro organisme, serangga, parasit, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sedangkan lingkungan sosial terdiri atas tiga bagian, yaitu fisio sosial, bio sosial, dan psiko sosial.

Fisio sosial digunakan untuk menunjukkan porsi kebudayaan material yang penampilan obyektifnya terkonstruksi di luar materi-materi inorganik, antara lain: alat-alat, senjata, mesin-mesin, jalan dan sebagainya. Bio sosial, terdiri dari aspek human dan non human. Aspek non human bio sosial adalah tanaman-tanaman dan hewan-hewan dan seluruh material yang berasal dari sumber organik. Sedangkan human bio sosial adalah kehidupan manusia dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Psiko sosial adalah lingkungan sosial yang ditandai oleh tingkah laku dalam (inner behavioral), seperti ide-ide, keinginan-keinginan dll. Sedangkan penampilan luar (outward expressions) adalah adat istiadat (customs), kebiasaan (folkways) dan simbol-simbol eksternal seperti bahasa.

Campuran atau institusionalisasi yang berasal dari lingkungan kontrol terdiri atas unsur-unsur gabungan tiga lainnya, yaitu yang membatasi sistem-sistem pekerjaan. Hal ini merupakan lingkungan yang sesungguhnya beroperasi dalam organisasi sosial. Sistem ini umumnya

dapat terjadi pada karakter yang diperlihatkan oleh sistem-sistem seperti ekonomi, politik, ras, pendidikan dan sebagainya.

Dengan ciri sebagai masyarakat agraris, petani hidup di tengah-tengah suatu lingkungan yang berbeda dengan kota. di perdesaan kepentingan terutama dikaitkan dengan kenyataan bahwa secara praktis semua aspek kehidupan perdesaan selalu dikaitkan dengan kenyataan bahwa secara praktis semua aspek kehidupan di perdesaan dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan fisik. Aktivitas pertanian mengharuskan untuk bekerja di luar rumah. Hal ini berarti petani secara langsung terpengaruh oleh cuaca. Dengan demikian masyarakat pedesaan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan organik daripada masyarakat kota

5) Diferensiasi sosial

Diferensiasi sosial sangat dipengaruhi oleh jumlah kelompok sosial yang ada. Pada masyarakat perdesaan, jumlah kelompok sosial tidak sebanyak dan sekompleks masyarakat perkotaan. Daerah perdesaan pada dasarnya bersifat homogen, hampir semua penduduk mempunyai keseragaman dalam hal pekerjaan, bahasa, adat istiadat dan lain-lainnya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor generasi yang secara turun temurun tinggal di desa tersebut, sehingga warisan sosial budaya (social cultural heritage) menjadi transfer of culture.saja.Bahkan di beberapa desa tampak adanya kelompok masyarakat yang mempunyai garis keturunan yang sama. Garis keturunan yang sama ini misalnya pada suku Batak, dalam satu desa terdapat kerabat-kerabat yang berasal dari satu nenek moyang. Keturunan ini ditandai dengan marga yang dimiliki oleh penduduk desa tersebut. Dalam satu desa mayoritas terdiri dari satu marga yang sama.

Selain karena homogenitas masyarakat desa, diferensiasi sosial pada masyarakat perdesaan juga disebabkan oleh perbedaan struktur sosial, yang sebenarnya tidak terlalu jelas. Diferensiasi sosial pada masyarakat perdesaan tidak begitu besar, karena kecilnya heterogenitas sehingga hubungan antar individu atau keluarga sangat dekat. Penduduk

perdesaan mempunyai ikatan yang erat, karena struktur masyarakatnya yang sedemikian rupa sehingga membuat perbedaan-perbedaan di antara mereka tidak begitu besar. Mereka juga tidak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

6. Stratifikasi sosial

Prinsip-prinsip kelas yang terdapat di daerah perdesaan berbeda dengan di perkotaan. Terdapat perbedaan utama di antara piramida sosial yang ada di perdesaan dan perkotaan, yaitu antara lain:

- a. Jumlah kelas-kelas sosial di perdesaan lebih sedikit daripada di perkotaan, walaupun sebenarnya masyarakat perdesaan sangat jauh dari pembagian kelas ini.
- b. Perbedaan antara kelas satu dengan lainnya di perdesaan tidak begitu besar, sedang di perkotaan perbedaan itu mencolok.
- c. Jarak kelas sosial di perdesaan kecil dibandingkan dengan di perkotaan,
- d. Prinsip kasta di perkotaan tidak berlaku di perdesaan.

7. Mobilitas sosial

Masyarakat perdesaan anggota-anggotanya lebih kuat terkait dengan status sosial mereka, sedang di perkotaan mereka lebih sering berubah dan berpindah dari status satu ke status lainnya. Di perdesaan perpindahan status jarang terlihat, di samping tidak adanya variasi lapangan kerja atau tingkatan status yang akan mereka capai, sikap dan keinginan mereka untuk pindah profesi juga kecil. Mobilitas yang terjadi di perdesaan lebih banyak berbentuk mobilitas horizontal, dalam arti mobilitas yang tidak memberi peningkatan dalam strata sosial yang ada.

8. Solidaritas sosial.

Emile Durkheim membandingkan perbedaan solidaritas sosial antara masyarakat perdesaan dan perkotaan, bahwa solidaritas sosial pada masyarakat perdesaan merupakan kesatuan (*unity*) yang didasarkan atas persamaan-persamaan, yaitu kesatuan yang dihasilkan dari sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama (*common traits*), tujuan yang sama, serta pengalaman

yang relatif sama. Solidaritas semacam ini disebut solidaritas mekanis. Pada masyarakat perkotaan tipe kesatuan didasarkan atas perbedaan-perbedaan, ketidak samaan yang timbul karena adanya pembagian pekerjaan, spesialisasi, dan saling ketergantungan satu sama lain. Inilah yang disebut Durkheim dengan istilah solidaritas organis.

Kadar solidaritas dipengaruhi sejumlah faktor, apabila faktor pengikat satu, maka disebut kelompok Elementary group, bila faktor pengikat lebih dari satu, maka disebut kelompok Cumulative group. Oleh karena itu intensitas solidaritas ditentukan oleh: a) sifat tujuan pengelompokkan; dan b) jumlah faktor yang menjadi pengikat, semakin banyak faktor pengikat, solidaritas semakin tinggi. Adapun faktor-faktor pengikat tersebut dapat berupa:

- a. Marga
- b. Pernikahan
- c. Persamaan agama
- d. Persamaan bahasa
- e. Persamaan adat istiadat
- f. Kesamaan tanah/ wilayah
- g. Tanggung jawab atas pekerjaan yang sama
- h. Tanggung jawab dalam mempertahankan ketertiban
- i. Keadaan ekonomi
- j. Ikatan kepada lembaga
- k. Pertahanan bersama
- l. Bantuan bersama, kerjasama
- m. Pengalaman, tindakan, dan kehidupan bersama.

(Astrid Soesanto, dalam Khairuddin, 1992:12-13).

9. Kontrol sosial

Dalam hidup bermasyarakat terdapat pranata-pranata sosial yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma tersebut umumnya sudah disepakati bersama, walaupun tidak tertulis. Agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan

tertib, maka terdapat sanksi sosial yang diberikan terhadap pelanggaran norma, biasanya berupa pengucilan pergaulan.

Kontrol sosial sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mendisiplinkan para anggota kelompok, dan menghindarkan atau membatasi adanya penyelewengan-penyelewengan dari norma-norma kelompok (Polak,1979) dalam khairuddin (1992:13). Kontrol sosial semakin kuat pada masyarakat yang mempunyai hubungan primer, langsung atau face to face group. Dalam kelompok smacam ini setiasp anggota kelompok mementingkan pendapat anggota kelompok lainnya, sehingga ketergantungan anggota terhadap kelompok sangat besar.

Kontrol sosial pada masyarakat perdesaan masih sangat kuat terkait dengan pranata-pranata yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.Kuatnya kontrol sosial ini menurut Dwight Sanderson disebabkanq oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Stabilitas dan solidaritas yang kuat di kalangan keluarga petani, dan adanya kenyataan bahwa para anggotanya hampir semuanya mempunyai usaha yang sama.
 - b. Besarnya kekuatan kelompok kekerabatan, umumnya petani tidak bergerak jauh dari tempat tinggalnya, dan mereka lebih dipengaruhi oleh ikatan desa mereka.
 - c. Besarnya stabilitas hubungan komunitas diantara mereka, karena memiliki tempat tinggal yang lebih permanen.
 - d. Saling mengenal di antara sesama penduduk desa.
10. Tradisi lokal masyarakat perdesaan masih kuat.
- Hidup di desa banyak berkasitan dengan tradisi, nilai, norama adat yang telah berkembang secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga masyarakat desa cenderung kurang dinamis, kurang rasional, dan kurang kritis.

Dari keseluruhan penjelasan tentang karakteristik masyarakat perdesaan, maka bila dibandingkan dengan masyarakat kota, maka dapat disusun tabel perbedaan kualitatif di antara ke duanya sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Kualitatif Masyarakat Desa dan Kota

No	Unsur-unsur pembeda	Desa	Kota
1	Basis Ekonomi	Pertanian	Industri,perdagangan,jasa
2	Mata pencaharian	Agraris-homogen	Non agraris,heterogen
3	Ruang kerja	Lapangan terbuka	Ruang tertutup
4	Musim/cuaca	Penting,menentukan	Tidak penting
5	Keahlian/keterampilan	Umum,tersebar	Ada spesialisasi
6	Rumah dan tempat kerja	Dekat	Berjauhan
7	Kepadatan penduduk	Tidak padat	Padat
8	Stratifikasi sosial	Sederhana,sedikit	Kompleks dan banyak
9	Interaksi sosial	Frekuensi kecil,personal	Frekuensi besar,impersonal
10	Diferensiasi sosial	Kecil,homogen	Kompleks,heterogen
11	Lemba-lembaga	Terbatas, sederhana	Banyak dan kompleks
12	Kontrol sosial	Adat,tradisi	Hukum,peraturan tertulis
13	Sifat kelompok masyarakat	Gotong royong,akrab,gemeinschaft	Gesellschaft
14	Mobilitas sosial	Rendah	Tinggi
15	Karakter komunitas	Kecil, homogen	Besar dan heterogen
16	Status sosial	Rendah	Tinggi
17	Tradisi ,kepercayaan lokal	Kuat, sering irasional	Lemah, rasional

f. Tipologi Wilayah Perdesaan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat dan sarana prasana pemerintahan. Peraturan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 8, disebutkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: jumlah penduduk, wilayah kerja, sosial budaya masyarakat, memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah desa dalam bentuk peta Desa, sarana prasarana pemerintahan Desa dan pelayanan publik, ketersediaan dana operasional, dan sumber penghasilan tetap. Dari sejumlah persyaratan pembentukan desa, maka dapat diketahui bahwa karakteristik penduduk, masyarakat, kondisi wilayah, potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan sosial budaya merupakan unsur utama.

Tipologi wilayah perdesaan adalah suatu upaya mengelompokkan desa berdasarkan kesamaan ciri-ciri wilayah dan masyarakatnya, tipologi desa juga merupakan teknik, cara mengenal desa sehingga konkrit permasalahannya. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan mendefinisikan Tipologi Desa atau Kelurahan adalah kondisi spesifik keunggulan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi sarana prasarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa dan kelurahan.

Asumsi dasar yang dikembangkan dalam penyusunan tipologi desa adalah bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang bervariasi. Setiap desa memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu tipologi wilayah yang sama. Masing-masing tipologi desa memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda, sehingga dengan mengkaji tipologi desa dapat digunakan sebagai dasar pada intervensi pembangunan yang seharusnya juga tidak diseragamkan untuk semua wilayah perdesaan.

Pengelompokan desa dapat dilakukan dengan perhitungan kuantitatif maupun kualitatif agar semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik dapat teridentifikasi. Indikator fisik dalam bentuk daya dukung alam mencakup lokasi, luas desa, keadaan tanah, keadaan air, keadaan nabati serta hewani. Faktor manusia meliputi: jumlah, kepadatan, persebaran dan karakteristiknya seperti susunan umur, jenis kelamin, adat istiadat dan agama, pendidikan, organisasi dan kelembagaan. Kegiatan ekonomi yang perlu diperhatikan meliputi; kegiatan agraris (primer) seperti pertanian, perikanan, peternakan, pengumpulan hasil hutan; industri/kerajinan (sekunder); perdagangan dan jasa (tersier). Adapun kondisi sarana prasarana meliputi: prasarana perhubungan dan komunikasi, prasarana produksi/ pengairan, prasarana pemasaran, prasarana pendidikan.

Berdasarkan keragaman indikator tersebut dan mempertimbangkan karakteristiknya, maka desa-desa di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam dengan mendasarkan pada kesamaan lingkungan fisik, manusia, kondisi sosial budaya masyarakat, posisi geografis terhadap kota, administratif serta tingkat perkembangan desa.

1. Tipologi Desa Berdasar Aspek Lingkungan Fisik

Pengelompokan desa berdasarkan letak dan posisi geografis, khususnya aspek bentang lahan di permukaan bumi, seperti pegunungan, perbukitan, dataran rendah, pantai atau pesisir. Tipologi lingkungan fisik mempertimbangkan potensi sumberdaya alam yang ada, terdiri atas:

a) Tipologi desa pegunungan

Desa-desa yang termasuk tipologi ini berada pada daerah dengan lereng > 40%, dan ketinggian >500 meter di atas permukaan air laut. Dalam lingkup Daerah Aliran Sungai (DAS), desa-desa ini terletak di daerah hulu dan merupakan daerah konservasi dan daerah tangkapan air hujan (catchment area), ditandai adanya tanaman hutan atau tanaman tahunan lainnya. Desa-desa seperti ini mempunyai curah hujan yang tinggi, serta potensi sumberdaya air yang cukup melimpah, oleh karena itu mempunyai potensi sumberdaya alam khususnya tanaman perkebunan dan hortikultura

potensial. Demikian pula dengan daerah ini cocok untuk pengembangan peternakan, misalnya sapi perah, bahkan sekarang desa-desa yang termasuk tipologi ini sekarang dikembangkan menjadi desa wisata. Potensi lainnya adalah pertambangan pasir atau jenis bahan tambang lainnya. Desa-desa pegunungan selalu berasosiasi dengan letak gunung tertentu, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, sehingga sering berpotensi juga sebagai kawasan rawan bencana erupsi. Kondisi topografi dan aksesibilitas yang ada, menyebabkan desa-desa pegunungan umumnya memiliki pola permukiman terpecah, kepadatan penduduk di daerah seperti ini rendah.

b) Tipologi Desa Perbukitan

Kelompok desa perbukitan berada pada morfologi bukit bergelombang, dengan kemiringan dan ketinggian lebih rendah dari pegunungan, yaitu kurang lebih pada lereng 30% - 40 %, ketinggian antara 75 – 500 meter di atas permukaan laut. Potensi desa perbukitan tergantung pada struktur geologi dan materi dasar pembentuknya.

Contoh: di desa perbukitan dengan material dasar gamping dan karst, umumnya terjadi kelangkaan sumberdaya air dan kekeringan. Sedangkan desa perbukitan yang berbatu dasar material vulkanik dan pasir akan memiliki potensi sumberdaya air tinggi, sehingga memiliki potensi pengembangan lebih besar. Desa-desa perbukitan umumnya dimanfaatkan untuk usaha kayu-kayuan dan tanaman tahunan serta perkebunan. Beberapa potensi bahan galian pertambangan banyak ditemukan di daerah perbukitan. Beberapa desa perbukitan juga merupakan daerah penyangga dan kawasan resapan air, sehingga perlu dikonservasi.

c) Tipologi Desa Dataran

Tipologi desa ini paling luas dan banyak dijadikan tempat tinggal, sehingga kepadatan penduduk tinggi. Desa dataran berada pada wilayah datar, dengan ketinggian rendah, dan kemiringan kurang dari 15%. Biasanya berada di daerah hilir dan selalu berasosiasi dengan keberadaan sungai yang menjadi sumber kehidupan penduduk. Potensi air melimpah,

sehingga daerah dataran banyak digunakan sebagai tempat permukiman, dan kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lain-lainnya. Sebagian nbesar dari luas wilayahnya digunakan sebagai kawasan budidaya. Pada desa-desa di daerah dataran sungai banyak ditemukan sawah baik irigasi maupun tadah hujan, sehingga merupakan penghasil pangan yang penting.

d) Tipologi desa pesisir /pantai.

Tipologi desa pesisir atau pantai adalah kelompok desa yang keberadaannya dipengaruhi oleh ekologi laut. Desa tipe ini secara geografis dapat berbatasan dengan laut, dapat pula tidak berbatasan dengan laut, namun lingkungannya dipengaruhi laut (zona pasang surut dan penyangga laut), kemiringan kurang dari 5% sehingga secara morfologi merupakan dataran. Posisi geografis strategis sebagai pintu masuk ekonomi antara pulau bahkan negara, merngakibatkan banyak permukiman kota juga banyak terdapat pada zona pesisir ini.Potensi ekonomi desa pesisir dipengaruhi baik oleh perkembangan wilayah maupun morfologi dan bentuk pantai. Contoh: desa pesisir yang mengalami perkembangan sebagai kota, maka semua potensi dan peluang ekonomi akan berkembang, sedang untuk desa pesisir yang jauh dari kota potensi ekonomi sangat dipengaruhi oleh adanya sumberdaya alam yang ada. Sebagai wilayah hilir, desa pesisir rawan bencana banjir.

e) Tipologi desa pulau-pulau kecil.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak desa yang terletak di pulau-pulau kecil. Kelompok desa ini berada di pulau-pulau kecil yang umumnya terpencil dan terpisah dari dataran luas oleh lautan yang luas. Kegiatan ekonomi potensial adalah sektor perikanan kelautan dan ada juga yang dikembangkan sebagai daerah wisata.Kendala utama pengembangan desa pulau kecil adalah keterisolasian, serta biaya tambahan sebagai konsekuensi kondisi geografis.

2. Tipologi Desa Berdasar Aspek Geografis Terhadap Pusat Pertumbuhan

Tipologi ini didasarkan pada asumsi bahwa desa-desa yang berada di pusat pertumbuhan atau berdekatan, akan memiliki tingkat perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan desa yang jaraknya berjauhan dengan pusat pertumbuhan. Tipologi desa berdasarkan posisi geografis terhadap pusat pertumbuhan dapat dibedakan atas;

a. Tipologi desa di kota (urban)

Desa atau kelurahan dengan tipe ini berada di wilayah perkotaan yang ditandai oleh jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, permukiman padat dengan adanya gedung perkantoran dan perdagangan besar, serta ketersediaan sarana prasarana yang lengkap. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor non pertanian. Dalam terminologi administrasi pemerintahan, desa-desa tipe ini lebih sering disebut kelurahan. Semua sektor ekonomi dapat berkembang dengan baik kecuali pertanian.

b. Tipologi desa di pinggiran kota

Berdasarkan letaknya, tipe desa-desa seperti ini berada di pinggiran kota, baik dalam pengertian batas administrasi maupun batas fungsional. Desa dengan tipe ini mempunyai aksesibilitas cukup baik dengan kota, dan mempunyai ciri peralihan antara sifat ke kotaan dan ke desaan. Desa ini memiliki ciri, jumlah penduduk yang tinggi sebagai akibat perluasan kota. Luas open space dan lahan pertanian semakin menyusut karena terjadi konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Kegiatan non pertanian berkembang baik, sehingga masyarakatnya merupakan campuran antara masyarakat petani dan non petani. Potensi ekonomi sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi kota. Desa-desa dengan tipologi ini potensial untuk berubah status menjadi kelurahan.

c. Tipologi desa di koridor antar kota

Secara spasial desa-desa tipe ini terletak pada areal sepanjang koridor jalur transportasi darat antar kota besar satu dengan kota besar lainnya. Desa ini dapat secara langsung dilalui oleh jalur transportasi, dapat pula terletak di luarnya tetapi masih terpengaruh oleh keberadaan jalur tersebut. Karakter desa

tipe ini sama dengan desa di pinggiran kota, namun berbeda pemicu perkembangan wilayahnya, yaitu keberadaan akses transportasi jalan yang menjadikan desa memiliki potensi berkembang lebih cepat. Potensi ekonomi yang berkembang tergantung pada potensi lokal dan rencana pengembangan wilayah, seperti kawasan industri, perdagangan, permukiman dan sebagainya. Desa ini merupakan penghubung ekonomi antara desa dengan kota.

d. Tipologi desa di perdesaan

Tipe desa-desa ini secara geografis berada jauh dari kota dan pengaruh kota, namun memiliki hubungan atau aksesibilitas yang baik, sehingga hubungan desa & kota atau rural urban linkages lancar. Desa-desa ini menjadi pendukung (*hinterland*) dari keberadaan kota, khususnya untuk suplai komoditas pertanian serta mobilitas penduduk. Desa-desa ini mempunyai ciri jumlah dan kepadatan penduduk yang rendah, permukiman tidak padat, hubungan sosial yang akrab, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Ketersediaan sarana prasarana masih terbatas.

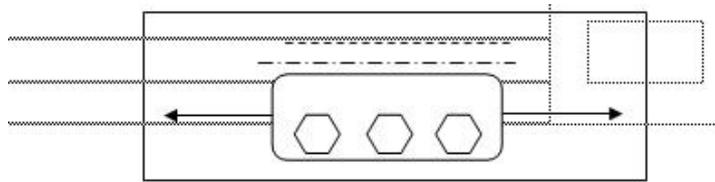
e. Tipologi desa terisolasi dari pusat perkembangan

Secara geografis desa-desa dengan tipe ini jarak dan aksesibilitas terhadap pusat-pusat perkembangan sangat jauh, bahkan terisolir. Faktor-faktor keterisolasian ini yang menjadi penyebab tidak berkembangnya masyarakat desa. Ciri-ciri masyarakatnya antara lain, masih terikat dengan adat istiadat, tinggal di lingkungan alam yang masih asli, biasanya kegiatan utama bercocok tanam, berkebun, beternak. Kebutuhan dapat dicukupi secara mandiri, tidak tergantung wilayah lain, intensitas pembangunan dan ketersediaan sarana prasarana sangat terbatas. Contoh komunitas masyarakat Baduy.

f. Tipologi Desa Berdasar Aspek Spasial

Bintarto (dalam Daldjoeni, 1998:60-67), mengemukakan adanya empat tipe desa berdasarkan distribusi spasial, yaitu:

- 1) Desa menyusur/memanjang sepanjang pantai (cari gambar desa dengan tipe menyusur sepanjang pantai).



Gambar 2.3 Bentuk Desa Menyusur Sepanjang Pantai
 Sumber : Daldjoeni, 1987

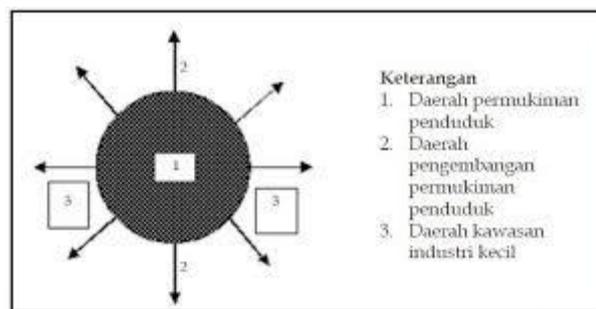
Keterangan :

- a. → arah pengembangan untuk permukiman penduduk
- b. ⬡ daerah kawasan industri kecil desa
- c. ▭ daerah permukiman penduduk

Di daerah pantai yang landai dapat tumbuh permukiman, yang mata pencaharian penduduknya di bidang perikanan laut, perkebunan kelapa, dan perdagangan. Jika desa pantai seperti ini berkembang, maka tempat tinggal meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusur pantai, sampai kemudian ketemu dengan desa pantai lainnya. Pusat-pusat kegiatan industri kecil (perikanan dan pertanian) tetap dipertahankan di dekat tempat tinggal penduduk yang mula-mula.

2) Bentuk desa terpusat

Gambar.



Sumber: Geografi Kota dan Desa, 1987

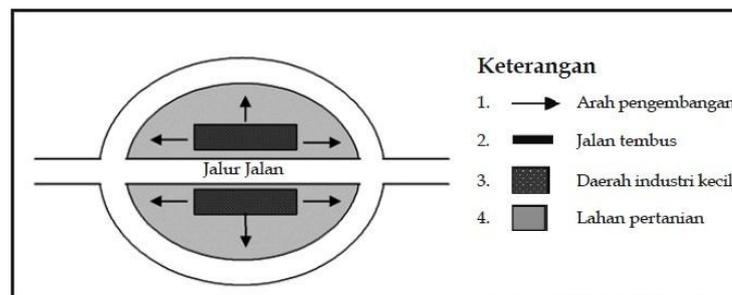
Sumber: <https://www.google.com/search?q=masyarakat+pedesaan+dan+pekerjaan+terpusat&imgc>

Bentuk desa seperti ini terdapat di daerah pegunungan, umumnya terdiri atas mereka yang berasal dari keturunan yang sama. Pemusatan tempat tinggal didorong oleh kegotong royongan mereka. Bila jumlah penduduk semakin berkembang, maka terjadi pemekaran desa pegunungan ke segala

arah, tanpa direncanakan. Semenrata itu pusat-pusat kegiatan penduduk dapat bergeser mengikuti arah pemekaran.

3) Bentuk desa linier di dataran rendah

Gambar.

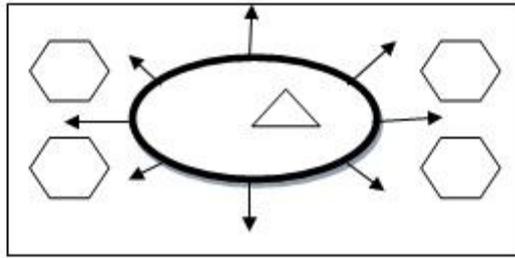


Sumber: *Geografi Kota dan Desa*, 1987

Permukiman penduduk di dataran rendah umumnya memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa, atau di sekitar desa. Jalan atau transportasi menjadi penentu pola keruangan desa. Jika kemudian terjadi pemekaran desa secara alamiah, artinya tidak direncanakan, maka lahan pertanian di luar desa sepanjang jalan raya akan menjadi permukiman baru. Sebagai contoh, bila di desa yang bersangkutan dibangun jalan yang mengelilingi desa, maka pola permukiman desa akan berkembang mengikutinya. Selain jalan, pola linier juga dapat terbentuk mengikuti keberadaan transportasi sungai sehingga membentuk pola linier sepanjang sungai.

4) Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu

Tipe desa seperti ini banyak dijumpai di dataran rendah. Pusat fasilitas dapat berupa sumber mata air, waduk, lapangan terbang, dan lain-lainnya. Arah pemekaran dapat ke segala arah, mengikuti jalur transportasi yang menghubungkan fasilitas tersebut dengan tempat-tempat yang lain. Fasilitas untuk industri kecil dapat disebar di mana-mana sesuai dengan kebutuhan. Gambar:



Gambar 2.4 Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu
 Sumber : Daldjoeni, 1987

Keterangan :

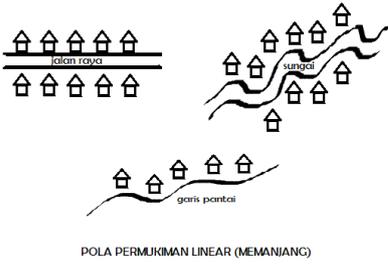
- a. Arah pengembangan permukiman penduduk
- b. Kawasan permukiman masyarakat
- c. Kawasan industri kecil
- d. Fasilitas umum yang telah ada

g. Pola permukiman desa berdasarkan distribusi keruangan

Everett.M.Rogers dan rabel J.Burdge dalam bukunya “ *Social Change in Rural Societies*” (dalam Leibo,1995; Muta’ali,2013:64), mengelompokkan tipologi permukiman desa berdasarkan distribusi keruangan sebagai berikut:

Tabel 3. Tipologi Distribusi Keruangan Desa menurut Everett M.rogers dan Rabel J.Burdge.

Tipologi distribusi keruangan desa	Keterangan
<i>1. The Scattered Farmstead Community</i>	Pola permukiman desa terpecah umumnya mengikuti sawah, ladang atau sumber penghidupan penduduk. Tipologi ini biasanya terdapat pada daerah pegunungan, perbukitan dan daerah terpencil lainnya. Perkembangan desa akan ditentukan oleh aksesibilitas dan interaksi desa dengan desa lain atau kota.
<i>2. The Cluster Village</i>	Tipologi desa menunjukkan pola

	<p>permukiman mengelompok dan dikelilingi sawah atau kebun mereka. Tipe ini banyak ditemukan di daerah dataran dengan pola kehidupan sosial yang homogen, gotong royong yang kuat. Desa-desanya ini mengalami perkembangan yang cepat mengingat adanya konsentrasi penduduk dan efisiensi pelayanan</p>
<p>3. <i>The Line Village</i> Gambar:</p>  <p>POLA PERMUKIMAN LINEAR (MEMANJANG) Fuot Cipta</p>	<p>Tipologi yang membentuk pola spasial memanjang mengikuti komponen utama desa, seperti jalan, sungai, pantai, danau, terutama jalur transportasi baik darat maupun sungai</p>
<p>a. Pola linier mengikuti jalan</p>	<p>Pola yang paling umum terjadi di pedesaan, baik yang sudah atau belum maju. Jalan sebagai sarana interaksi menarik banyak penduduk dan permukiman untuk tinggal di sekitarnya, karena memiliki aksesibilitas yang tinggi. Desa-desanya tipe ini termasuk tipe desa koridor transportasi antar kota</p>
<p>b. Pola Linier mengikuti sungai dan pola linier sepanjang pantai</p>	<p>Sungai tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga sebagai sarana transportasi. Desa terbentuk memanjang di sepanjang</p>

	<p>sungai, contoh: di Sumatera, Kalimantan. Demikian pula desa linier sepanjang pantai, terletak memanjang di sepanjang pantai</p>
--	--

Sumber: <https://www.google.com/search?q=masyarakat+pedesaan+dan+perkotaan>

Bentuk-bentuk spasial desa seperti telah diuraikan di atas, berkaitan erat dengan usaha pengembangan dan penggalan sumber daya desa secara optimal dan kemanfaatannya bagi penataan tata ruang. Informasi tentang bentuk spasial desa dapat digunakan sebagai dasar dalam penataan ruyuang wilayah perdesaan.

4. Tipologi Desa Berdasar Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi desa ditentukan oleh potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peluang ekonomi akibat posisi dan interkasi dengan wilayah lain. Potensi sumberdaya alam terbentuk dari faktor lingkungan fisik, seperti kondisi geologis, iklim, tanah, air dan vegetasi, yang selanjutnya merupakan dasar terbentuknya aktivitas kehidupan manusia dan hewan. Pemanfaatan sumberdaya alam tercermin oleh pemanfaatan lahan dan struktur mata pencaharian masyarakatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, peneglompokkan desa berdasarkan potensi ekonomi mendasarkan pada kondisi fisik, pemefaatan ruang dan dominasi mata pencaharian penduduknya.

Permendagri Nomor 12 Tahun 2007, menyusun tipologi desa berdasarkan potensi ekonomi sebagai berikut:

- a. Tipologi desa persawahan, adalah kelompok desa-desa yang lingkungan fisik wilayah didominasi oleh daerah dataran dengan ketersediaan air cukup dan penggunaan lahan berupa sawah irigasi, dengan potensi ekopnomi pertanian tanaman pangan atau tanaman semusim lainnya, mayoritas penduduk sebagai petani.

Gambar : daerah persawahan padi



- b. Tipologi desa perladangan. Adalah kelompok desa-desa yang berada pada lingkungan fisik sawah berupa daerah dataran sampai perbukitan, namun ketersediaan air relatif terbatas. Pemanfaatan lahan didominasi ladang dan pertanian lahan kering, dan tanaman tahunan. Sebagian besar penduduk bekerja di lahan pertanian, termasuk pertanian ladang berpindah.

Gambar: sawah perladangan



- c. Tipologi desa perkebunan, adalah kelompok desa-desa yang berada pada lingkungan fisik wilayah baik dataran, perbukitan, maupun pegunungan, dengan ketersediaan air bervariasi. Pemanfaatan lahan didominasi oleh tanaman perkebunan dan tanaman tahunan. Sebagian besar penduduk

bekerja di sektor perkebunan, baik yang dilakukan secara pribadi maupun oleh perusahaan besar.

Gambar : perkebunan teh



- d. Tipologi desa peternakan, kelompok desa yang dapat berlokasi dimana saja, yang sesuai untuk kegiatan peternakan, baik peternakan besar maupun unggas, yang dapat dilakukan baik secara pribadi maupun sebagai perusahaan. Mayoritas penduduk hidup dari usaha peternakan.

Gambar: peternakan sapi, peternakan ayam



- e. Tipologi desa nelayan, adalah desa yang secara geografis berada di daerah pesisir/pantai. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, atau petani tambak. pada desa-desa ini banyak dilakukan kegiatan

pembudidayaan ikan di daerah pesisir, baik usaha tambak pribadi maupun oleh perusahaan besar. Potensi desa sangat tergantung pada kondisi laut.

Gambar: kegiatan nelayan dilaut, dan usaha tambak udang,bandeng



- f. Tipologi desa di hutan dan di tepi hutan, kelompok desa-desa ini secara geografis berada di dalam atau di tepi hutan, dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, pekebun, peternak, ataupun pengrajin.

Gambar : desa di hutan , tepi hutan



- g. Tipologi desa pertambangan, kelompok desa-desa yang memiliki potensi ekonomi di sektor pertambangan, yang ditandai oleh adanya deposit tambang, baik berupa bahan galian golongan C, maupun golongan A dan B yang vital dan strategis. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertambangan.

Gambar : daerah pertambangan



- h. Tipologi desa kerajinan dan industri, kelompok desa-desa yang memiliki potensi ekonomi di sektor industri dan kerajinan sebagai hasil pengolahan potensi lokal setempat, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengrajin rumah tangga atau pekerja industri kecil.

Gambar : desa kerajinan Kasongan



- i. Tipologi desa industri sedang dan besar, adalah kelompok desa-desa yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi industri sedang dan besar, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar penduduk bekerja pada industri yang ada di desa tersebut.

Gambar : industri kecil



- j. Tipologi desa pariwisata, adalah desa-desa yang memiliki potensi daya tarik wisata, baik wisata alam maupun budaya, serta fasilitas pendukungnya. Sebagian besar kehidupan sosial ekonomi penduduk tergantung pada kegiatan wisata tersebut. Pada desa wisata sebagian besar penduduk tidak mesti bekerja langsung di bidang pariwisata, namun dapat pula bekerja di bidang lain yang menjadi daya tarik wisata tersebut.

Gambar : desa agro wisata , wisata budaya dll



- k. Tipologi desa jasa dan perdagangan, yaitu kelompok desa-desa yang umumnya berada di wilayah perkotaan yang memiliki kegiatan jasa dan perdagangan beragam. Walaupun sebagian besar penduduk bekerja di bidang perdagangan, tetapi pekerjaan di daerah seperti ini beragam/heterogen.

Dalam realitanya, cukup sulit untuk menemukan desa-desa yang betul-betul homogen baik potensi wilayah maupun mata pencaharian penduduknya. Oleh karena itu yang terpenting untuk menentukan tipologi desa disamping potensi wilayah dan mata pencaharian penduduk, adalah seberapa besar pengaruh suatu kegiatan terhadap dinamika sosial ekonomi budaya yang ada di desa tersebut. Walaupun bila dilihat dari segi kuantitas kecil, tetapi bila pengaruh terhadap desa besar, maka potensi ekonomi itulah yang dijadikan dasar untuk menentukan tipologi desa.

5. Tipologi Desa Berdasarkan Tingkat Perkembangan

Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan merupakan proses pengklasifikasian tipologi desa dengan menggunakan multi kriteria. Indikator multi kriteria digunakan untuk menetapkan tiga tingkatan perkembangan desa, yaitu desa swadaya, swakarsa dan desa swasembada. Indikator-indikator tersebut meliputi antara lain:

- a. Mata pencaharian
- b. Produksi
- c. Adat istiadat
- d. Kelembagaan
- e. Pendidikan
- f. Swadaya dan gotong royong masyarakat desa
- g. Sarana dan prasarana

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam negeri No.11 tahun 1972 tentang pelaksanaan Klasifikasi dan tipologi desa di Indonesia, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Ciri-ciri Tingkat Perkembangan Desa: Swadaya, Swakarda dan Swasembada

No	Tingkat Perkembangan Desa	Ciri Karakteristik
1	Desa Swadaya	Lebih dari 50% penduduk mata pencaharian di sektor primer(berburu,menangkap ikan,bercocok tanam tradisional).

		<p>Produksi desa sangat rendah, dibawah 50 njuta rupiah per tahun.</p> <p>Adat istiadat masih mengikat kuat.</p> <p>Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.</p> <p>Prasarana masih sangat kurang.</p> <p>Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.</p> <p>Swadaya dan gotong royong masyarakat sangat rendah, pembangunan desa menunggu instruksi dari atas.</p>
2	Desa Swakarsa	<p>Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai menerapkan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.</p> <p>Produksi desa pada tingkat sedang, antara 50-100 juta rupiah per tahun.</p> <p>Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, ada 4-6 lembaga yang berfungsi.</p> <p>Pendidikan dan keterampilan masyarakat pada tingkat sedang, 30-60% telah lulus sekolah dasar, dan beberapa lulus sekolah lanjutan.</p> <p>Fasilitas dan prasarana mulai ada, walaupun belum lengkap, minimal ada 4-6 sarana umum yang tersedia.</p> <p>Swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa meningkat walaupun belum sepenuhnya.</p>

3	Desa Swasembada	<p>Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan atau lebih dari 55% penduduk bekerja di sektor tersier.</p> <p>Produksi desa tinggi, di atas 100 juta per tahun.</p> <p>Adat istiadat tidak mengikat lagi, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan.</p> <p>Kelembagaan formal dan informal telah berfungsi dengan baik, 7-9 lembaga berfungsi.</p> <p>Pendidikan dan keterampilan masyarakat tinggi, 60% lulus SD, sekolah lanjutan, dan beberapa lulus PT</p> <p>Prasaran dan sarana mulai lengkap dan baik.</p> <p>Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.</p>
---	-----------------	---

Sumber: Muta'alli, 2013:71-72

6. Tipologi Desa Berdasarkan Sistem Pengaturan Desa

Dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1, disebutkan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat. Desa (non adat), terdiri atas desa otonom sebagaimana desa pada umumnya dan desa administrasi yang berbentuk kelurahan.

Pengelompokkan desa berdasarkan pengaturan desa berlandaskan pada beberapa azas, yaitu:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat deas, tetapi tetap dengan mengindahlkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membengun desa.
- e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membengun desa.
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan besar masyarakat desa.
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilaqn keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa, melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h. Demokrasi,yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin.
- i. Kemandirian, yaitu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya sesuai dengaqn kemampuan sendiri.
- j. Partisipasi, yaitu berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi,terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan prograqm pembangunan desa.

Adapun pengaturan desa dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desas dalam sistem ketata negaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesehakteraan bersama.
- d. Membentuk pemerintahan desa yang profesional,efisien,efektif,terbuka serta bertanggung jawab.
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- g. Memajukan perekonomian masyarakat desas serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- h. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan

Sebenarnya dalam sejarah pengaturan desa, sudah banyak produk hukum yang mengatur tentang desa, misalnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daertah dan terakhir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan tentang desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat deas, yang sampai saat ini berjumlah 73.000 desa, dan serkitar 8.000 kelurahan. Selain itu pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan. Hal-hal itulah yang menimbulkan kesenjangan anra

wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan bangsa.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self goverment, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah deas, ditata sedemikian rupa menjadi desa (non adat) dan desa adat. Desa (n0n adat) dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah pada pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan weilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/kota.

Di Indonesia saat ini terdapat ribuan desa adat, mereka mendapat pengakuan dan penghormatan untuk menjalankan pemerintahan sendiri (*self governing community*) dalam bentuk hak kultural desa, sistem pemilihan kepala desa atau tetua desa, kelembagaan desa dan sebagainya, termasuk mengatur sistem interaksi sosial budaya dan menjagga kearifan lokal di dalam lingkup wilayah adatnya. Sedang desa adat yang masih memiliki nilai-nilai dan organisasi komunitas lokal yang masih kuat, diberikan hak untuk mengelola desanya secara otonom, dengan campur tangan pemerintah yang kecil.

Dengan demikian dari berbagai uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa desa bukan sekedar unit administrasi atau sekedar permukiman penduduk, melainkan juga sebagai basis sumber daya ekonomi (tanah, sawah, sungai, ladang, kebun, hutan, basis komunitas yang memiliki keberagaman nilai-nilai lokal dan ikatan-ikatan sosial, ataupun basis pemerintahan yang mengatur dan mengurus sumber daya dan komunitas tersebut.

Tabel 5. Tipologi Desa Berdasarkan Sistem Pengaturan Desa

Kedudukan dan tipe	Azas	Gambaran
Desa adat	Rekognisi, mengakui bentuk, hak dan	Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat(self

	kewenangan asal usul (otonomi asli)	governing community) Otonomi asli atau otonomi bawaan, desa tidak menjalankan tugas administrasi negara, desa mendapat bantuan dari negara
Desa otonom	Desentralisasi Membentuk desa otonom dan menyerahkan kewenangan kepada desa otonom, seperti halnya daerah otonom	Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (<i>local self goverment</i>) seperti daerah, desa memperoleh ADD dan APBN
Desa administratif	delegasi (tugas pembantuan) membentuk desa sebagai unit administratif	Desa-desa sebagai unit administratif atau kepanjangan tangan Negara (<i>local goverment</i>), contoh kelurahan

Sumber: Lutfi Muta'ali, 2013:73

g. Struktur Keruangan Desa

Pola kenampakan bentang budaya desa yang terdapat di permukaan bumi berbeda satu sama lain, hal ini tergantung pada kondisi bentang alam setempat. Struktur keruangan desa pada dasarnya merupakan pola sebaran permukiman desa menurut letak bentang alamnya. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat tentang struktur keruangan desa, yang umumnya cenderung mengelompok atau menyebar dari permukiman desa. Sebagian besar pola lokasi desa berbentuk konsentris, dengan kantor kepala desa sebagai pusatnya. Di sekitarnya adalah tempat tinggal penduduk, yang lama kelamaan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terbentuklah dusun-dusun baru di sekitar dusun induk, sehingga banyak dijumpai desa yang terdiri dari banyak dusun.

Berikut ini disajikan pola struktur keruangan desa yang dikemukakan oleh para ahli, dalam bentuk tabel:

Tabel 6. Pendapat Para ahli Tentang Struktur keruangan Desa

Nama Ahli	Pola	Karakteristik
A. Bintarto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanjang (linier) 2. Radial (memusat) 3. Tersebar 4. Mengelompok 	<p>Sepanjang: jalan, sungai, antai, sejajar jalan kereta api.</p> <p>Mengelilingi danau, mata air, gunung api, sungai, fasilitas tertentu.</p> <p>Bila desa homogen kesuburannya.</p> <p>Mengelilingi obyek tertentu</p>
B. Daldjoeni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linier 2. Terpusat 3. Radial 	<p>Mengikuti jalan, sungai, pantai.</p> <p>Pegunungan.</p> <p>Mengelilingi obyek alam atau budaya.</p>
C. Paul Landis	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Farm Village Type.</i> 2. <i>The Nebulous Farm Type.</i> 	<p>Tipe desa dengan penduduk tinggal bersama di suatu tempat dengan lahan pertanian di sekitarnya.</p> <p>Tipe desa dengan</p>

	<p>3. <i>The Arranged Isolated Farm Type.</i></p> <p>4. <i>The Pure Isolated Type</i></p>	<p>sebagian penduduknya tinggal bersama di suatu tempat, tetapi karena permukiman padat akibat penambahan penduduk, maka sebagian mencari tempat di luar permukiman utama. Tipe desa yang penduduknya tinggal di sepanjang jalan utama desa yang terpusat pada pusat perdagangan. Lahan pertanian berada di sekitar permukiman. Jarak satu rumah dengan rumah lain tidak terlalu jauh. Tipe desa yang penduduknya tinggal tersebar secara terpisah dengan lahan pertaniannya masing-masing dan berpusat pada suatu</p>
--	---	--

		pusat perdagangan
--	--	-------------------

Sumber: Langgeng dan Lutfi,2014:98

Desa di Jawa dulu hampir memiliki pola pengaturan yang sama, yaitu adanya pusat pemerintahan yang berada di tengah-tengah desa, kemudian tempat permukiman, lumbung desa, pekuburan desa, tempat pemandian umum, pasar, sekolah, masjid dan gardu-gardu. Sering ada pula lapangan yang digunakan untuk tempat penggembalaan ternak. Di bagian luarnya terhampar persawahan, perladangan atau hutan.

Desa yang sudah maju memiliki tata ruang desa yang tertata dengan rapi, dengan deretan rumah dan pepohonan di kanan kiri jalan. Umumnya pekarangan masih tersedia, sehingga jarak antara rumah satu dengan lainnya masih jarang atau belum begitu padat. Adapun di luar Jawa, terdapat desa-desa atau permukiman penduduk di atas air sungai, rumah-rumah dibangun di atas rakit. Hal ini sebagai akibat adanya sungai-sungai besar di luar Jawa. Di perairan Riau, ada penduduk yang bermukim di atas perahu (suku laut), permukiman seperti itu tata ruang desanya relatif kecil dan sulit diatur.

Pola keruangan desa umumnya sederhana, rumah-rumah di desa biasanya dikelilingi pekarangan sehingga masih ada jarak antar rumah. Sawah, ladang, balai desa letaknya berjauhan dengan permukiman penduduk. Desa yang telah berkembang memiliki pola keruangan kompleks. Pada desa yang telah berkembang mungkin terdapat perusahaan pengolah sumber daya alam, sarana pendidikan, tempat ibadah, pasar dan sarana pelayanan kesehatan, bahkan sarana olah raga. Pola keruangan desa yang lebih kompleks ini banyak dipengaruhi banyak oleh faktor spasial, sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pola keruangan dan sistem perhubungan dan pengangkutan desa, antara lain;

1. Letak desa terhadap bentang alam atau bentang budaya tertentu, seperti laut, sungai, pegunungan, dan kota. Desa yang letaknya di dataran, sistem pengangkutan lebih bervariasi sehingga hubungan dengan daerah lain lancar. Hampir semua jenis angkutan dapat dengan mudah mencapai desa ini, dibandingkan dengan sistem di dataran tinggi yang serba terbatas. Demikian

pula desa pantai memiliki potensi untuk membuat sistem perhubungan laut.

2. Topografi, yaitu kondisi relief atau bentuk muka bumi. Perbedaan topografi menyebabkan sistem pengangkutan yang berbeda antara daerah di dataran rendah dan dataran tinggi. Alat angkutan darat lebih banyak daerah dataran rendah, karena pembangunan jaringan lalu lintas darat lebih mudah dari pada untuk membangun di daerah dataran tinggi atau pegunungan.
3. Sumber daya air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air di suatu tempat sangat diperlukan penghuninya. Penduduk membutuhkan air untuk dapat melangsungkan hidupnya. Umumnya permukiman akan banyak tumbuh di tempat-tempat yang tersedia sumber air. Selain itu faktor kesuburan tanah juga merupakan daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di daerah dengan tanah yang subur. Kesuburan tanah akan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dan peternakan. Lahan yang subur banyak dipilih penduduk untuk permukiman.
4. Kondisi sosial dan perkembangan masyarakat juga menentukan sistem pengangkutan dan perhubungan di desa. Usaha dan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap sistem transportasi yang ada. Kemampuan masyarakat dalam mengatasi kondisi fisik alam akan mempermudah masyarakat mewujudkan sarana transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
5. Budaya, kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan kepercayaan yang berlaku di suatu daerah juga mempengaruhi pola permukimannya. Misal pola permukiman desa memanjang di Pulau Lombok.

BAB II

MASYARAKAT KOTA

Pembicaraan tentang kota sebagai obyek studi dari berbagai bidang ilmu selalu menarik perhatian banyak orang dan tidak ada habis-habisnya. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa alasan, antara lain:

1. Kota sebagai ruang mewadahi berbagai macam aktivitas kegiatan non agraris sehingga kegiatan bersifat heterogen.
2. Kota merupakan konsentrasi tempat tinggal penduduk.
3. Kota merupakan pusat berbagai kegiatan dari wilayah di sekitarnya sehingga merupakan pusat pertumbuhan.

Seperti halnya desa, kota juga mempunyai batasan pengertian yang bermacam-macam, sesuai dengan sudut pandang para ahli yang mendefinisikannya. Berikut ini disampaikan beberapa pengertian tentang kota:

1. Bintarto (1983,36), dengan sudut pandang geografi, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.
2. Sjoberg (P.J.M.Nas,1979; Khairuddin,1992:4-5), titik awal dari gejala kota adalah timbulnya berbagai kelompok khusus, seperti golongan literasi (golongan intelegensia kuno seperti sastrawan, pujangga, ahli-ahli keagamaan). Wirth memberi batasan pengertian kota adalah suatu permukiman yang cukup besar, padat, permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Max Weber, kota adalah suatu tempat apabila penghuni tempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.

3. Wirth, kota adalah suatu permukiman yang cukup besar, padat, permanen, dan dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya.
4. Max Weber, suatu tempat disebut kota apabila penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.
5. P.J.Mnas, kota dapat ditinjau dari beberapa segi:
 - a. Morfologi: adanya cara membangun dan bentuk fisik bangunan yang berjejal-jejal
 - b. Jumlah penduduk, sesuai dengan kondisi negara yang bersangkutan, antara satu negara dengan negara lainnya tidak sama, misalnya: Jepang, 30.000 orang atau lebih, Belanda 20.000 orang atau lebih,
 - c. Hukum, orang sering merujuk kota pada abad 19, biasanya mengenal sistem hukum sendiri. Pengertian kota dikaitkan dengan adanya hak-hak hukum tersendiri bagi penghuni kota. Saat ini kriteria ini sudah tidak ditinggalkan.,
 - d. Ekonomi, suatu kota adalah cara hidup yang bukan agraris. Fungsi kota yang khas adalah kegiatan-kegiatan budaya, industri, perdagangan dan niaga serta kegiatan pemerintahan.
 - e. Sosial, bersifat kosmopolitan, hubungan-hubungan sosial impersonal, seperti lalu-lintas, terkotak-kotak, dan lain-lainnya.
6. Menurut Hadi Sabari Yunus (1994) dalam (Suparmini, 2006:44) kota dapat ditinjau secara fisik, fungsional, administrasi pemerintahan, undang-undang, sosial ekonomi, morfologi dan yuridis administratif sebagai berikut:
 - a. Dalam arti fisik kota adalah suatu “*nodal point*” dalam suatu wilayah yang luas, merupakan konsentrasi penduduk yang padat, bangunan yang didominasi oleh struktur permanen, dan kegiatan-kegiatan fungsionalnya.
 - b. Dalam arti fungsional kota adalah titik fokus yang merupakan pemusatan berbagai kegiatan, dan masing-masing mempunyai sifat

kekhususan yang tinggi, dengan kegiatan fungsional melayani kebutuhan kota itu sendiri dan juga daerah-daerah lainnya.

- c. Dalam artian undang-undang dan administrasi pemerintahan, kota merupakan suatu wilayah Negara yang dibatasi oleh batas-batas administrasi tertentu, baik berupa garis yang bersifat abstrak, maupun batas-batas fisik yang berada dalam wewenang suatu tingkat pemerintahan tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga di wilayah tersebut.
- d. Dalam arti sosial ekonomi, kota merupakan kesatuan masyarakat yang heterogen, mempunyai tingkat kebutuhan yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan penduduk wilayah perdesaan.
- e. Dalam arti morfologi, kota adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik penggunaan lahan non agraris, sebagian besar wilayah tertutup oleh bangunan, mempunyai jaringan jalan yang kompleks dalam sistem permukiman kelompok dan relatif besar dari unit-unit permukiman lainnya.
- f. Dalam arti yuridis administrasi, kota adalah suatu wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas administratif tertentu, diatur dengan peraturan tertentu, ditetapkan dengan status kota, pemerintahan tertentu dengan segala hak dan kewajibannya mengatur wilayah.

Dalam pengertian hukum, di Indonesia ada empat macam kota, (1) kota sebagai ibukotnasional/negara, misal kota Jakarta;(2) kota sebagai ibukota propinsi; (3) kota sebagai ibikota kabupaten dan atau kota madya; (4) kota ibukota admisnistratif (kotatif). Dalam pengertian teknis, kota mempunyai jumlah penduduk tertentu, misalnya di Indonesia yang disebut kota adalah suatu tempat dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa atau lebih, sedang di Jepang dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa, Malaysia dengan jumlah penduduk 5.000 jiwa, sedang di Amerika Serikat dengan penduduk 2.500 jiwa.

Umumnya yang dimaksud dengan kota adalah suatu tempat yang kepadatan penduduknya tinggi, rumah-rumahnya berkelompok kompak, mata

pencarian penduduk bukan pertanian, sarana prasarana tersedia lengkap seperti banyaknya bangunan-bangunan besar dan tinggi, perkantoran, jalan yang lebar dan baik, ada pusat pertokoan, tempat hiburan, jaringan listrik, jaringan air minum dan sebagainya.

Smailes, mengemukakan bahwa keadaan alam tertentu memberi pengaruh baik untuk kedudukan atau suasana kota pada permulaan perkembangannya. Namun dalam proses perkembangan selanjutnya posisi ini semakin meluas, sehingga terdapat klasifikasi posisi kota, seperti posisi kota yang disebabkan oleh alur lalu lintas yang bersimpangan, oleh pertemuan laut dengan sungai (muara), oleh morfologi yang dapat berguna sebagai pelindung (misalnya air sungai, danau, atau pantai terjal) dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya dimungkinkan terjadi perubahan posisi ini. Posisi kota menunjukkan macam dan kualitas tempat di mana suatu kota itu berdiri, misalnya pada lembah, kaki gunung, pantai dan sebagainya.

Selain itu keadaan morfologi, misalnya pola alur-alur lalu lintas dapat mempengaruhi situasi (hubungan dengan wilayah yang lebih luas, sehingga suatu tempat dapat berpotensi bagi pemusatan penduduk. Suatu kota dapat menjadi berkembang dan makmur disebabkan oleh baiknya situasi, walaupun terdapat kekurangan dalam hal tertentu.

Dari berbagai batasan pengertian tentang kota tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kota merupakan satu kenampakan permukaan bumi yang merupakan konsentrasi permukiman penduduk dengan beraneka kegiatan. dalam sejarah perkembangan wilayah, kota umumnya merupakan bentuk perkembangan atau perubahan dari desa. Konsentrasi penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di kota semakin mempercepat perkembangannya, sehingga bila dibandingkan dengan desa, maka kota akan tampak padat dan heterogen oleh beraneka macam kegiatan.

Menurut Burkhad Hofmeister (Nurmala Dewi,1997 dalam Muta'alli,2013:100), yang dimaksud dengan kota adalah pemusatan keruangan tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang sebagian besar kehidupannya ada pada sektor sekunder (industri), dan perdagangan. Kota

merupakan bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami (masyarakat), dengan pembagian kerja khusus (spesialis), pertumbuhan penduduknya sebagian besar disebabkan oleh tambahan kaum pendatang, serta mampu melayani kebutuhan barang dan jasa bagi penduduk kota serta wilayah yang letaknya jauh.

Undang-undang tata ruang mengistilahkan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kota merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada kepadatan penduduk nasional, struktur mata pencaharian non agraris, dan sistem penggunaan lahan yang beraneka ragam, ditutupi gedung-gedung yang tinggi yang lokasinya berdekatan.

A. Sejarah Perkembangan Masyarakat Kota

Munculnya kota untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia terjadi di lembah sungai Nil dan Efrat-Tigris. Para sarjana kebudayaan melihat lahirnya permukiman berupa kota sebagai akibat telah cukupnya bahan pangan yang dihasilkan oleh perdesaan. Oleh karena itu ada sebagian penduduk desa yang terbebaskan dari pekerjaan mengolah lahan, mereka itulah yang kelak akan mulai hidup dari kegiatan non agraris. Kemudian terjadi persaingan, sehingga perlu ada yang mengatur, lalu ada raja dan bangsawan yang hidup di istana. Mereka mempunyai tim para ilmuwan dan penesehat yang merupakan kaum ulama. Kota pun kemudian memungkinkan berkembangnya berbagai seni dan keterampilan.

Jones (dalam Daldjoeni, 1999:1) mengemukakan bahwa adanya kota menunjukkan *the height of man's achievements*; kota bertalian erat dengan peradaban (*civilization*), yaitu yang mencerminkan kemenangan manusia atas bumi, karena ia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pengolahan lahan. Di kota berkembang kebudayaan umat manusia, hal ini tampak pada tingginya keterampilan teknis, berkembangnya gagasan manusia, majunya kesenian, munculnya penemuan-penemuan baru dan sebagainya. Dalam perkembangan

selanjutnya kota menyajikan banyak hal, ada yang positif ada yang negatif. Kota berjasa karena menghasilkan berbagai barang-barang yang dibutuhkan penduduk, juga di luar kota. Sebaliknya kota juga membutuhkan hasil-hasil dari perdesaan, sehingga di antara kota - desa terjadi interaksi interdependensi. Dalam sejarah kota, dikenal tiga jenis kota, yaitu: a. Kota sebagai benteng keamanan dan pertahanan; b. Kota sebagai pusat pemujaan; c. Kota sebagai pusat kehidupan berbagai kelompok dengan kekhususan hidupnya sebagai simpul jaringan (Daldjoeni,1999:2).

Contoh :Kota sebagai benteng keamanan : kota Troya (Asia Kecil), Yericho (Palestina). Kota sebagai kota pemujaan: Ur dan Kish (Babilonia). Adapun kota-kota yang muncul kemudian, didirikan sebagai simpul bertemunya beberapa jalan perniagaan, orang-orang berkumpul di situ untuk mengadu keuntungan hidup.

Sejarah perkembangan kota dapat dibedakan menjadi tiga tahap perkembangan, yaitu kota pra modernisasi, modernisasi dan globalisasi.

1. Kota Masa Pra Modernisasi.

Mula-mula kota terbentuk secara sederhana, pada awalnya kota terdapat di daerah-daerah yang dianggap strategis untuk tempat tinggal seperti gua-gua, daerah dekat pantai dan permukiman-permukiman sederhana. Kota pada masa ini masih dipengaruhi oleh pola agraris. Beberapa jalur tepi sungai atau kawasan tertentu yang letaknya strategis menjadi cikal bakal terbentuknya kota. Kombinasi dari beberapa unsur, seperti jumlah penduduk, ragam pekerjaan, ragam kebutuhan, dan fasilitas umum akan mempengaruhi kawasan tersebut sehingga dapat disebut kota atau tidak. Kota Pra Modernisasi menempati suatu pusat daerah pertanian dengan adat istiadat bercorak perdesaan dan serba sederhana. Perkembangan kota pada tahap ini masih dipengaruhi kehidupan masyarakat agraris.

2. Kota Masa Modernisasi

J.W.Schoorl dalam R.G.Soekadijo (1974:1), menjelaskan bahwa modernisasi suatu masyarakat merupakan proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. dalam konteks ini

perubahan yang terjadi di kota modernisasi dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya perubahan di bidang ekonomi, modernisasi dapat berupa tumbuhnya kompleks industri besar yang memproduksi barang-barang konsumsi dan barang sarana produksi secara massal.. berbeda dengan masa sebelumnya yang proses produksi belum dilakukan secara massal, tetapi baru sekedar diadakan untuk sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat yang terbatas.

Kota modern berawal dari adanya sebuah revolusi industri yang terjadi sekitar abad telah ditemukannya berbagai macam teknologi. Masa modernisasi berlangsung cukup panjang, sejak abad ke-16 sampai awal abad ke-20. Pada abad ke-16 sampai akhir abad ke-18, orang diperkenalkan dengan berbagai macam penemuan teknologi. Kemudian terjadi Revolusi Industri, sehingga pertumbuhan industri sangat pesat, sehingga akhirnya muncullah teknologi modern, yang nantinya akan mengantarkan kota ke tahap globalisasi. Industrialisasi menyebabkan lembaga perekonomian semakin beragam, modern, computerized, lahir supermarket, bisnis retail, sistem perbankan, asuransi dan sebagainya. Kota modern dapat terbentuk bila masyarakatnya memiliki surplus positif di segala bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, keterampilan, sosial, politik, budaya dan etika. Dengan demikian perkembangan fisik kota dapat diimbangi dengan kesadaran tinggi pada masyarakat untuk mendukung kondisi masyarakat yang memiliki perilaku peradaban modern.

3. Kota Tahap Globalisasi

Globalisasi berasal dari kata global, yang artinya secara umum atau keseluruhan adalah proses masuknya sebuah negara ke ruang lingkup dunia, sehingga sekat-sekat atau tapal batas antar negara semakin kabur. Globalisasi ditengarai dengan semakin majunya teknologi komunikasi, inilah yang disebut era informasi. Perkawinan antara teknologi transmisi mutakhir dengan komputer melahirkan era baru, yaitu era informasi.

Istilah global sermual dijumpai di bidang ekonomi, apabila terjadi aktivitas ekonomi yang meningkat, terjadi surplus, maka akan mendorong penduduk kota melakukan aktivitas ekonominya ke luar negeri. Inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya kota tahap globalisasi.

Dari segi sosial gejala globalisasi pada tingkat yang berbeda tampak sejak awal abad Masehi, bahkan sebelumnya ketika suatu suku bangsa menjelajah negeri lain dengan berbagai tujuan seperti berdagang, menyebarkan agama, mencari kehidupan baru, atau sekedar berkunjung. Untuk dapat berkelana, mereka memiliki nilai surplus. Hal inilah yang menyebabkan adanya pola pikir global. Contoh : ketika Laksmana Cheng Ho dari dinasti Ming (Tiongkok) pada awal abad ke-15 melakukan ekspedisi dengan puluhan armada kapal, dan melakukan tujuh kali ekspedisi. Latar belakang ekspedisi ini dapat meyakinkan pola pikir mengglobal pada masyarakat kota pada waktu itu. Pada masa dinasti Ming, negeri Tiongkok mengalami kemajuan dan kemakmuran yang luar biasa. Surplus yang terjadi mendorong mereka memperkenalkan segala sesuatu yang mereka miliki kepada dunia luar. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kota global, karena mengingat bahwa suatu kota dikatakan mengglobal apabila masyarakatnya memiliki kebiasaan untuk melakukan relasi dengan kota lain di luar kotanya bahkan manca negara.

Dengan terbentuknya kota global telah ada dua surplus dalam perkembangan sebuah kota, yaitu surplus suatu kawasan sebagai syarat terbentuknya kota, dan surplus kota sebagai syarat terbentuknya kota global. Apabila surplus kota berhenti, kota tidak akan mampu lagi melakukan akses ke kota lain, di negeri yang berbeda, dengan kata lain kota tidak lagi mampu mengglobal.

B. Klasifikasi dan Tipologi Masyarakat Kota

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Dalam pengertian umum klasifikasi merupakan suatu usaha untuk mengelompokkan suatu entitas yang memiliki beberapa ciri yang sama. Sedangkan tipologi, yang berasal dari kata tipo (pengelompokan) dan logos

(ilmu), tipologi dapat diartikan sebagai suatu usaha pengklasifikasian sebuah tipe berdasarkan berdasarkan karakteristik umum yang melekat pada obyek. Jadi klasifikasi tipologi kota merupakan usaha untuk menggolong-golongkan kota-kota berdasarkan ciri karakteristik yang dimilikinya.

Klasifikasi kota dapat didasarkan pada berbagai sudut pandang, dalam kajian ini klasifikasi kota menekankan pada segi fungsi, segi fisik, klasifikasi kota berdasarkan pertumbuhan dan hirarkinya.

1. Klasifikasi Kota Berdasarkan Karakteristik Fungsinya.

Klasifikasi kota berdasarkan fungsi, mempertimbangkan fungsi suatu kota yang dianggap dominan dan menonjol dari kota yang bersangkutan. Dalam perkembangannya suatu kota dapat saja mengalami perubahan fungsi, dari suatu fungsi berubah ke fungsi yang lain. Misalnya kota yang semula lebih dikenal sebagai kota pusat keagamaan atau pusat pemerintahan kemudian berubah menjadi kota perdagangan. Perubahan fungsi itu dimungkinkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi transportasi dan komunikasi, sehingga fasilitas-fasilitas perkotaan yang ada semakin lengkap.

Pada abad ke 21 ini kota-kota yang ada umumnya tidak hanya mempunyai fungsi tunggal, hal ini disebabkan karena manusia mempunyai kegiatan yang kompleks, seperti kegiatan sosial, politik, ekonomi budaya, yang umumnya berpusat di kota-kota tersebut. Berdasarkan latar belakang historis, kultural, fisik, kemasyarakatan, ekonomi yang memberi ciri karakteristik suatu kota, suatu kota pada kenyataannya memang mempunyai potensi penonjolan fungsi yang berbeda-beda. Namun demikian dalam kehidupan modern suatu kota yang mempunyai tipe benar-benar murni dalam arti mempunyai tipe tunggal tidaklah ada. (Hadi Sabari Yunus, 2009:6).

a. Klasifikasi kota berdasarkan fungsi menurut Gist, N.P & Halbert, L.A

- 1) Kota berfungsi sebagai pusat industri. Kegiatan industri mencakup berbagai jenis kegiatan, antara lain industri primer, industri sekunder, industri tersier. Kadang-kadang suatu kota mempunyai fungsi gabungan dari berbagai industri tersebut. Kotakota di negara sedang berkembang umumnya kegiatan yang menonjol adalah industri primer,

seperti industri pertambangan, perikanan, pengolahan kayu. |Sedang di negara maju umumnya industri yang ada lebih banyak merupakan industri sekunder dan tersier. Dengan semakin meluasnya industri, daerah hunian mengalami penciutan, hal inilah yang mengakibatkan merosotnya lingkungan permukiman di kota-kota besar. Contoh: kota Detroit sebagai kota industri mobil, Bombay kota industri tekstil, Johannesberg kota industri intan dan sebagainya.

- 2) Kota sebagai pusat perdagangan. Setiap kota sebenarnya merupakan pusat perdagangan, tetapi tidak semua kota ditandai oleh kegiatan perdagangan. Kota-kota perdagangan besar umumnya merupakan kota pelabuhan, karena media transportasi yang besar adalah darat dan laut, sehingga kota yang mempunyai potensi ke arah pengembangan dua jenis transportasi tersebut mempunyai potensi besar untuk menjadi kota perdagangan. Contoh kota bersar bertaraf internasional: New York, London, Rotterdam, London, Hamburg, Bombay, Hongkong dan lain-lainnya.
- 3) Kota berfungsi sebagai kota politik. Sebelum di Eropa Barat dilanda Revolusi Industri, kota-kota yang ada pada masa itu merupakan kota pusat pemerintahan. Pada saat itu pusat pemerintahan, pusat administrasi dan politik harus merupakan ibukota negara. Dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, kota yang semula merupakan pusat kegiatan politik berubah menjadi kota pusat perdagangan dan industri. Namun demikian peranannya sebagai kota pusat kegiatan politik pemerintahan negara masih sangat jelas. Contoh : kota Jakarta, New Delhi, Bangkok, Canberra dan lain-lainnya. Kota pusat administrasi pemerintahan dapat merupakan ibukota negara, propinsi serta kota kabupaten.
- 4) Kota berfungsi sebagai kota pusat kebudayaan. Kota dengan fungsi sebagai pusat kebudayaan ditandai dengan adanya potensi kultural yang menonjol dibanding fungsi yang lain. Ada kota kebudayaan yang menonjol dengan kehidupan keagamaan, misalnya kota Mekah, kota

Roma. Kota Yerusalem, kota Benares. Disamping itu dapat pula kota tersebut terkenal dengan kegiatan pendidikan, seni dan sebagainya, misalnya kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya.

- 5) Kota berfungsi sebagai kota rekreasi dan kesehatan. Suatu kota akan berfungsi sebagai kota rekreasi ataupun kesehatan, bila kota tersebut mempunyai potensi untuk dapat menarik wisatawan/pendatang untuk menikmati kenikmatan tertentu di kota tersebut, baik kenikmatan fisik maupun untuk maksud penyembuhan. Contoh antara lain: Bandung dengan Ciater nya, Palmbeach dengan pantainya yang indah, kota rekreasi di pegunungan, pantai dan sebagainya.
- 6) Kota dengan fungsi yang tidak menonjol, biasanya merupakan kota-kota kecil atau kota yang masih sangat muda usianya, karena fungsi yang ada belum mampu berkembang, sehingga berbagai fungsi masih mempunyai pengaruh yang sama. Namun demikian dapat pula terjadi kota-kota besarpun dapat terjadi kecenderungan mempunyai berbagai fungsi yang sangat kompleks, sehingga penonjolan fungsi tertentu tampak lemah.

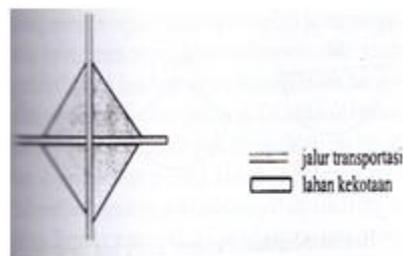
Pada saat ini hampir semua kota besar memiliki lebih dari satu fungsi (fungsi ganda), sehingga semakin banyak fungsi yang ada, permasalahan juga semakin kompleks.

- b. Klasifikasi kota berdasarkan segi fisik. Nelson,R.L, mengemukakan klasifikasi kota berdasarkan segi fisikalnya dengan menekankan pada segi morfologikalnya. Ada tiga klasifikasi kota dilihat dari segi bentuknya, yaitu:
 - 1) Kota yang berbentuk bujur sangkar (*The square cities*). Kota ini biasanya merupakan kota yang terbentuk karena adanya kegiatan yang relatif seragam, umumnya dipengaruhi kegiatan pertanian. Pasar induk terletak di tengah kota, lama kelamaan daerah permukiman akan berkembang di sisi-sisinya ke segala arah karena tidak ada hambatan fisik yang berarti. Bentuk morfologi kota akan berbentuk bujur sangkar.

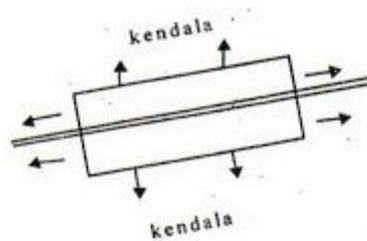
- 2) Kota berbentuk persegi panjang (*The rectangular cities*), hampir sama dengan kota berbentuk bujur sangkar, hanya pada ke dua sisi terdapat hambatan alami yang mengganggu kesempatan zona-zona kota untuk berkembang ke samping. Hambatan-hambatan itu dapat berupa topografi yang kasar, hutan, rawa-rawa, laut dan lain-lainnya.
- 3) Kota berbentuk seperti kipas. Biasanya pusat kota terletak di daerah pinggiran. Umumnya kota bentuk kipas merupakan kota-kota pelabuhan yang mempunyai latar belakang topografi datar, dan tidak memiliki hambatan fisik lainnya.

Untuk jelasnya dapat diamati pada gambar-gambar berikut ini.

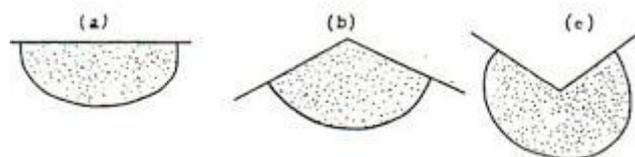
- 1) Kota berbentuk bujur sangkar



- 2) Kota berbentuk empat persegi panjang



- 3) Kota bentuk kipas



c. Klasifikasi Kota Berdasarkan Pertumbuhannya

- 1) Klasifikasi kota berdasarkan pertumbuhannya oleh Taylor, Griffith.

Berdasarkan karakteristik dinamika fungsionalnya, pertumbuhan kota dapat dikelompokkan menjadi empat tahap pertumbuhan, yaitu:

- (a) Tahap Infantil (*the infantil stage*). Pada tahap ini belum tampak adanya pemilahan yang jelas mengenai daerah permukiman dengan daerah perdagangan. Juga belum ada pemilahan yang jelas antara kampung-kampung miskin dengan kampung-kampung kaya. Bangunan-bangunan masih berserakan tidak teratur, jalan-jalan utama baru ada satu dua.
 - (b) Tahap Juvenil. Pada tahap ini mulai tampak adanya proses pengelompokan pertokoan pada bagian-bagian kota tertentu. Rumah-rumah yang baik besar, mulai bermunculan di bagian pinggiran, sementara itu pabrik-pabrik bermunculan di sana sini.
 - (c) Tahap dewasa. Pada tahap ini mulai kelihatan gejala-gejala segregasi fungsi (pemisahan fungsi-fungsi dan kemudian mengelompok). Kelas permukiman rendah jelas perbedaannya dengan permukiman yang lebih baik. Ditinjau dari lokasinya, pola permukiman dan struktur permukimannya, kelas permukiman jelek/rendah jauh berbeda dengan kelas permukiman baik/elite. Daerah-daerah industri banyak terdapat di lokasi – lokasi yang dekat dengan jalur perhubungan dan angkutan.
 - (d) Tahap tua (*the senile stage*). Pada tahap ini kota ditandai oleh adanya pertumbuhan yang terhenti, kesejahteraan ekonomi penduduk cenderung mengalami gejala penurunan.
- 2) Klasifikasi Lewis Mumford, mendasarkan klasifikasi kota dari segi tekniko-kultural. Berdasarkan pertimbangan ini klasifikasi kota dapat dibedakan atas empat klasifikasi, yaitu:
- (a) Fase eoteknikal, pada fase ini permukiman ditandai oleh penggunaan angin, air sebagai sumber tenaga, kayu sebagai bahan bakar.
 - (b) Fase Paleoteknikal, pada fase ini terlihat adanya kemajuan dalam penggunaan sumber-sumber energi. Sumber tenaga angin, air

bahan bakar kayu masih digunakan, tetapi di dominasi oleh penggunaan batubara. Sementara itu tambang besi dan batu baramendominasi perekonomian yang ada. Dengan demikian timbul usaha-usaha peleburan besi, dibangunnya kanal-kanalk, dan mulai digunakannya mesin uap.

- (c) Fase neoteknik, kota-kota mulai menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi. Penggunaan jenis metal ringan seperti aluminium semakin meluas, alat-alat komunikasi seperti radio dan telepon dan permesinan semakin disempurnakan. Menurut Mumford, pada tahap ini kota-kota telah tumbuh menjadi kota besar (metropolis), bangunan-bangunan bertingkat mulai berkembang, lalu lintas semakin padat, berbagai pengaruh negatif kehidupan perkotaan seperti kejahatan, kenakalan remaja, pencemaran, mulai mengakibatkan guncangan-guncangan sosial yang memerlukan penanganan yang serius.
- (d) Fase Bioteknik, pada fase ini peradaban manusia dan semua pertimbangan tindakan manusia selalu ditinjau dari matra biologis dalam konteks yang luas, dibandingkan dengan pertimbangan fisikal semata.

Pengetahuan manusia tentang bakteriologi diterapkan untuk pengobatan dan sanitasi. Demikian pula pengetahuan tentang fisiologi diterapkjan untuk tujuan analisis berdasarkan gizi dan pengaturan makanan, sehingga nutrisi dan diet diperhatikan. Adapun pengetahuan psikologi, ekologi diterapkan pula untuk analisis berbagai bidang kehidupan manusia, sehingga terjadi hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lain, hubungan harmonis antara masusia dengan lingkungan, bahkan hubungan kewilayahan (misalnya hubungan masyarakat desa – kota, manajemen kota dan sebagainya).

Lewis Mumford di samping mengemukakan pertumbuhan kota berdasarkan teknikalnya, juga meninjau pertumbuhan kota berdasarkan

kondisi sosio kulturalnya. Dalam hal ini dikenal adanya enam fase pertumbuhan kota sebagai berikut:

- (a) Fase eopolis, pada tahap ini dicerminkan oleh adanya komunitas desa yang semakin maju, walaupun kondisi kehidupan masih didasarkan pada kegiatan pertanian, pertambangan dan perikanan. Pada tahap ini suatu wilayah berkembang menjadi kota baru.
- (b) Fase polis, ditandai munculnya pasar yang cukup besar, beberapa kegiatan industri yang cukup besar mulai bermunculan, namun pengaruhnya masih terbatas. Kenampakkan ke kotaan jelas terlihat walaupun masih dalam skala kecil, kota masih memiliki sifat agraris.
- (c) Fase metropolis, kenampakkan ke kotaan bertambah besar. Fungsi-fungsi perkotaannya terlihat mendominasi kota-kota kecil yang berada di sekitarnya dan daerah perdesaaan, spesialisasi fungsi mulai nampak. Pada tahap ini kota semakin berkembang, perekonomiannya mengarah ke industri.
- (d) Fase megalopolis, ditandai oleh adanya tingkah laku manusia yang hanya berorientasi pada materi. Standardisasi produksi lebih diutamakan daripada usaha-usaha kerajinan tangan, ukuran lebih diutamakan daripada bentuk. Wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya, membentuk jalur perkotaan yang sangat besar.
- (e) Fase tyranopolis, pada tahap ini ukuran budaya adalah pada apa-apa yang tampak. Masalah materi, ketidak acuhan di segala aspek kehidupan mewarnai tingkah laku penduduknya. Sementara itu kondisi perdagangan yang ada mulai menunjukkan gejala-gejala penurunan. Dengan kata lain kota pada tahap ini kehidupannya sudah dipenuhi dengan kerawanan sosial, seperti kemacetan lalu lintas dan tingkat kriminalitas yang tinggi.
- (f) Fase nekropolis, tahap ini disebut juga suatu keadaan kota menuju kematian. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya peperangan, kelaparan, wabah penyakit hebat yang melanda kota tersebut. Keadaan

ini mengakibatkan timbulnya kemunduran pelayanan kota beserta fungsi-fungsinya, akibatnya kota-kota seperti ini menunjukkan gejala kehancuran, kota berkembang menuju keruntuhan.

Satu hal yang disepakati oleh para ahli sosiologi kota, bahwa perkembangan kota-kota besar, terutama di negara-negara Eropa, dimulai sejak terjadinya revolusi industri di Inggris sekitar abad 18 dan 19. Proses ini diikuti penambahan penduduk yang cepat.

d. Klasifikasi kota Berdasarkan Hirarkinya

1) Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk menurut Northam

Tabel 8. Klasifikasi hirarki kota berdasar jumlah Penduduk

Order atau nomor kelas	Notasi kelas	Perkiraan jumlah penduduk
I	<i>Hamlet</i>	16 - < 150
II	<i>Village</i>	150 - < 1000
III	<i>Town</i>	1000 - < 2.500
IV	<i>Small city</i>	2.500 - < 25.000
V	<i>Medium size city</i>	25.000 - < 100.000
VI	<i>Large city</i>	100.000 - < 800.000
VII	<i>Metropolis</i>	800.000 - < indefinite
VIII	<i>Megalopolis</i>	<i>Indefinite-but at least several millions</i>
IX	<i>Eumenopolis</i>	<i>Indefinite – but likely tens of millions</i>

Sumber : Northam ,Urban Geography (1976: 18)

2) Sistem penggolongan kota berdasarkan gejala pemusatan penduduk juga dibuat oleh C,Doxiadis dan N.R Saxena. Jumlah batas minimal penduduk kota, untuk setiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Jumlah Batas Minimal Penduduk Kota

No	Besaran Kota	Jumlah
----	--------------	--------

		Penduduk/orang
1	<i>Dwelling group</i>	40
2	<i>Small neighborhood</i>	250
3	<i>Neighborhood</i>	1500
4	<i>Small Town</i>	9000
5	<i>Town</i>	50.000
6	<i>Large city</i>	300.000
7	<i>Metropolis</i>	2.000.000
8	<i>Courbation</i>	14.000.000
9	<i>Megalopolis</i>	100.000.000
10	<i>Urban region</i>	700.000.000
11	<i>Urban continent</i>	3.000.000.000
12	<i>Ecumenepolis</i>	5.000.000.000

Sumber : Langgeng dan Lutfi,2014:104

Di Indonesia dibuat penggolongan kota berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:

- a) Kota kecil, jumlah penduduk 20.000 – 50.000 orang
- b) Kota sedang, jumlah penduduk 50.000 – 100.000 orang
- c) Kota besar, jumlah penduduk 100.000 – 1.000.000 orang
- d) Kota metropolis, jumlah penduduk di atas 1.000.000 orang .

Oleh karena masing-masing negara mempunyai latar belakan kondisi sosial ekonomi budaya yang tidak sama, maka penggolongan kota berdasarkan jumlah penduduknya tidak sama.

C. Karakteristik Perkembangan Kota Tahap Pra Modernisasi, Modernisasi dan Globalisasi.

Karakteristik kota pada setiap tahap perkembangan, dapat diklasifikasikan dari aspek fisik dan non fisik dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Karakteristik kota Tahap Pra Moderrnisasi, Modernisasi dan Globalisasi

No	Aspek	Pra Modernisasi	Modernisasi	Globalisasi
----	-------	-----------------	-------------	-------------

1	Wilayah	Lahan kosong masih sangat luas	Lahan sudah mulai menyempit karena adanya bangunan-bangunan baru yang berupa permukiman, fasilitas umum dan khusus	Lahan semakin sempit, fasilitas umum dan khusus semakin banyak dan modern, banyak didirikan bangunan seperti mall, hotel dll
2	Tata Letak	Wilayah kota terdapat di jalur tepi sungai atau memanjang sepanjang aliran sungai	Perumahan atau permukiman sudah mulai teratur dan sudah mulai ada kompleks-kompleks industri	Sudah ada pembagian kerja secara spesifik di dalam wilayah kota untuk menunjang produktivitas dalam sektor ekonomi.
3	Mata pencaharian	Pertanian modern	Sektor industri dan perdagangan	Berkembang pekerjaan di sektor jasa dan bidang lain yang mengutamakan skill, misalnya kemampuan bahasa yang tinggi dan pengetahuan yang luas
4	Budaya	Masih terikat pada adat istiadat bercocok tanam	Kebudayaan dijadikan aktivitas ekonomi	Budaya Barat masuk dan berkembang
5	Pola pikir	Tradisional menuju modern	Modern menuju perubahan dan kemajuan	Sudah berpikir secara terbuka sehingga dapat berpikir secara kritis
6	Pemanfaatan	Sudah memanfaatkan	Mulai mengembangkan	Masyarakat tergantung

	teknologi	teknologi	dan melaksanakan inovasi teknologi	pada teknologi pada segala aspek kehidupan
--	-----------	-----------	------------------------------------	--

Pembentukan Kota: Kota Terbentuk Karena Tuntutan Efisiensi

Menurut Smailes dalam (Johara.T.Jayadinata,1999:123), kota berkembang pada empat ribu tahun sebelum Masehi di Afrika Barat daya yaitu di Mesir, Irak, Mesopotamia, dan Pakistan (misalnya kota Aphroditopolis dan Hierakonpolis di lembah sungai Nil, dan Mohenjodaro di lembah Indus, serta kota Susa dan kota Uhr di lembah Euphrat). Short mengidentifikasi kota-kota lama di berbagai benua sebagai berikut:

Tabel 7. Kota-kota lama di berbagai benua

Wilayah	Waktu	Nama kota
Mesopotamia	4000-3500 s.M	Lagash, Uhr, Uruk
Mesir	3000 s.M	Memphis, Thebes
Indus	3000-2250 s.M	Mohenjodaro, Harappa
Cina	2000 s.M	Cheng-Chon, An yang
Andes tengah	500 s.M	Cuzco, Tihuanaco
Mesoamerika	1000	Teotihuacan, Tenochtitlan
Nigeria Barat Daya	1000	Sagamu, Owo

Sumber: Short, Y.R., An Introduction, 1984

Permulaan dari revolusi perkotaan terjadi di kawasan pertanian yang mempunyai irigasi alam, yaitu di lembah sungai Nil, di wilayah delta di teluk persia, dan di dataran sungai Indus. Di wilayah-wilayah tersebut, yang penduduknya melakukan kegiatan pertanian, karena sering terjadi banjir dan karena berkembangnya alat pertanian tradisional bajak, mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi bahan pangan terutama padi-padian. Pertanian dapat menyediakan bahan makanan tidak hanya bagi para petani, tetapi juga penduduk yang bukan petani dalam jumlah besar. Pada zaman dulu penduduk bukan petani, tinggal berkelompok, mereka melakukanqn macam-macam kegiatan industri dan jasa secara terorganisir, mulailah terbentuk kota.

Penduduk di kota purba, seperti Mesopotamia, masih sangat jarang. Setelah berkembang kurang lebih 2000 tahun, jumlahnya hanya sekitar 10.000-15.000 jiwa. Demikian pula dengan kota pra industri seperti London dan Paris, pada pertengahan abad ke 15, penduduk ke dua kota ini hanya berjumlah 80.000-90.000 jiwa, kemudian masing-masing bertambah hingga mencapai 1000.000 jiwa pada awal abad ke 19.

Sebenarnya mengalirnya penduduk masuk kota sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu ketika kota-kota awal lahir. Sjoberg (dalam Daldjoeni, 1999:3) membedakan adanya tiga tingkatan organisasi masyarakat manusia sebagai berikut: Pertama, Pre-urban folk society, yaitu masyarakat sebelum ada kota. Kedua, Pre industrial feudal society atau masyarakat feodal sebelum zaman industri. Ketiga, modern industrial feudal society, yaitu masyarakat feodal dengan industri modern.

Pengertian dan fungsi kota sebagai permukiman sesuai pandangan tersebut, baru muncul pada tahap pre industrial society, karena pada saat itu di dalam kota terjadi kelebihan bahan pangan sebagai akibat dari penggunaan teknik-teknik produksi yang lebih baik di perdesaan. Selanjutnya faktor lain yang berpengaruh terhadap terbentuknya permukiman di lokasi-lokasi tertentu, didasarkan atas tiga pertimbangan, yaitu: adanya jaminan keamanan, tersedianya sumber-sumber potensial, dan tersedianya air sebagai sumber daya mutlak yang diperlukan untuk kehidupan manusia.

Manusia harus dapat terjamin keamanannya, baik dari serbuan binatang buas maupun dari berbagai bencana alam seperti tanah longsor, banjir, ledakan gunung api dan lain-lainnya. Termasuk faktor keamanan adalah gangguan atau serbuan musuh dan pemilihan lokasi yang strategis untuk perdagangan. Ketersediaan sumber daya potensial juga sangat diperlukan agar kota dapat eksis dan lestari sebagai permukiman baru. Sedangkan ketersediaan air, karena air merupakan kebutuhan mutlak untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk pemenuhan kebutuhan pertanian di luar kota yang bersangkutan. Dengan demikian jelaslah,, mengapa kota-kota pertama yang semula berada di pinggiran pegunungan atau perbukitan kemudian bergeser ke lokasi dekat sungai.

Bersama dengan perkembangan kota perdagangan lalu lokasi dapat bergeser lagi ke arah bawah sunagi hingga pesisir.

Rahardjo Adisasmita (2010:4-8) mengemukakan bahwa jika ditelusuri terbentuknya kota-kota pada abad pertengahan, yaitu mula-mula suatu lokasi merupakan tempat persinggahan dari perjalanan yang jauh, untuk pertimbangan keamanan para pesinggah dalam jumlah banyak. Peluang tersebut dimanfaatkan untuk tukar menukar barang dagangan. Selanjutnya persinggahan berubah menjadi pasar yang berkembang makin ramai sebagai embrio terbentuknya kota-kota kecil, beberapa di antaranya berkembang menjadi kota menengah dan kota besar. Berkembangnya menjadi kota menengah dan kota besar karena memiliki peluang terjadinya efisiensi dalam kegiatan ekonomi meliputi kegiatan-kegiatan pemasaran, transportasi, kerajinan rakyat (industri rumah tangga/kecil), dan selanjutnya berkembang lebih efisien lagi dan fungsinya bertambah luas yaitu sebagai pusat perdagangan, transportasi, multi industri pengolahan (manufaktur), pelayanan pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan perbankan, jasa konstruksi, di samping fungsinya sebagai pusat pelayanan pemerintahan umum dan pembangunan untuk melayani kebutuhan penduduknya. Pemerintah kota membangun prasarana dan sarana perkotaan, serta fasilitas ekonomi dan sosial. Jadi menurut Rahardjo, terbentuknya kota lebih karena diakibatkan adanya tuntutan efisiensi.

Jika berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi perkotaan didukung efisiensi (*private services*) maka penyelenggaraan pelayanan umum perkotaan (*public services*) harus diusahakan seefisien mungkin. Kota yang efisien memberikan dampak kesejahteraan bagi penduduk perkotaan. kegiatan ekonomi perkotaan dan pelayanan umum perkotaan yang efisien akan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perkotaan secara lebih intensif lagi dan berkelanjutan.

Jumlah penduduk terus bertambah, kebutuhan hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa cenderung meningkat, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Hal itu terjadi seiring dengan

perkembangan peradaban manusia dan kemajuan yang terjadi di berbagai bidang baik sosial, ekonomi, dan teknologi.

Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah tersebut, maka manusia senantiasa meningkatkan kegiatan usahanya. Peningkatan berbagai bentuk kegiatan usaha memerlukan penembahan kapasitas produksi untuk menghasilkan output (keluaran) yang lebih besar dan semakin besar dalam bentuk barang dan jasa. Peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi masyarakat dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi (economic growth). Secara konvensional, pertumbuhan ekonomi diukur dengan kenaikan pertambahan output atau pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita dapat mencerminkan terjadinya perbaikan taraf hidup.

D. Tinjauan Geografis, Sosial, Budaya Masyarakat Kota

Pengertian kota menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 4/1980 tentang kota, kota adalah suatu wilayah yang mempunyai batas administrasi wilayah, kota adalah lingkungan kehidupan yang mempunyai ciri non agraris. Masyarakat kota adalah masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia-manusia yang bermacam-macam lapisan tingkatan hidup, pendidikan, kebudayaan dan lain-lainnya.

Perkembangan kota merupakan manifestasi dari pola-pola kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik. Kesemuanya itu akan tercermin pada komponen-komponen yang membentuk struktur kota. secara umum dikenal bahwa suatu lingkungan perkotaan setidaknya mengandung empat unsur, meliputi:

1. Wisma, unsur ini merupakan bagian ruang kota yang dipergunakan untuk tempat berlindung terhadap alam sekelilingnya, serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam keluarga. Adanya unsur wisma ini diharapkan dapat mengembangkan daerah perumahan penduduk yang sesuai dengan pertambahan kebutuhan penduduk di masa mendatang. Disamping itu juga diharapkan dapat memperbaiki keadaan lingkungan perumahan yang telah ada agar dapat tercapai standar mutu kehidupan

yang layak, dan memberikan nilai-nilai lingkungan yang aman dan menyenangkan.

2. Karya. Unsur ini merupakan syarat utama bagi eksistensi suatu kota, karena unsur ini merupakan jaminan bagi kehidupan bermasyarakat.
3. Marga. Unsur ini merupakan ruang perkotaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya di dalam kota, serta menghubungkan antara kota satu dengan kota lainnya.
4. Suka. Unsur ini merupakan bagian ruang kota untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas hiburan, rekreasi, pertamanan, kebudayaan dan kesenian.

Seperti halnya desa, kota juga mempunyai ciri karakteristik yang dapat diamati melalui sistem dan jaringan kehidupan sosial masyarakatnya. Sebagai entitas wilayah, kota juga memiliki ciri fisik dan sosial budaya. Demikian pula karakteristik kota juga dapat berdasarkan berbagai tinjauan, misalnya tinjauan geografis, sosiologis dan antropologis dan lain-lainnya.

1. Tinjauan geografis karakteristik kota

Pada bagian terdahulu sudah disebutkan, bahwa kota adalah suatu lokasi yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada populasi lokasi tersebut, yang menjadi pusat administrasi, perekonomian, dan kebudayaan serta tidak hanya terpusat pada satu sektor kegiatan. Permukimannya dicirikan dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada kepadatan penduduk nasional, dengan struktur mata pencaharian non agraris, sistem penggunaan lahan yang beraneka ragam, serta terdapatnya gedung-gedung tinggi yang lokasinya berdekatan. Secara fisik, kota menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, pusat bisnis, rekreasi, dan olah raga. Bintarto (1983:43-46) membedakan ciri kota dibedakan menjadi ciri fisik dan ciri sosial masyarakatnya.

- a. Ciri-ciri fisik kota

- 1) Adanya sarana perekonomian seperti tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan, supermarket, mall. Pasar selalu menjadi fokus dari suatu kota, pada waktu dulu pasar merupakan daerah yang terbuka, para petani dan

pengerajin membawa barang dagangannya, melaksanakan perdagangan secara barter. Kemajuan di bidang transportasi dan digunakannya sistem uang, maka barter berubah menjadi sistem jual beli. Perkembangan selanjutnya di bidang industri telah membawa perubahan besar untuk berkembangnya pasar. Sifat pasar berubah dari daerah terbuka menjadi gedung-gedung pusat perdagangan yang sedikit banyak tertutup, yang memeperjual belikan hasil bumi dan hasil industri.

Kota-kota menjadi pusat perdagangan, penduduk semakin bertambah. Di dalam cara pembelian secara besar-besaran, transaksi dilakukan melalui bank, transaksi pengiriman barang melalui perusahaan-perusahaan pengangkutan. Tempat-tempat penyimpanan barang dagangan harus disimpan di gudang-gudang atau di toko-toko besar. Dengan demikian terjadilah pusat-pusat pertokoan, yang kemudian dikenal dengan istilah shopping centers. Menurut Arthur B.Gallion dan Simon Eisner (1963), shopping centers dari segi pelayanan dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) *Neighborhood centers*, melayani penduduk kota antara 7.500 – 20.000 orang.
- b) *Community centers*, melayani penduduk kota antara 20.000- 100.000 orang.
- c) *Regional centers*, melayani penduduk antara 100.000 – 250.000 orang.

Daerah inti kota yang merupakan akumulasi gedung-gedung, pertokoan, bank, pasar dan lain-lainnya, dikenal dengan nama PDK (Pusat Daerah Kegiatan). daerah ini merupakan jantung kota, pada siang hari ramai sekali dan padat, terlebih pada jam-jam kerja. Namun pada malam hari daerah ini menjadi sunyi, kecuali bagi mereka yang menikmati hiburan malam.

- 2) Tempat-tempat parkir. Daerah-daerah pusat kegiatan di kota dapat hidup karena adanya jalur jalan dan alat transportasi sebagai wadah arus penyalur barang dan manusia. Oleh karena itu diperlukan tempat-tempat parkir untuk stasiun pemberhentian. Masalah ketersediaan jalur jalan dan

tempat parkir kendaraan yang memadai saat ini merupakan masalah yang dihadapi kota, terutama kota-kota besar.

- 3) Tempat-tempat rekreasi dan olah raga. Ruang untuk rekreasi dan olah raga merupakan tempat penting bagi penduduk kota.
- 4) Adanya alun-alun., semua kota memiliki ruang luas terbuka yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat umum yang disebut alun-alun.
- 5) Gedung-gedung pemerintahan.

Adapun ciri-ciri sosial masyarakat kota dijelaskan Bintarto sebagai berikut:

- 1) Masyarakatnya heterogen. Perbedaan pendidikan dan status sosial dapat menimbulkan keadaan yang heterogen, yang selanjutnya dapat memicu adanya persaingan, terlebih lagi bila penduduk kota semakin bertambah, dan dengan adanya sekolah yang beraneka ragam timbullah spesialisasi di bidang keterampilan ataupun di bidang jenis mata pencaharian.
- 2) Individualisme dan materialistis. Perbedaan status sosial ekonomi maupun kultural dapat menumbuhkan sifat “individualisme”. Sifat gotong royong murni sudah jarang, hubungan kekerabatan mulai pudar (*gessellschaft*) terjadi pada masyarakat di perkotaan. Pergaulan langsung (*face to Face*) dan dalam waktu lama sudah jarang terjadi, karena komunikasi lebih banyak dilakukan secara tidak langsung melalui telepon, HP bahkan melalui dunia maya. Cukup tingginya tingkat pendidikan dan konsisi ekonomi wargakota, mendorong warga kota menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi secara mandiri.
- 3) Toleransi sosial cenderung lebih rendah bila dibandingkan toleransi sosial masyarakat desa, hal ini terjadi karena warga kota sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Namun demikian hal ini dapat diatasi dengan adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kota.
- 4) Jarak sosial. Kepadatan penduduk perkotaan termasuk tinggi, jadi secara fisik warga kota saling berdekatan, namun dari segi sosial berjauhan, karena adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan.

5) Penilaian sosial. Perbedaan status, perbedaan kepentingan, dan situasi kondisi kehidupan kota berpengaruh terhadap sistem nilai pada warga kota.

2. Tinjauan Sosial Budaya Masyarakat Kota

Masyarakat perkotaan identik dengan sifat heterogen, individualistik, materialistik, modern dikelilingi gedung-gedung yang tinggi, banyaknya tempat hiburan, permukiman padat dan sebagainya. Masyarakat perkotaan mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, namun demikian di perkotaan juga banyak terdapat kelompok pekerja-pekerja informal, adanya perkampungan kumuh, adanya kelompok masyarakat yang masih hidup dibawah standar kehidupan sosial.

Ciri-ciri sosial budaya masyarakat perkotaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan. Sifat pekerjaan di kota tidak tergantung pada alam misalnya tanah seperti halnya masyarakat pedesaan. Di kota orang lebih banyak bekerja pada sektor sekunder dan jasa, bekerja di ruang tertutup yang tidak tergantung pada faktor alam. Gejala alam dapat dipahami secara ilmiah dan secara rasional dapat dikendalikan. Masyarakat perkotaan lebih mengandalkan pada kemampuannya untuk dapat bersaing di dunia usaha.
- b. Ukuran komunitas. Salah satu ciri masyarakat kota yang menonjol adalah adanya jumlah penduduk yang besar. Berbeda dengan kondisi di pedesaan yang masih membutuhkan lahan yang luas untuk pekerjaan mereka, di kota untuk dapat bekerja orang tidak membutuhkan lahan yang luas seperti halnya tuntutan pekerjaan pertanian. Kondisi daerah perkotaan selalu ditandai dengan padatnya bangunan-bangunan, baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat bekerja. Mengenai kriteria jumlah penduduk kota tidak ada keseragaman untuk semua negara sebagai ukurannya. Dalam Langgeng Wahyu Santoso dan Lutfi Muta'alli (2014:103) disebutkan penggolongan kota berdasarkan jumlah penduduk adalah sebagai berikut:
 - 1) Kota kecil, jumlah penduduk 20.000 – 100.000 orang.
 - 2) Kota sedang, jumlah penduduk 100.000 – 500.000 orang.
 - 3) Kota besar, jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 orang.

- 4) Kota metropolis, jumlah penduduk 1.000.000 – 5.000.000 orang.
 - 5) Kota megapolitan, jumlah penduduk di atas 5 juta orang.
- c. Kepadatan penduduk. Akibat dari jumlah penduduk yang besar, maka kepadatan penduduk kota tinggi.
 - d. Lingkungan. Lingkungan masyarakat kota merupakan lingkungan buatan manusia (artificial). Lynn Smith mengemukakan bahwa orang-orang kota membuat lingkungan mereka sedemikian rupa sehingga menjadi perisai antara mereka dengan gejala-gejala alam. Misalnya dengan membuat AC, alat pemanas, tanggul-tanggul pencegah banjir dan lain-lainnya.
 - e. Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial yang terjadi di perkotaan jelas kelihatan dari adanya perbedaan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Penduduk kota sangat bervariasi, baik asal usul, suku bangsa, bahasa, pekerjaan dan lain-lainnya, sehingga sangat heterogen. Kota ditandai oleh heterogenitas, keragaman suku, dan unsur-unsur budaya, sehingga benar-benar menjadi “tempat bercampur” (Smith, T. Lynn, 1951:50). Warga kota hidup di tengah-tengah perbedaan yang besar, yang secara tetap berhubungan dengan orang-orang mempunyai perbedaan dalam ide, kepercayaan, tata kelakuan, bahasa, posisi ekonomi, tradisi ekonomi, jabatan dan sebagainya, sehingga diferensiasi sosial masyarakat kota tinggi.
 - f. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial masyarakat kota lebih tajam dari pada masyarakat perdesaan. Di kota perbedaan strata ekonomi sangat jelas terlihat. Kebutuhan-kebutuhan adanya kelembagaan yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat kota, mengakibatkan semakin banyaknya organisasi-organisasi yang memberikan status dan berbagai peranan bagi masyarakat kota. Misalnya adanya perkumpulan olah raga golf, perkumpulan pengusaha dengan berbagai tingkatan, pengusaha kecil, menengah, besar. Stratifikasi sosial masyarakat kota bersifat terbuka (open social stratification), dengan demikian setiap orang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya mempunyai kesempatan untuk meniti strata yang lebih tinggi.

g. Mobilitas sosial. Mobilitas penduduk dapat dimaknai dari dua segi, mobilitas fisik atau mobilitas geografis/mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal (perubahan status). Mobilitas fisik yaitu gerakan horizontal dari setiap orang secara teritorial, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sifat mudah bergerak pada masyarakat perkotaan ini disebabkan antara lain:1) banyak tersedianya alat transportasi yang ada;2) serta karena sering kalinya berpindah disebabkan karena banyaknya kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal (banyaknya hotel misalnya); 3) serinnya bertukar pekerjaan; 4) pembentukan pusat kota baru. Demikian pula sifat heterogenitas yang ada pada masyarakat kota mengakibatkan kemudahan untuk beralihnya status sosial (mobilitas vertikal) masyarakat kota. Sorokin dan Zimmerman (Smith,T.Lynn,1951:53), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas vertikal, antara lain:

- 1) Adanya jabatan-jabatan atau posisi yang mempermudah orang untuk berpindah secara vertikal, baik ke atas maupun ke bawah.
- 2) Apabila stratifikasi sosial cukup luas, akan memperbesar kesempatan untuk berpindah dari kelas satu ke kelas lainnya.
- 3) Perbedaan tingkat fertilitas yang menyebabkan semakin berkurangnya orang-orang pada kelas atas di perkotaan, dan menyebabkan kosongnya “top position” dalam piramida sosial, yang selanjutnya menimbulkan kevakuman yang dapat menciptakan arus vertikal.
- 4) Perbedaan sifat biologis dan psikologis antara orang tua dan anak. Hal ini tampak apabila anak melebihi kemampuan orang tuanya, sehingga memungkinkan untuk berpindah status yang lebih tinggi dari pada status di mana ia dilahirkan. Sebaliknya bila anak kurang mampu, paling tidak menyamai orang tuanya (misalnya orang tua tamatan sarjana, sedang anak tamatan SMA), maka kemungkinan anak tidak mampu mempertahankan level di mana ia dilahirkan.
- 5) Setiap ada perubahan lingkungan sosial dan budaya pasti mengarah kepada mobilitas sosial.

Dengan kata lain mobilitas sosial di perkotaan tinggi, terdapat lebih banyak mobilitas vertikal dalam semua lapisan sosial, atau mobilitas yang sama dalam tingkat pendapatan. Di kota banyak terjadi perpindahan pekerjaan dan tempat tinggal.

- h. Interaksi sosial. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat kota yang bersifat individuistik, maka hubungan satu sama lain bersifat impersonal, yaitu hubungan tidak langsung yang hanya didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang sama. Dengan kata lain hubungan antar manusia merupakan hubungan sekunder, tidak lagi didasarkan hubungan intim, *face to face* dan kegotong royongan. Dengan adanya hubungan sekunder tersebut maka di dalam masyarakat kota akan terjadi kompetisi dan perjuangan untuk tujuan sendiri.

Mc.Iver & Page (Khairuddin,1992:20) mengemukakan bahwa tata hubungan masyarakat kota adalah sebagai berikut:

- 1) Di kota banyak terdapat asosiasi dengan keadaan bahwa satu individu dapat menjadi anggota berbagai asosiasi.
 - 2) Hubungan antara manusia lebih bersifat sekunder dan bersifat kategoris.
 - 3) Adanya spesialisasi dalam kehidupan ekonomi.
 - 4) Kontrol sosial oleh keluarga.
 - 5) Keputusan harus diambil secara individu.
 - 6) Keterampilan dan prestasi lebih menentukan daripada status sosial.
- i. Solidaritas sosial. Pada masyarakat kota solidaritas sosial yang ada adalah solidaritas organik, yaitu solidaritas yang terbentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan. Karena banyaknya perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masyarakat kota, semakin besar pula perbedaan mereka dalam hal kepentingan. Untuk menciptakan solidaritas perlu diatur secara organis, yaitu menimbulkan rasa solidaritas karena adanya kepentingan yang sama, misalnya solidaritas diantara pekerja (buruh).
- j. Kontrol sosial. Masyarakat kota bersifat individualis, kebanyakan tidak mau tahu apa yang diperbuat orang lain. Itulah sebabnya kontrol sosial dalam

masyarakat kota lemah. Untuk sanksi terhadap diri orang lain, lebih bersifat formal, dan bukan sanksi sosial yang biasanya berasal dari masyarakat sendiri, seperti halnya di masyarakat pedesaan.

3. Tinjauan Sosiologis Masyarakat Kota

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota ditinjau dari aspek sosiologis, antara lain:

- a. Kehidupan keagamaan berkurang dibanding masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan adanya cara berpikir yang rasional pada masyarakat kota. Kehidupan masyarakat kota lebih diwarnai kecenderungan kearah ke duniawian (secular trend) dibanding kehidupan masyarakat pedesaan yang cenderung kearah agama (religious trend).
- b. Warga kota umumnya lebih mandiri, tanpa harus bergantung pada orang lain, sedang di desa orang lebih mementingkan keluarga atau kelompoknya. Di kota kehidupan keluarga sukar disatukan karena perbedaan kepentingan, perbedaan paham politik, agama dan sebagainya.
- c. Pembagian kerja warga kota lebih terspesialisasi.
- d. Kemungkinan-kemungkinan mendapatkan pekerjaan lebih terbuka di kota karena adanya spesialisasi pekerjaan.
- e. Cara berpikir rasional, sehingga interaksi-interaksi yang terjadi didasarkan pada faktor kepentingan dari pada faktor pribadi.
- f. Pembagian waktu dianggap sangat penting bagi warga kota untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu.
- g. Perubahan sosial tampak jelas di kota-kota karena kota umumnya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar.

Dari uraian mengenai karakteristik kota dan desa, maka Lowry Nelson menyusun tabel tentang perbedaan antara masyarakat desa dan kota sebagai berikut:

Tabel 7. Perbedaan Masyarakat desa dan Kota

No	Unsur pembeda	Desa	Kota
1	Mata pencaharian/basis ekonomi	Homogen –agraris, pertanian	Heterogen - non agraris, industri, perdagangan, jasa
2	Ruang kerja	Lapangan terbuka	Ruang tertutup
3	Musim, cuaca	Penting,menentukan	Tidak penting
4	Keahlian,keterampilan	Umum,tersebar	Ada spesialisasi
5	Rumah,tempat kerja	Dekat	Berjauhan
6	Kepadatan penduduk	Tidak padat	Padat
7	Kontak sosial	Frekuensi kecil, personal	Frekuensi besar, impersonal
8	Stratifikasi sosial	Sederhana, sedikit	Kompleks dan banyak
9	Lembaga-lembaga	Terbatas, sederhana	Banyak, kompleks
10	Kontrol sosial	Adat, tradisi	Hukum, peraturan tertulis
11	Sifat kelompok masyarakat	Gotong royong akrab(gemeinschaft)	Gesellschaft
12	Mobilitas	Rendah	Tinggi
13	Status sosial	Stabil	Tidak stabil
14	Diferensiasi sosial	Kecil-homogen	Kompleks-heterogen.
15	Tradisi dan kepercayaan lokal	Percaya kuat, terkadang irasional	Rasional

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota.

Perkembangan kota mempunyai dua aspek utama, pertama menyangkut aspek perubahan-perubahan yang dikehendaki dan dialami oleh warga kota, dan kedua yang menyangkut perluasan atau pemekaran kota. Aspek yang merupakan perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh warga kota lebih merupakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan prasarana dan fasilitas hidup di kota. Penduduk kota terus bertambah, baik disebabkan oleh pertambahan secara alamiah dari penduduk kota itu sendiri dan juga pertambahan karena adanya migrasi. Hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti ruang dan prasarana lainnya. Namun demikian tidak semua kota sama perkembangannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kota ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Letak. Letak suatu kota mempunyai peranan penting terhadap perkembangan kota, ada kota yang letaknya strategis sehingga cepat berkembang.
- b. Relief. Kota yang mempunyai relief yang datar akan lebih mudah berkembang dibandingkan dengan kota yang mempunyai relief kasar, karena perkembangannya akan dibatasi oleh adanya rintangan alam. Kota-kota pada zaman dahulu umumnya terletak pada dataran rendah dengan relief tanah datar. Namun demikian pada saat sekarang dengan adanya kemajuan teknologi manusia, relief tanah yang berbukit-bukit misalnya, tidak lagi merupakan hambatan utama, karena manusia dengan teknologinya dapat membuat terowongan ataupun dapat mengubah bukit-bukit tersebut menjadi dataran yang dapat dimanfaatkan untuk permukiman dalam rangka perluasan permukiman kota.
- c. Iklim, iklim yang sejuk merupakan faktor pertimbangan manusia untuk memilih tempat tinggal, karena pada awalnya iklim berkaitan dengan mata pencaharian penduduk, yaitu bidang pertanian. Sebagian besar proses terbentuknya kota diawali dengan munculnya kota-kota pertanian.
- d. Sumber alam, merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kota-kota yang

mempunyai sumber alam yang dikelola dengan baik, akan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk kota dan daerah sekitarnya. Aglomerasi penduduk di sekitar sumber-sumber mata pencaharian merupakan potensi bagi berkembangnya kota tersebut dengan pesat. Pemusatan manusia tersebut selanjutnya membutuhkan ruang untuk tempat tinggal dan prasarana fasilitas hidup lainnya, sehingga memungkinkan perkembangan kota.

- e. Tanah, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian adalah tanah yang subur. Dengan adanya kemajuan di bidang pertanian, penggunaan lahan semakin efisien. Didukung oleh sistem transportasi yang mengimbangi kemajuan di bidang pertanian, memungkinkan kota kecil di daerah pertanian akan berkembang cepat.
- f. Kondisi demografis dan kesehatan. Perkembangan penduduk berkaitan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Dengan tingkat kesehatan yang semakin baik, angka kematian akan turun, harapan hidup semakin panjang. Selanjutnya faktor perkembangan penduduk ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota. Pertambahan penduduk membutuhkan adanya pengembangan bangunan-bangunan untuk berbagai keperluan hidup penduduk, seperti tempat tinggal, fasilitas umum, pusat perdagangan dan lain lainnya, sehingga diperlukan lahan yang lebih luas di kota tersebut.
- g. Pendidikan dan kebudayaan, kota dimungkinkan berkembang karena banyaknya pendatang untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan yang ada di kota tersebut, sehingga diperlukan ruang yang lebih luas, sehingga terjadi perkembangan fisik kota.
- h. Teknologi dan elektrifikasi, dengan adanya perkembangan teknologi seperti sarana transportasi dan komunikasi, mengakibatkan jarak tidak lagi menjadi hambatan bagi penduduk untuk saling berinteraksi. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan industri dan perdagangan serta pendidikan. Arus barang produksi dan manusia dari daerah perdesaan,

pinggiran kota, menuju ke kota sebagai pusat kegiatan, membuat jalur sepanjang jalan ke kota semakin ramai.

- i. Transportasi dan lalu lintas. Jalur jalan-jalan dalam kota dan jalur jalan penghubung antar kota /koridor, merupakan faktor penting yang berpengaruh untuk meningkatkan hubungan antar manusia serta arus perpindahan barang-barang. Di sepanjang jalan-jalan ini akan terjadi pembangunan yang cepat, bangunan-bangunan akan tumbuh di sekitar jalan penting penghubung dalam maupun antar kota. bangunan-bangunan yang tumbuh disepanjang jalan ini oleh Bergel disebut konurbasi (conurbation), yaitu adanya kecenderungan perkembangan yang terjadi di sepanjang jalan raya antar kota. pertemuan antar konurbasi dari kota satu dengan kota lainnya, akan memungkinkan terbentuknya aglomerasi.

Perkembangan kota yang selanjutnya menuntut adanya pemekaran fisik kota, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Di kota-kota yang sudah maju, kota tidak hanya meluas secara mendatar tetapi juga menegak. Gedung-gedung tinggi bertingkat merupakan ciri-ciri khas kota-kota modern. Pemekaran kota secara horizontal

D. Teori-teori Perkembangan Kota

Teori perkembangan kota tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong perkembangan kota. Berdasarkan berbagai faktor tersebut disusun teori-teori perkembangan kota oleh para ahli sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Walaupun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli kelihatannya berbeda-beda, tetapi sebenarnya hal tersebut bukan merupakan perbedaan yang bersifat dikotomis, karena apabila disatukan berbagai pendapat tersebut akan saling melengkapi. Ada berbagai pendapat tentang teori perkembangan kota, ada yang menyoroti dari aspek sudut sosiologi, demografi, dan ekonomi.

- a. Teori perkembangan kota aspek sosiologis.

Berdasarkan sudut pandang sosiologis, ada dua teori perkembangan kota yaitu, Teori Area Alamiah (*The Theory of Natural Areas*) dan teori Intensitas Hubungan. Teori area alamiah, bila dilihat dari arti katanya seolah-olah hanya

menitik beratkan pada segi lingkungan alamnya saja. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Bergel (1955:104), Khairuddin (1992:194-195), konsep teori ini lebih menitik beratkan pada sifat manusianya dari pada lingkungan alamnya.

Dalam teori ini dikemukakan bahwa ada kecenderungan dari kelompok-kelompok primordial tertentu (ras, agama, kebangsaan, daerah, profesi, golongan) untuk mendiami daerah yang sama. Pengelompokan ini juga menimbulkan segregasi ekologis, yaitu pengelompokan orang-orang yang mempunyai karakteristik yang relatif sama, terkonsentrasi dan terpisah dengan kelompok lainnya. Segregasi ini kadang-kadang dengan jelas terlihat dari nama-nama wilayah tempat tinggal yang ada di kota-kota. Segregasi juga dapat berupa pengelompokan berdasarkan tingkat ekonomi, ada kecenderungan terjadi pengelompokan berdasarkan kemampuan ekonomi yang sama, umumnya hal ini berkaitan dengan harga tanah dan harga rumah di tempat tersebut. Pendukung teori ini adalah Harvey D.Zorbaugh dengan bukunya “ The Natural Areas of City”; E.W.Burgess dengan bukunya “ The Urban Community” dan P.Hatt dalam bukunya “ The concept of Natural areas”

Teori intensitas hubungan, sebenarnya merupakan perkembangan dari “Theory Natural Areas”, karena segregasi yang terjadi di wilayah kota merupakan ciri keamatan hubungan dari mereka yang mempunyai latar belakang daerah yang sama. Pertalian yang ada diantara mereka di kota dengan yang ada di daerah asalnya masih tetap terlihat dan menunjukkan intensitas hubungan yang akrab. Oleh karena itu kedatangan orang-orang dari daerah pedesaan cenderung menuju ke daerah- daerah di mana terkelompok orang-orang dari desa yang sama. Orang-orang yang berasal dari satu desa dianggap sebagai “satu saudara”. Tinggal untuk sementara di rumah orang satu daerah merupakan hal yang lazim bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian intensitas hubungan yang masih bersifat kekeluargaan merupakan salah satu faktor pendorong bagi orang-orang desa untuk mengadu nasib di kota. Kedatangan orang-orang dari desa ini merupakan salah satu faktor pendorong

pertambahan penduduk kota, sehingga kebutuhan ruang dan fasilitas kota semakin mendorong pula perkembangan kota.

b. Teori perkembangan kota aspek demografis.

Pengaruh perkembangan penduduk terhadap perkembangan kota sudah sangat jelas kelihatan. Hampir semua ahli berpendapat bahwa perkembangan penduduk baik alami maupun migrasi merupakan faktor penting dalam perkembangan kota. Sujarto (1977) dalam Khairuddin (1992:195) mengemukakan bahwa kriteria cepat lambatnya perkembangan dan pertumbuhan suatu kota umumnya ditentukan berdasarkan kecepatan perkembangan penduduknya. Jadi suatu kota dikatakan cepat perkembangannya apabila pertambahan penduduknya dari tahun ke tahun memperlihatkan pelonjakan yang mencolok. Sejalan dengan hal ini, Hauser berdasarkan pengamatan dari PBB, menyatakan bahwa 46 persen dari pertumbuhan kota disebabkan karena perpindahan penduduk, dan 54 persen karena pertambahan alami.

Pemekaran kota akan menarik orang dari luar daerah luar kota, hal ini dimungkinkan oleh perkembangan baru di bidang teknologi, spesialisasi, skala ekonomi dan daya produksi yang meningkat. Banyak sekali kota-kota yang penduduknya berasal dari pendatang. Hal ini terkait dengan daya tarik kota yang semakin berkembang, dan menarik penduduk desa di sekitarnya. Dengan demikian berarti ada hubungan timbal balik antara jumlah penduduk dengan perkembangan kota. Artinya bahwa pertambahan jumlah penduduk memungkinkan terjadinya perkembangan kota, dan sebaliknya perkembangan kota mempunyai kemungkinan pula bagi bertambahnya jumlah penduduk, terutama bagi para pendatang.

Pertambahan penduduk kota, terutama oleh para pendatang, tidak hanya menyebabkan kota menjadi semakin berkembang, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan. Umumnya di negara-negara sedang berkembang, arus penduduk dari desa ke kota dengan motif ekonomi. Bertumpuknya penduduk di kota dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, baik masalah fisik maupun masalah non fisik, dan juga dapat berakibat buruk bagi

daerah-daerah sekitarnya. Pada umumnya hampir semua negara mengalami masalah ini, permasalahannya pun bersifat kompleks sehingga penanganannya perlu pendekatan komprehensif.

c. Teori perkembangan kota tinjauan ekonomi

Pada bagian terdahulu telah disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu kota merupakan faktor pendorong bagi perkembangan kota. Perkembangan ekonomi di suatu kota akan menimbulkan muti efek terhadap bidang-bidang perekonomian lainnya, seperti tumbuhnya industri-industri pendukung, transportasi, jasa, bangunan-bangunan gedung, rumah tempat tinggal dan lain-lainnya. Semua komponen kota itu pasti membutuhkan ruang yang tidak sedikit dan memerlukan penambahan-penambahan lokasi baru untuk menunjang berbagai aktivitas kota tersebut.

Sebagai contoh seperti yang dikemukakan oleh Hauser dan Gardner (1985) dalam Khairuddin (1992:198), yang menggambarkan terbentuknya suatu kota akibat perkembangan ekonomi di bidang pertanian. Dijelaskan oleh Hauser, kota timbul akibat perkembangan-perkembangan yang menciptakan kelebihan pangan, yang merupakan salah satu syarat orang dapat hidup berkelompok dan untuk dapat mengembangkan suatu keahlian. Dalam suatu kelompok orang yang hidup menetap di suatu tempat, akan timbul perubahan-perubahan besar pada kegiatan ekonominya. Kelompok-kelompok penduduk yang besar memungkinkan adanya pembagian kerja dan timbul spesialisasi di luar bidang pertanian. Kehidupan kota melahirkan kegiatan ekonomi baru. Di perkotaan muncul bentuk-bentuk lapisan ekonomi dan berbagai tingkat konsumsi sesuai dengan perbedaan dalam tingkat pendapatan, sehingga timbul kelompok ekonomi kaya, menengah, dan miskin. Demikian pula timbul bentuk-bentuk baru organisasi ekonomi, seperti himpunan majikan, karyawan, lembaga keuangan, perusahaan. Di samping itu juga muncul berbagai masalah, seperti pengangguran, penggunaan tenaga kerja di bawah umur, pemerasan konsumen. Semua hal tersebut merupakan konsekuensi akibat cara hidup berkelompok.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh berkembangnya suatu kota, jelas bahwa faktor ekonomi mempunyai kontribusi besar dalam mengembangkan suatu kota. Pertumbuhan ekonomi suatu kota tidak lepas dari potensi dan aktivitas ekonomi suatu kota. Sirkulasi modal karena pertumbuhan ekonomi merupakan investasi balik bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi selanjutnya. Tidak semua daerah atau kota mampu untuk mengembangkan aktivitas ekonominya, karena cukup banyak faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu kota. Faktor inilah yang mengakibatkan perbedaan laju pertumbuhan dan perkembangan kota-kota berbeda-beda., ada kota yang berkembang pesat, ada pula kota yang sangat lambat perkembangannya.

Perkembangan kota juga dipengaruhi oleh potensi daerah setempat, potensi tersebut antara lain potensi sumber daya alam dan manusia, industrialisasi dan pendapatan daerah. Ke tiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan menimbulkan hubungan sebab akibat. Sumber daya alam misalnya, memungkinkan timbulnya industri yang selanjutnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan daerah merupakan faktor penting untuk menentukan tingkat perekonomian daerah dan kota. Pendapatan daerah dapat dikatakan sebagai barometer naik turunnya keadaan perekonomian daerah.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam (natural resources) merupakan kekayaan alam yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, sedangkan sumber daya manusia (human resources) merupakan kemampuan manusia yang dapat untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan dan hambatan yang timbul. Sumber daya manusia dapat berupa pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kepribadian. Kemampuan sumber daya manusia inilah yang nantinya akan merupakan faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Manusia dengan daya cipta, rasa dan karsanya dapat memanfaatkan sumber daya alam sebagai sarana dan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Hubungan fungsional antara sumber daya alam dan manusia. Proses penggunaan sumber daya alam memerlukan pemikiran yang terus menerus, sehingga dapat melahirkan kemampuan-kemampuan baru ndalam diri manusia, sebagai bentuk sumber daya manusia. Penemuan-penemuan manusia inilah yang diterapkan dalam kehidupan manusia dalam bentuk nyata. Hal ini selanjutnya akan melahirkan proses-proses industri yang banyak dijumpai di kota-kota. Dengan demikian hasil-hasil penemuan baru tersebut lebih banyak terjadi di kota dari pada di desa. Kota-kota yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang baik, akan lebih cepat berkembang dari pada kota yang minus baik sumber daya alam dan manusianya.

Industri. Kalau diperhatikan lokasi industri selalu berkaitan dengan suasana kehidupan kota. Industri juga sering dijadikan indikator kemajuan suatu daerah, atau negara. Dalam kaitannya dengan perkembangan kota, industri merupakan salah satu sektor perekonomian yang penting dalam mendorong percepatan perkembangan kota, karena sektor ini membutuhkan sarana prasarana yang cukup banyak dan luas jangkauannya. Lokasi industri, tenaga kerja, dan transportasi merupakan hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kelancara proses peoduksi. Lokasi industri cenderung berada di kota atau pinggiran kota, hal ini lebih banyak mempertimbangkan faktor ekonomi seperti mudahnya mendapatkan tenaga kerja, bahan baku, jarak transportasi, tanah, dan fasilitas lain yang dibutuhkan dalam proses industri. Bintarto dalam buku *Interaksi desa Kota* (1983:69) mengemukakan bahwa lokasi pabrik umumnya dapat dijumpai di tiga daerah: (a) daerah tepian kota (*periphery of the city*); (b) daerah perdagangan (*trade districts*); (c) di sepanjang jalan dengan lalu lintas untuk angkutan berat (*heavy freight traffic*).

Keberadan pabrik dan aktivitasnya merupakan inti kegiatan yang mampu membuat daerah sekitarnya menjadi berkembang. Demikian pula dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, zone industri yang ditetapkan dalam master plan kota, akan berkembang menjadi tempat yang ramai. Bila lokasi industri berada di pinggiran kota, maka ada kemungkinan lokasi tersebut akan mengalami perkembangan sebagai konurbasi, bahkan aglomerasi dengan inti kota.

Pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian yang ada di daerah yang bersangkutan. Semakin banyak aktivitas ekonomi yang ada, kemungkinan pendapatan daerah semakin besar. Pendapatan asli daerah (PAD) di Indonesia sangat bervariasi sesuai dengan aktivitas ekonomi yang ada. Pendapatan daerah umumnya berasal dari pajak-pajak daerah, kontribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan perusahaan daerah serta penerimaan lain yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Kebutuhan keuangan daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adapun sumber dananya berasal dari pendapatan asli daerah serta subsidi dari pemerintah pusat. Selama ini keuangan daerah banyak tergantung pada subsidi pemerintah pusat, PAD sebagian besar daerah di Indonesia kecil dibandingkan dengan APBD nya. Hal ini disebabkan bahwa selama ini sumber-sumber keuangan daerah lebih banyak yang dikelola oleh pusat.

Pemekaran kota-kota secara fisik akan memunculkan konurbation, yaitu kota raksasa akibat pemekaran dengan jumlah penduduk sampai dengan lima juta orang. Kota-kota seperti ini umumnya merupakan kota dengan kegiatan utama di bidang industri dan perdagangan. Banyak diantara konurbasi terdapat di sekeliling pertambangan dan pelabuhan. Terbentuknya konurbasi tidak direncanakan, akibatnya jaringan jalan, perumahan, dan lokasi pabrik-pabrik tidak teratur susunannya.

Ada dua tipe konurbasi, yaitu polisentris (*polynuclear*) dan monosentris (*uninuclear*). Konurbasi tipe polisentris merupakan penggabungan beberapa kota menjadi satu sebagai akibat ekspansi fisik masing-masing kota. Konurbasi tipe monosentris merupakan hasil ekspansi kota tunggal. Tipe polisentris terdapat di negara lama seperti Eropa, sedang tipe monosentris banyak terdapat di benua baru seperti Amerika, Australia dan Afrika. Pada sensus tahun 1951 misalnya, di Inggris terdapat enam konurbasi besar yang dihuni 35 persen penduduk negeri, sedang di Skotlandia terdapat satu konurbasi dengan penduduk 30 persen dari seluruh penduduk negara tersebut. Di Jerman terdapat konurbasi raksasa di kawasan batu bara tepi sungai Ruhr, dengan luas 2500km², jumlah penduduk 10 juta, dan kegiatan utama di bidang industri berat. Sementara itu di Amerika

Serikat dan Belanda lahir kota raksasa megalopolis yang cakupannya lebih luas dari pada konurbasi.

1. Teori Kota Sebagai Tempat Pusat (*Central Place Theory* dari Christaller dan Losch)

a. Eksistensi pusat pelayanan dan aglomerasi

Perbedaan yang mencolok antara kota dan desa berupa kemampuan manusia kota dalam mengatur ruang hidupnya. Di negara-negara maju, bagian besar penduduknya tumbuh di kawasan perkotaan yang teritorialnya sempit bila dibandingkan dengan luas seluruh wilayah negara. Konsentrasi penduduk seperti itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Lahirnya kota-kota mempunyai tiga fungsi, sebagai berikut: a) fungsi melancarkan pengawasan (administrasi dan politis), (b) fungsi berperan sebagai pusat pertukaran (komersial), dan (c) fungsi memproses bahan sumber daya (industrial). (Daljoeni,1992:97).

Dua fungsi pertama dan ke dua, berarti kota berfungsi untuk melayani, sebagai central place oleh pihak pusat wilayah, terhadap wilayah di sekitarnya yang dikenal dengan sebutan kawasan pedalaman atau hinterland. Menurut teori ini suatu kota berkembang sebagai akibat fungsinya dalam menyediakan keperluan daerah sekitarnya.

Pusat pelayanan diperlukan sebab manusia membutuhkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri. Untuk memperolehnya diperlukan suatu tempat untuk penukaran barang-barang yang dibutuhkan yang dilindungi, aman ada kontrol secara etis dan religius. Jadi fungsi-fungsi pelayanan itu benar-benar diperlukan bagi segenap masyarakat manusia

Prinsip pemusatan atau aglomerasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung dalam rangka memenuhi kebutuhannya diperlukan usaha yang sekecil-kecilnya. Manusia sejak awal sejarah, telah melakukan itu semua demi tercapainya tujuan, melalui aglomerasi di dalam permukiman mereka. Desa adalah bentuk sosial dan spasial yang paling efisien bagi kehidupan yang semi komunal itu. Selama sebagai kelompok, manusia mempunyai banyak kegiatan bersama, mengusahakan tanah secara bersama pula, oleh karenanya tempat tinggal di tengah persawahan atau perladangan menjamin mudahnya warga masyarakat itu

untuk saling bertemu, dan saling menukar hasil pertanian mereka. Jadi mereka terhindar dari perjalanan jauh, dibandingkan kalau mereka bertempat tinggal di ladang atau persawahan mereka masing-masing.

Apabila skalanya diperluas, maka untuk suatu kawasan yang permukimannya berupa desa-desa yang tersebar, dengan penduduk yang kebutuhannya semakin meningkat, sebuah kota dapat berfungsi sebagai central place yang melayani kebutuhan-kebutuhan penduduk di sekitarnya. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya pemusatan kegiatan dapat berupa keuntungan ekonomis, geografis dan psikologis. Aglomerasi itu sendiri merupakan faktor lokasi yang sangat penting, baik yang berupa pengelompokan perumahan penduduk di pedalaman, maupun berkumpulnya pertokoan di shopping center, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi ekonomis maupun kepuasan sosial, karena di situ terjadi pemusatan kegiatan manusia di suatu lokasi tertentu.

Demikian pula dengan bergabungnya industri sejenis dalam satu kompleks akan meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi dari distribusi barang itu dapat diperoleh melalui usaha mendekatkan para penjual dengan pembelinya, seperti yang terdapat di pasar, pusat perbelanjaan ataupun melalui bazaar.

Selain aglomerasi dapat berfungsi mengurangi jarak total yang seharusnya diempuh, sehingga diperoleh kepuasan secara geografis, juga menguntungkan secara ekonomis, karena dengan sedikit berbuat dapat diperoleh hasil yang banyak. Orang di samping memenuhi kebutuhan utamadari kepergiannya, sekaligus dia dapat memenuhi kebutuhan lainnya, tanpa ia harus mengulang perjalanan dari rumah ke tujuan tambahan itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjalanan yang memerlukan waktu dan biaya dapat dikurangi dengan cara mengusahakan pemusatan kegiatan.

b. Teori Kota Sebagai Tempat Pusat.: *Central Place Theory*

Christaller, seorang geograf Jerman, pada tahun 1933 mengemukakan gagasannya yang kemudian terkenal dengan "*Central Place Theory*" (Teori Tempat Pusat). Teori tersebut disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah prinsip-prinsip umum yang menentukan jumlah, besarnya, dan pemencaran permukiman manusia?.
- b. Apakah lokasi kota-kota besar dan kecil itu hanya suatu kebetulan saja, serta sejarah di mana kota-kota itu terpencah dalam suatu cara yang seakan-akan tidak dapat dipahami?.
- c. Apakah lokasi kota-kota tersebut hanya sekedar akibat dari kondisi topografis dan geografis tertentu yang tidak terhindarkan, ataukah ada hubungannya dengan kepadatan penduduk?.
- d. Apakah ada suatu sebab bagi aglomerasi perdesaan dan sebab lain untuk tumbuhnya kota-kota dan pusat-pusat metropolis?.
- e. Apakah di belakang faktor-faktor tersebut yang seolah-olah merupakan sebab akibat itu masih ada pengaruh-pengaruh yang lebih fundamental dan organik?

(Band dan Harry W. Richardson dalam buku : *Regional Economic Theory, Urban Structure and Regional Change*, 1969:157-159).

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, pada prinsipnya teori Cristaller secara garis besar disusun untuk menjawab tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

- a. Apakah yang menentukan banyaknya kota?
- b. Apakah yang menentukan besarnya kota?
- c. Apakah yang menentukan sebaran kota?.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Cristaller mengemukakan konsep “range” (jangkauan) dan “threshold”(ambang). (Daljoeni,1998:153). Cristaller mengasumsikan suatu wilayah sebagai suatu dataran yang homogen secara geografis, dengan penduduk yang tersebar merata. Penduduk disitu membutuhkan barang dan jasa, seperti makanan, pakaian, mebel, pelayanan dokter, pengacara, media massa dan sebagainya.

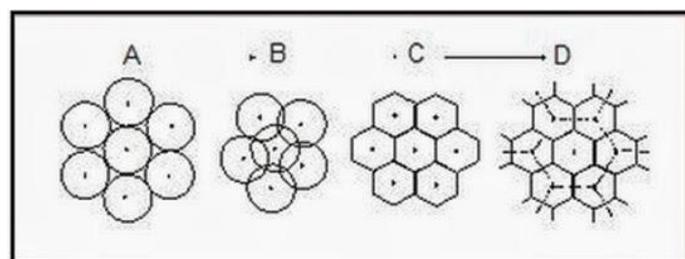
Semua kebutuhan tersebut memiliki dua hal yang khas. Pertama disebut “range”, yaitu jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Range untuk mebel lebih besar dibanding range untuk susu, karena harga mebel lebih mahal, lagi pula orang membeli mebel hanya

kadang-kadang saja. Untuk memperolehnya orang dapat dipaksa bepergian lebih jauh, dibanding apabila orang harus membeli susu yang dibutuhkan setiap hari.

Kedua, *threshold*, adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan suplai suatu barang. Bandingkan kasus sebuah toko kecil yang menjual makanan dan minuman dengan sebuah toko yang menjual perhiasan emas. Untuk toko makanan dan minuman agar laku dalam penjualannya tidak diperlukan jumlah penduduk yang banyak. Sebaliknya toko emas membutuhkan *threshold* yang lebih besar. Barang dan jasa yang mempunyai range dan *threshold* besar disebut barang dan jasa tingkat tinggi (*high order goods and services*). Sebaliknya barang dan jasa tingkat rendah, range terbatas dan *threshold*-nya kecil (*low order goods and services*). Dengan demikian sudah selayaknya bila barang-barang dan jasa tingkat tinggi terdapat di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang besar.

Kota-kota yang tersebar di dataran seperti yang diasumsikan *Cristaller*, disebutnya dengan “*central place*”), kota-kota tersebut menyediakan barang dan jasa untuk wilayah di sekelilingnya dengan membentuk suatu hierarki. Untuk melayani tempat-tempat yang kecil yang terlebarnya luas, disediakan barang dan jasa tingkat rendah. Kota-kota yang melayani barang dan jasa tingkat rendah dan tinggi sekaligus, jumlahnya pasti lebih sedikit. Makin tinggi tingkat barang dan jasa, makin besar rangenya dari pada penduduk di tempat kecil, di kota-kota besar terdapat pasar yang besar.

Untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang saling bersambungan atau saling meluaskan, *Cristaller* menggunakan bentuk heksagon.



Lingkaran-lingkaran yang mencerminkan wilayah pasaran yang saling bertindih kemudian dibelah dua dengan garis lurus; maksudnya agar orang dalam

berbelanja dapat memilih tempat (kota) yang paling dekat lokasinya dengan tempat tinggalnya. Dengan membayangkan adanya bentuk heksagonal-heksagonal tersebut, terciptalah apa yang disebut hierarki permukiman serta wilayah pasaran (seperti yang ada pada gambar bagian kanan).

Asumsi-asumsi Christaller.

Dalam kajiannya di bidang geografi ekonomi, Christaller menyusun suatu hukum tentang persebaran dan besarnya permukiman yang dapat dijelaskan berdasarkan fungsi pelayanannya. Untuk itu dikemukakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (a) Karena konsumen harus menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat yang dinyatakan dalam bentuk biaya dan waktu amatlah penting.
- (b) Karena konsumen yang harus menanggung ongkos angkutan, maka jangkauan (range) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu.
- (c) Semua konsumen dalam mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, menuju ke tempat yang paling dekat letaknya.
- (d) Kota-kota berfungsi sebagai central place bagi wilayah di sekitarnya. Artinya ada hubungan antara besarnya tempat pusat dan besarnya (luasnya) wilayah pemasaran, banyaknya penduduk dan tingginya pendapatan di wilayah yang bersangkutan.
- (e) Wilayah tersebut digambarkan sebagai wilayah yang datar, dengan penduduk yang tersebar merata dan ciri-ciri ekonomi sama (penghasilannya sama).

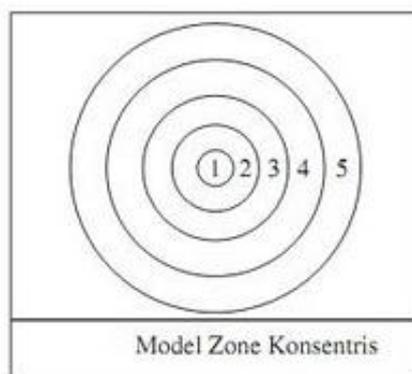
2. Struktur Keruangan Kota

Kota merupakan suatu perwujudan geografis, sebagai perwujudan geografis kota terdiri dari banyak unsur, seperti fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural, serta dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Oleh karena itu struktur bentang budaya kota dapat dilihat dari struktur sosial, ekonomi, dan struktur ruang secara fisik.

Ada beberapa teori perkembangan menurut beberapa ahli seperti Burgess yaitu teori lingkaran Konsentris atau yang biasa disebut dengan teori konsentris, kemudian ada teori Sektor yang dikemukakan oleh Homer Hoyt, serta teori Inti Ganda yang dikemukakan oleh Haris dan Ullman.

a. Teori Konsentris

Menurut Burgess, terdapat lima buah lingkaran yang konsentris hal ini menyebabkan timbulnya teori yang ini disebut dengan Teori Lingkaran Konsentris. Namun teori ini jarang terjadi karena perkembangan kota tidak selalu membentuk zona konsentris yang ideal. Berikut ini adalah gambar lingkaran yang dimaksud oleh Burgess



Penjelasan :

1. Daerah pusat kegiatan (CBD)
2. Zona Peralihan
3. Zona Perumahan para pekerja
4. Zona permukiman yang lebih baik
5. Zona para penglaju

1. Daerah pusat perdagangan atau yang biasa disebut dengan CBD/DPK, terletak di pusat kota dimana terdapat toko-toko, kantor-kantor, hotel-hotel, bioskop, ataupun gedung-gedung bertingkat. Tempat ini merupakan suatu pusat terjadinya segala kegiatan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, serta teknologi.
2. Zona peralihan atau transisi (DP), pada daerah ini terdapat slum area, tempat tinggal golongan migran, serta kelompok-kelompok minoritas. Zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan permukiman secara terus menerus, dan makin lama makin hebat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya intruksi fungsi yang berasal dari CBD sehingga pembauran permukiman dengan bangunan non permukiman mempercepat penurunan kualitas

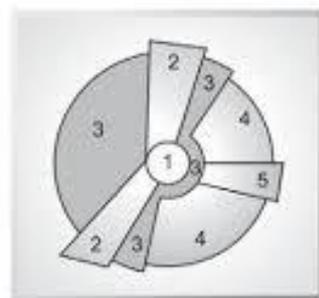
lingkungan. Dalam zone ini lingkungannya tidak sehat dan terjadi banyak kejahatan, seperti halnya kriminal serta prostitusi.

3. Zona perumahan para pekerja atau permukiman buruh (*the zone of workingmen's homes*), zona ini merupakan zona atau daerah permukiman masyarakat yang kurang mampu serta kebanyakan pindahan dari zona transisi, atau pekerja pabrik, industri serta lain-lain yang berpenghasilan rendah atau kecil. Zona ini ditandai dengan adanya rumah-rumah kecil serta rumah susun sederhana yang dihuni atau ditempati oleh keluarga besar, namun kondisi permukiman di zona ini lebih baik dibandingkan dengan permukiman pada zona transisi, meskipun sebagian penduduknya masih masuk kategori menengah ke bawah.
4. Zona perumahan yang lebih baik (*the zone of middle class dwellers*), di zona ini dihuni oleh masyarakat yang lebih stabil dari zona sebelumnya baik dilihat dari permukiman maupun perekonomiannya yaitu permukiman yang teratur dan ekonomi menengah. Pekerja-pekerja yang tinggal pada zona ini misalnya, golongan manajer, pegawai tingkat atas, orang-orang profesional, pemilik bisnis dan lain sebagainya. Selain itu fasilitas permukiman pada zona ini seperti pusat pertokoan, gedung-gedung bioskop, dan lain sebagainya terencana dengan baik sehingga tercipta tempat tinggal yang cukup nyaman.
5. Zona para penglaju atau *commuter*, zona ini dihuni oleh para pekerja yang pulang pergi atau melaju dari tempat aktivitasnya di pusat kota. Daerah ini merupakan daerah yang paling luar serta memiliki dua sifat yaitu ada yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan masyarakat perkotaan dan ada juga yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan. Selain itu sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian atau agraris. Zona ini biasanya terletak di lokasi yang strategis pada daratan tinggi dengan keindahan lingkungan,

sehingga pada zona ini kita dapat mengamati panorama ke segala penjuru kota.

b. Teori Sektor

Teori ini dikemukakan oleh Homer Hoyt, Hoyt menyatakan bahwa struktur kota merupakan lingkaran-lingkaran konsentris, melainkan sektor-sektor terpisah dari dalam ke luar. Selain itu Hoyt juga menyatakan bahwa perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di dalam suatu kota, terjadi secara berangsur-angsur yang menghasilkan kembali karakter yang dimiliki oleh sektor-sektor yang sama dan terlebih dulu. Hal tersebut karena didasarkan pada adanya kenyataan bahwa di dalam suatu kota yang besar terdapat variasi sewa tanah atau sewa rumah yang besar. Berikut adalah gambar serta penjelasan dari teori Hoyt.



Keterangan:

- Zona 1 : Daerah Pusat Kegiatan (DPK) atau *Central Business District* (CBD)
- Zona 2 : Daerah grosir dan manufaktur.
- Zona 3 : Permukiman kelas rendah.
- Zona 4 : Permukiman kelas menengah.
- Zona 5 : Permukiman kelas atas.

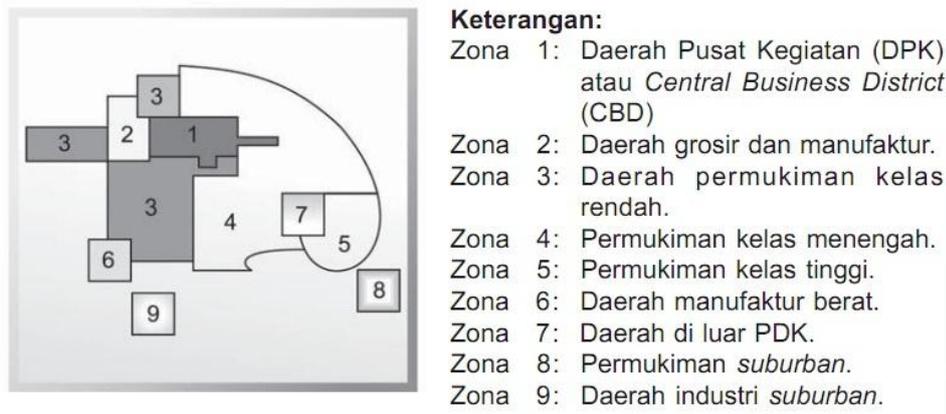
Gambar Struktur kota menurut teori sektoral. (HOMMER HOYT)

1. Daerah pusat kegiatan (CBD), pusat kota ini terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar serta pusat perbelanjaan.
2. Daerah grosir dan manufaktur atau permukiman buruh, pada daerah ini terlebih disektor tertentu terdapat kawasan industri ringa dan perdagangan.
3. Dekat pusat kota serta deka dengan sektor di atas, yaitu bagian sebelahnya terdapat sektor murbawisma yaitu tempat tinggal untuk kaum/ golongan murba atau buruh.
4. Agak jauh dari pusat kota serta sektor industri dan perdagangan terletak di sektor madyawisma.

5. Lebih jauh lagi terdapat sektor adiwisma, yaitu permukiman golongan atas.

c. Teori Inti Ganda

Teori Inti Ganda ini dikembangkan oleh C. D. Harris dan E. L. Ullman, menurut kedua tokoh tersebut struktur ruang kota tidaklah sesederhana seperti teori konsentris, karena sebenarnya menurut teori ini tidak ada urutan-urutan yang teratur. Dalam teori ini dapat terjadi misalnya, dalam suatu kota terdapat tempat-tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Keadaan tersebut telah menyebabkan adanya beberapa inti dalam suatu wilayah perkotaan misalnya saja kompleks atau wilayah perindustrian, pelabuhan, kompleks perguruan tinggi, dan kota-kotakecil yang ada disekitar kota-kota besar.



Gambar Struktur kota menurut teori inti ganda. (HARRIS & ULLMAN)

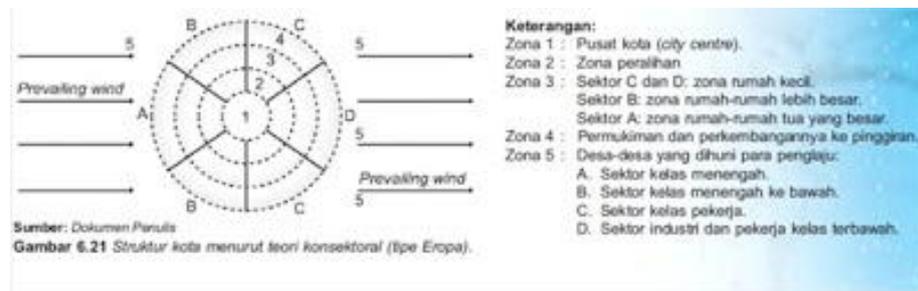
1. Pusat kota/ pusat perdagangan (CBD),
2. Industri ringan atau kawasan niaga,
3. Perumahan buruh, tempat tinggal kawasan rendah (kawasan murbawisma),
4. Perumahan yang lebih baik/ tempat tinggal yang berkualitas menengah (kawasan madyawisma),
5. Perumahan villa, tempat tinggal berkualitas tinggi (kawasan adiwisma),
6. Pusat industri berat,

7. Pusat niaga/ perbelanjaan lain di pinggiran/ pertokoan,
8. Upakota (*suburb*) untuk kawasan madyawisma dan adiwisma,
9. Upakota (*suburb*) kawasan industri.

Selain ketiga teori diatas ada beberapa teori yang berkaitan dengan perkembangan kota, antara lain yaitu :

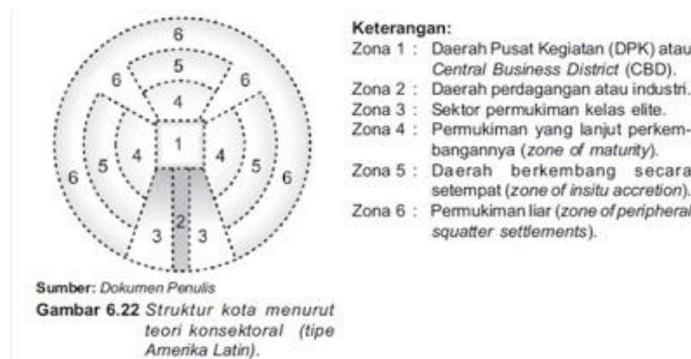
1. Teori Konsektoral (Tipe Eropa)

Teori konsektoral tipe Eropa dikemukakan oleh Peter Mann pada tahun 1965 dengan mengambil lokasi penelitian di Inggris. Teori ini mencoba menggabungkan teori konsentris dan sektoral, namun lebih menonjolkan penekanan konsentris.



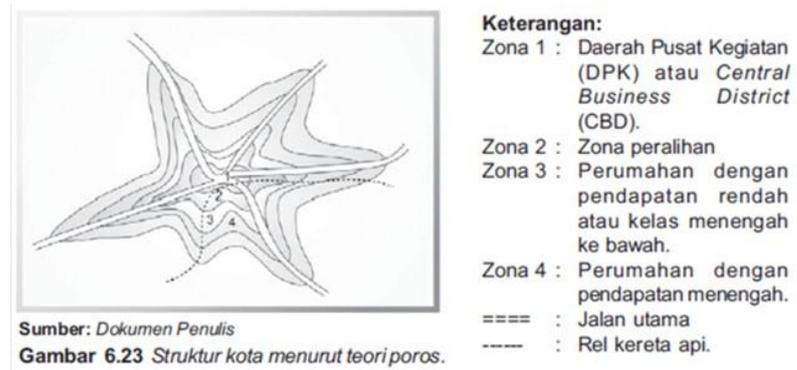
2. Teori Konsektoral (Tipe Amerika Latin)

Teori konsektoral tipe Amerika Latin dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford pada tahun 1980 berdasarkan penelitian di Amerika Latin. Teori ini dapat digambarkan sebagai berikut.



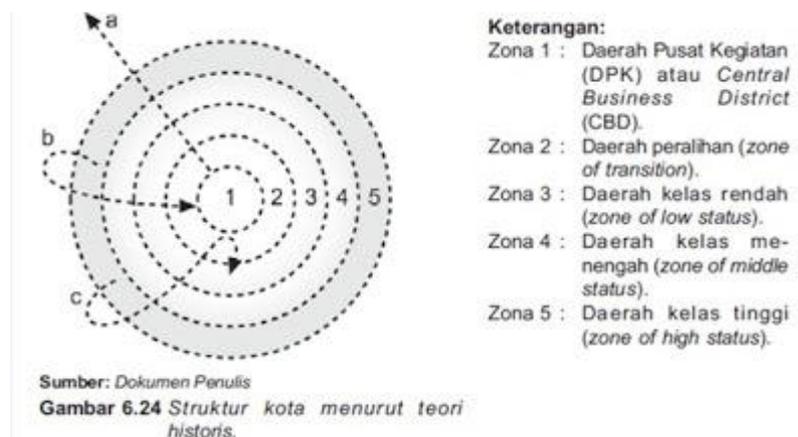
3. Teori Poros

Teori poros dikemukakan oleh Babcock (1932), yang menekankan pada peranan transportasi dalam memengaruhi struktur keruangan kota. Teori poros ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



4. Teori Historis

Dalam teori historis, Alonso mendasarkan analisisnya pada kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di dalam kota. Teori historis dari Alonso dapat digambarkan sebagai berikut.



Dari model gambar di atas menunjukkan bahwa dengan meningkatnya standar hidup masyarakat yang semula tinggal di dekat *Central Business District* (CBD) disertai penurunan kualitas lingkungan, mendorong penduduk untuk pindah ke daerah pinggiran. Perbaikan daerah *Central Business District* (CBD) menjadi menarik karena dekat dengan pusat segala fasilitas kota. Program perbaikan yang semula hanya difokuskan di zona 1 dan 2, melebar ke zona 3 yang menarik para pendatang baru khususnya dari zona 2 .

BAB III

INTERAKSI MASYARAKAT DESA DAN KOTA

A. Proses Interaksi Masyarakat Desa dan Kota

Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai – nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing – masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi.

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Menurut Gillin dan Gillin (melalui Soerjono Soekanto:2006,55) interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia.

Dalam kehidupan sehari – hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, kita akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan kunci dalam kehidupan sosial. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi dan komunikasi.

Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial adalah dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan – hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok. Interaksi sosial merupakan kunci dari kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama (Soekanto, 1982) dalam Khairuddin (1992:11). Interaksi sosial merupakan dasar terjadinya proses-proses sosial. Soekanto (1982:195) mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan perorangan, antara kelompok manusia, dan antara perorangan dengan kelompok. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa ada sejumlah syarat untuk terjadinya interaksi sosial, yaitu: a) adanya kontak sosial; dan b) adanya komunikasi. Dalam melakukan interaksi sosial tersebut hasilnya dapat berupa proses integratif (penyatuan), bila terjadi penyesuaian diantara pihak-pihak yang berinteraksi, dapat pula merupakan proses disintegratif (pemisahan), bila tidak ada persesuaian.

Proses Interaksi sosial menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Makna tidak bersifat tetap namun dapat dirubah, perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut disebut juga dengan *interpretative proces*. Faktor-Faktor yang menyebabkan berlangsungnya Interaksi Sosial (Soyomukti Nurani: 2013,316-320)

1. Imitasi (Peniruan)

Imitasi merupakan makna dan tindakan atau tingkah laku tertentu yang kadang ditirukan misalnya cara memberikan hormat, cara menyampaikan terima kasih, cara-cara memberi syarat tanpa berbicara. Contohnya anak kecil melihat orang tuanya mengambil sesuatu sebelum makan ,sesuatu itu untuk memungut nasi dan lauk untuk kedua orang tuanya. Suatu ketika orang tuanya menyebutkan nama “sendok“ dan

memberitahuannya pada si anak, si anak tahu bahwa artinya yang ditirukannya “sendok” adalah suatu alat yang digunakan untuk makan.

2.Sugesti

Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Sisi negatif dari berlangsungnya sugesti yaitu apabila pihak yang menerima dilanda oleh emosi hal ini akan menghambat daya pikir seseorang secara rasional.

3.Identifikasi

Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, oleh karena itu kepribadian seseorang dapat dibentuk atas proses ini. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya atau disengaja karena seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya.

4.Simpati

Simpati adalah suatu proses ketika seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Faktor utamanya adalah perasaan untuk memahami orang atau pihak lain, akan tetapi simpati timbul tidak atas dasar logis rasional tetap berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi.

5.Empati

Empati merupakan proses social yang hamper sama dengan simpati. Hal yang membedakan adalah bahwa empati lebih melibatkan emosi atau lebih menjwiwai dalam diri seseorang yang lebih dibanding simpati. Contohnya, kita ikut bersedih ketika melihat korban banjir. Kita seolah ikut merasakan dengan sikap menangis, membantu langsung, menyumbang dana dan sebagainya.

6.Motivasi

Motivasi merupakan proses social yang mirip dengan sugesti. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan atau rangsangan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Sehingga orang yang diberi motivasi akan

menuruti atau melaksanakan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Wujud motivasi dapat berupa pendapat, saran dan pertanyaan.

Interaksi tidak hanya terbatas pada gerak manusianya, tetapi merupakan proses perpindahan barang maupun informasi. Interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, proses politik dan sebagainya. Interaksi antara desa dan kota terjadi karena adanya berbagai faktor yang ada di dalam desa dan kota. Dari pengertian interaksi antar wilayah, dapat dipahami bahwa dalam interaksi wilayah terkandung tiga hal pokok yaitu:

1. Hubungan timbal balik terjadi antara dua wilayah atau lebih;
2. Hubungan timbal balik antar wilayah menimbulkan adanya proses pergerakan atau perpindahan, dapat berupa pergerakan manusia, informasi atau gagasan, ataupun pergerakan/perpindahan materi atau barang;
3. Hubungan timbal balik menimbulkan gejala, kenampakan, dan permasalahan baru, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Proses interaksi sosial antara masyarakat desa dan kota berbeda, perbedaan itu disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan interaksi sosial dari ke dua kelompok masyarakat tersebut. Sorokin dan Zimmerman (Smith, T., Lynn, 1951:56) mengemukakan perbedaan sistem interaksi sosial masyarakat desa dan kota sebagai berikut:

- a. Area kontak masyarakat perdesaan lebih sempit dan lebih terbatas daripada masyarakat perkotaan.
- b. Totalitas kontak yang dilakukan masyarakat perdesaan bersifat langsung (*face to face*), sedang masyarakat kota mempunyai hubungan yang tidak langsung. Hal ini terlihat pada kebiasaan pada penduduk perdesaan yang umumnya mengenal orang lain secara baik, sedang di perkotaan sebaliknya.
- c. Kontak di perdesaan bersifat personal, sedang di kota bersifat impersonal.
- d. Kontak sosial yang dilakukan masyarakat perdesaan bersifat permanen, erat, bertahan lama. Seding kontak sosial di perkotaan lebih bersifat

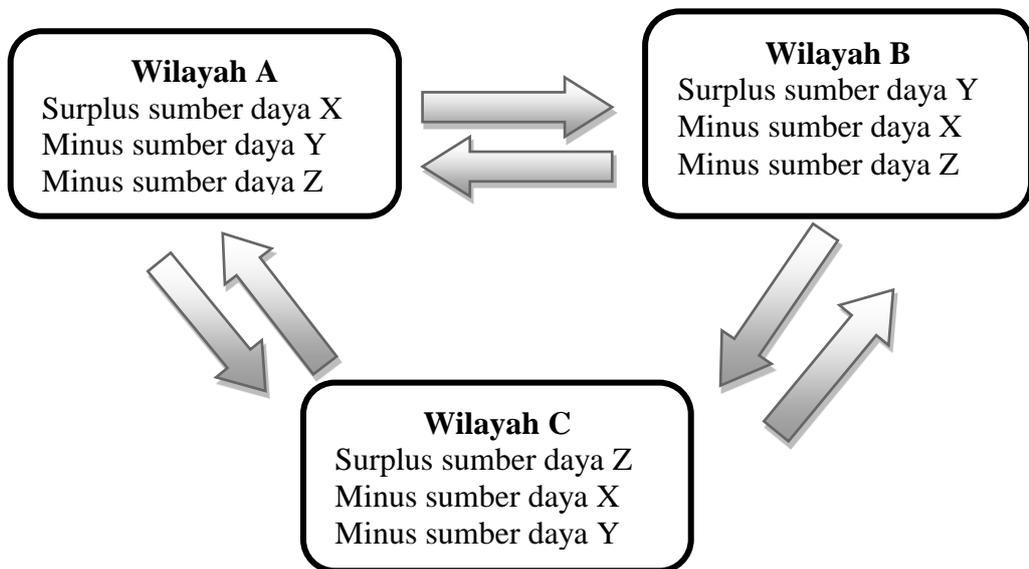
sambil lalu (*casual*), dangkal atau tidak mendalam (*superficial* dan tidak bertahan lama.

Dengan perbedaan-perbedaan tersebut maka interaksi sosial masyarakat pedesaan tidak terdiferensiasi kurang lentur, kurang terstandardisasi, kurang termekanisasi dibanding dengan masyarakat kota.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Interaksi Desa dan Kota, Edward Ullman mengemukakan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah, yaitu :

a. Adanya wilayah yang saling melengkapi (*regional complementary*)

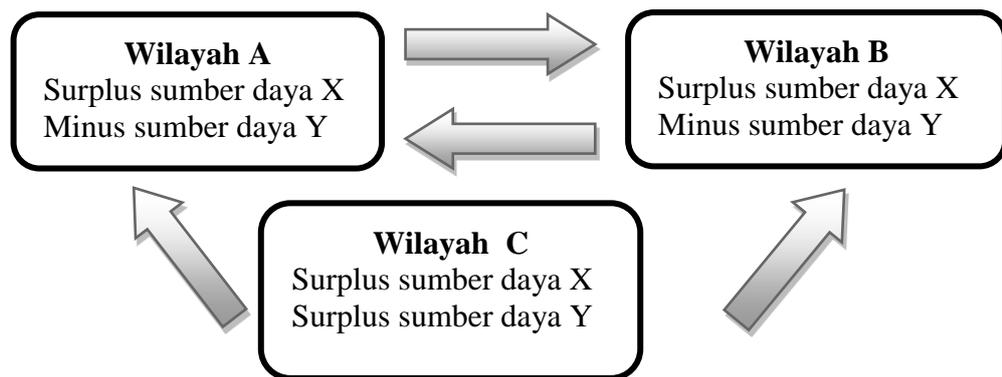
Adanya hubungan yang saling melengkapi dimungkinkan karena adanya perbedaan wilayah dalam hal ketersediaan dan kemampuan sumberdaya. Di satu pihak ada wilayah yang surplus, dan ada wilayah lainnya yang kekurangan sumberdaya. Keadaan ini akan mendorong terjadinya interaksi, karena didorong rasa saling membutuhkan.



Gambar. Adanya Wilayah yang saling melengkapi (*regional complementary*)

b. Adanya kesempatan untuk saling intervensi (*intervening opportunity*)

Artinya ke dua wilayah mempunyai kesempatan melakukan hubungan timbal balik, serta tidak ada pihak ke tiga yang membatasi kesempatan itu. Adanya intervensi pihak ke tiga dapat menjadi penghambat atau melemahkan interaksi antara dua wilayah.



Gambar. Adanya Kesempatan untuk Saling Intervensi (*intervening opportunity*)

c. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (*spatial transfer ability*)

Spatial transfer ability yaitu kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, baik manusia, informasi atau barang, sangat tergantung pada faktor jarak, biaya angkut atau transportasi, dan kelancaran transportasi. Jadi semakin mudah transfer, semakin besar pemindahan arus komoditas.

Interaksi antara desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu. Pengaruhnya akan tergantung pada jarak ke pusat kota. makin jauh dari pusat kota, interaksi semakin lemah. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran, dimulai dari pusat kota sampai kewilayah desa. Zone interaksi desa dan kota oleh Bintarto (1983:66) dijelaskan sebagai berikut:

- a. City dimaksudkan sebagai pusat kota;
- b. *Suburban* (sub daerah perkotaan), suatu wilayah yang lokasinya dekat pusat atau inti kota, dihuni oleh para penglaju;

- c. *Suburban fringe* (jalur tepi sub wilayah perkotaan), suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa;
- d. *Urban fringe* (jalur tepi wilayah perkotaan paling luar) yaitu semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota;
- e. *Rural urban fringe* (jalur batas desa dan kota), merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non pertanian;
- f. *Rural* (wilayah desa), wilayah yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian.

Zone suburban, suburban fringe, urban fringe dan *rural urban fringe* merupakan wilayah yang memiliki suasana kehidupan modern, sehingga dapat disebut perkotaan jalur-jalur yang digambarkan tersebut merupakan gambaran yang ideal. Dalam kenyataannya jalur-jalur zone interaksi desa dan kota tidak selalu konsentris.

Adapun perilaku yang menjadi ciri-ciri dalam masyarakat kota antara lain: (Mansyur .1983:109-114)

1. Sikap hidup masyarakat kota

Sikap masyarakat kota pada umumnya mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi daripada masyarakat desa. Akibatnya timbul sikap pembatasan diri dalam pergaulan dikarenakan lebih berlomba-lomba mencari usaha/kesibukan dan mencari narkah untuk kelangsungan hidup.

Hal itu menimbulkan faham mementingkan diri sendiri dan timbul sikap individualisme/egoisme. Segala sesuatu yang dijalankan tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitar, selama masih dalam batas wajar dan tidak melanggar aturan hukum. Di dalam pergaulan hidup, lebih dominan dengan tumbuhnya organisasi dengan kepentingan yang tegas dan mengutamakan alasan-alasan ekonomis teknis. Misalnya: arisan ibu-ibu PKK.

2. Tingkah Laku

Tingkah laku dilaksanakan untuk mencapai usaha kearah pemenuhan materi dengan adanya upaya serta menggunakan akal pikiran. Mengingat di kota terdapat banyak fasilitas yang tersedia memungkinkan masyarakat kota untuk

meningkatkan pengetahuan mereka. Oleh karena itu masyarakat perkotaan dapat dikatakan manusia yang kreatif, rasional, dan tidak gampang dipengaruhi oleh pihak lain.

Akibatnya terjadi suatu pandangan hidup yang luas dan membuat orang tidak fanatik, bersedia menerima pandangan pihak lain sepanjang masih diterima oleh akal. Pola pikir itu menimbulkan pemikiran yang lebih matang dan kreatif karena banyak pengalaman dari peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Selain itu penggunaan teknologi dan budaya telah mengantar mereka bertaraf hidup lebih tinggi dan modern. Sikap yang muncul lainnya yakni sikap optimis, yang akhirnya menyebabkan masyarakat kota lebih dinamis dalam tingkah laku, serta sikap untuk meniru dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk tidak ketinggalan zaman.

3. Pandangan Hidupnya

Pandangan hidup ini menjurus pada materialistis. Hal itu disebabkan karena masyarakat mempunyai sikap hidup yang lebih mementingkan diri sendiri, yang mana mengakibatkan pengabaian terhadap faktor-faktor lingkungan sekitarnya orang-orang lebih mengutamakan faktor ekonomi dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya guna memperkaya diri sendiri.

Di samping itu, masyarakat masih memerlukan hiburan dan rekreasi sebagai penyegaran yang disebabkan oleh rutinitas dalam pekerjaan. Hal itu tentu saja memerlukan biaya tambahan yang cenderung bersifat materialistis. Dari segi religi, masyarakat kota kurang memperhatikan dan menghayati kegiatan tersebut. Pikiran dan aktivitasnya terlalu disibukkan dengan masalah yang berhubungan dengan duniawi.

Akibat dari keseluruhan ini menimbulkan gejala-gejala yang negatif. Orang tidak segan-segan untuk melanggar nilai serta norma-norma. Maka timbullah degradasi moral, tindakan kriminal, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Karena pikiran mereka hanya untuk bagaimana mempertahankan hidup di tengah sulitnya mencari nafkah di kota..

Dalam masyarakat kota tidak mudah untuk membentuk kebersamaan nilai-nilai budaya. Penduduk kota biasanya berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Demikian juga antar golongan ekonomi dan politik yang berlainan juga menimbulkan persepsi yang tidak sama terhadap peristiwa-peristiwa sosial tertentu. Agama yang berbeda ikut menambah perbedaan terhadap norma dan nilai yang dianut masing-masing penduduk warga kota.

Perbedaan-perbedaan yang tajam dari warga kota dapat menimbulkan interaksi-interaksi yang membentuk konflik. Munculnya peristiwa-peristiwa konflik antar kelompok di kota karena masing-masing diperlakukan tidak adil, normal dan nilai dilanggar dan kepentingan tidak diperhatikan. Berbagai peristiwa yang terjadi pada masa-masa yang lalu di kota-kota besar di Indonesia menunjukkan konflik, antar golongan ekonomi kuat (nonpribumi) dan golongan lemah (pribumi). Jurang yang terlalu lebar dibidang ekonomi ditambah lagi perbedaan ras dan juga agama menjadi faktor akumulatif timbulnya konflik. Oleh karena itu mengelola dan mengatasi konflik yang timbul di kalangan penduduk kota tidak bisa hanya diperhatikan dari salah satu aspek saja.

B. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Kota

Adanya nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, interaksi sosial dapat berlangsung dengan baik jika aturan dan nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak ada kesadaran atas pribadi individu, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dari itu, dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan antar individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis, hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepada yang melakukan proses interaksi.

Everett M Rogers mendefinisikan perubahan sosial yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial. Menurut Rogers proses perubahan sosial dapat dikategorikan menjadi 3 tingkat yaitu penemuan baru (*invention*), difusi (*diffution*) dan akibat (*concequences*).

1. Jenis – Jenis Perubahan Sosial

Jika dilihat dari proses berlangsungnya, menurut Soerjono Soekanto perubahan dapat dibedakan menjadi Evolusi dan Revolusi:

a. Evolusi

Evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Contoh, perubahan sosial dari masyarakat berburu menuju ke masyarakat meramu.

b. Revolusi

Revolusi, yaitu perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Seringkali perubahan revolusi diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat, ketegangan-ketegangan tersebut sulit dihindari bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Terjadinya proses revolusi memerlukan persyaratan tertentu, antara lain

- 1) Ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan.
- 2) Adanya pemimpin/kelompok yang mampu memimpin masyarakat tersebut.
- 3) Harus bisa memanfaatkan momentum untuk melaksanakan revolusi.
- 4) Harus ada tujuan gerakan yang jelas dan dapat ditunjukkan kepada rakyat.

5) Kemampuan pemimpin dalam menampung, merumuskan, serta menegaskan rasa tidak puas masyarakat dan keinginan-keinginan yang diharapkan untuk dijadikan program dan arah gerakan revolusi.

Jika dilihat dari ruang lingkungannya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan social yang berpengaruh besar dan perubahan sosial yang berpengaruh kecil.

a. Perubahan Kecil

Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan kecil adalah perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian dan lain sebagainya.

b. Perubahan besar

Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan besar adalah dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat.

Jika dilihat dari keadaannya, perubahan sosial dibagi menjadi dua yaitu, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan.

a. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan

Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah suatu sistem sosial.

b. Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan

Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan.

C. Sistem Religi, Bahasa, Seni dan Teknologi

1. Sistem Religi

Religi adalah bagian dari kebudayaan. Ada pendirian yang mengatakan bahwa suatu sistem religi merupakan suatu agama, hanya bagi penganutnya. Sistem religi meliputi kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan dan upacara keagamaan. (Soejono Soekanto, 2007)

Jadi dapat disimpulkan bahwa religi adalah nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia yang melahirkan pola perilaku tertentu guna menangani dan mengatasi masalah-masalah penting yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya.

a. Unsur – Unsur Khusus Dalam Sistem Religi

Semua aktifitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa, yang biasanya di sebut emosi keagamaan. Suatu sistem religi dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu di antara pengikut-pengikutnya. Dengan demikian , emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi bersama dengan tiga unsur lain yaitu:

- a. Sistem keyakinan
- b. Sistem upacara keagamaan
- c. Suatu umat yang menganut agama.

Sistem keyakinan secara khusus mengandung banyak sub unsur. Mengenai hal tersebut para antropologi biasanya menaruh perhatian sifat dan tanda dewa-dewa ,konsepsi yang baik maupun yang jahat sifat ,konsepsi tentang makhluk-makhluk halus jahat, hantu dan lain-lain. Konsepsi tentang dewa tertinggi dan pencipta alam, masalah terciptanya dunia dan alam ,masalah mengenai bentuk dan sifat-sifat dunia, konsepsi tentang hidup dan ,konsepsi tentang dunia roh dan dunia akhirat dan lain-lain.

Adapun sistem kepercayaan dan gagasan, pelajaran , aturan agama dongeng suci tentang riwayat dewa-dewa, biasanya tercantum dalam suatu

himpunan buku-buku yang biasanya juga di anggap sebagai kesusastraan suci.

Sistem upacara keagamaan secara khusus mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tempat upacara keagamaan di lakukan
- b. Saat-saat upacara keagamaan dijalankan
- c. Benda-benda dan alat upacara
- d. Orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara.

Dalam Sistem Religi terdapat dua tingkatan yaitu:

- a. Di dalam evolusi religinya manusia percaya bahwa mahluk-mahluk halus itulah yang menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia. Mahluk-mahluk halus tadi yang tinggal dekat sekeliling tempat tinggal manusia dianggap bertubuh halus sehingga tidak dapat tertangkap oleh panca indera manusia, yang mampu berbuat hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dan mendapat suatu tempat yang amat penting di dalam kehidupan manusia sehingga menjadi obyek penghormatan, pemujaan, dan penyembahannya, dengan berbagai upacara keagamaan berupa doa, sajian atau korban.
- b. Di dalam evolusi religi manusia percaya bahwa gerak alam hidup itu juga disebabkan oleh adanya jiwa yang ada di belakang peristiwa dan gejala alam itu. Seperti contoh sungai-sungai yang mengalir dan terjun dari gunung ke laut, gunung yang meletus, gempa bumi yang merusak, angin taufan yang menderu, matahari yang menerangi bumi, berseminya tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya semuanya disebabkan oleh jiwa alam, dalam perkembangannya. kemudian jiwa alam ini dipersonifikasikan dianggap oleh manusia.

b. Pola keagamaan/Religi Masyarakat Pedesaan :

a. Tradisional

Cara ini mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang, leluhur atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pada umumnya bagi seseorang yang menganut cara beragama ini keyakinannya dalam beragama sangat kuat , sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru, tidak mudah terpengaruh untuk pindah dari agama satu ke agama yang lain. Dengan demikian cara beragama tradisional kurang dapat meningkatkan ilmu amal keagamaannya.

b. Formal

Cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi. Secara umum orang yang mengikuti cara agama formal ini adalah orang-orang yang tidak kuat dalam beragama, mudah terpengaruh oleh lingkungan bahkan mereka rela menukar agamanya demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan karena tidak mampu memenuhi apa yang diinginkan. Mereka sudah ada keinginan untuk meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya walupun hanya mengenai hal-hal yang mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakatnya.

c. Rasional

Cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu dan pengamalannya.

d. Metode Pendahulu

Cara beragama berdasarkan penggunaan hati (perasaan) dibawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan dan penyebaran (dakwah). Mereka mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama dan memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh Nabi atau Rasul sebelum mereka mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar (berpegang teguh) dengan itu semua. (Syamsul Arifin, 1996: 50-51)

Masyarakat desa yang semula dikenal dengan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih kuat, saat ini telah mengalami pergeseran. Kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat desa dalam perkembangannya mengalami perubahan, seiring masuknya kaum penyebar agama dan dikenalnya pendidikan agama formal. Masuknya kaum pendakwah maupun ulama di masyarakat desa telah mengikis ajaran animisme dan dinamisme. Umumnya masih dipertahankan, seperti ulama/kyai sangat dihormati. Disamping itu ada yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan terhadap ilmu gaib/dukun.

Masyarakat desa secara formal telah menganut salah satu agama dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Dasar-dasar religi dengan empat dasar komponen, yaitu:

- a. Emosi keagamaan, sebagai suatu substansi yang menyebabkan manusia menjadi religius.
 - b. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan atau yang dianggap sebagai Tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib (supernatural).
 - c. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, Dewa-dewa atau Mahluk-mahluk halus yang mendiami alam gaib.
 - d. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut
2. Sistem Bahasa dan Seni

Bahasa merupakan alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicarannya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat.

- a. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai berikut:
 - 1) Alat berekspresi.
 - 2) Alat komunikasi.
 - 3) Alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial.
- b. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk:
 - 1) Fungsi Praktis yaitu Mengadakan Hubungan dalam Pergaulan sehari-hari.
 - 2) Fungsi artistik yaitu mewujudkan seni
 - 3) Fungsi filosofis yaitu mempelajari naskah-naskah kuno
 - 4) Untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

- c. Selain Fungsi yang telah di sebutkan di atas, fungsi bahasa dalam kebudayaan dapat dipahami dari hubungan antara bahasa dengan kebudayaan (Sibarani 2002 : 36) :
- 1) Bahasa yang dipergunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Contohnya adalah bahasa hanya mempunyai makna dalam latar budaya yang menjadi wadahnya. Sering terjadi, bentuk bahasa sama tetapi memiliki makna yang berbeda karena perbedaan kebudayaan yang menjadi wadahnya.
 - 2) Bahasa yang digunakan seseorang menunjukkan cara pandang seseorang terhadap dunia atau realitas serta memengaruhi tingkah lakunya. Penutur bahasa yang berbeda akan memandang dunia secara berbeda. Buktinya adalah penutur suatu bahasa memiliki kata-kata tertentu untuk suatu benda sedangkan penutur bahasa yang lain tidak memiliki kata-kata untuk benda itu, maka penutur bahasa yang pertama akan lebih mudah berbicara tentang benda-benda tersebut. Atas dasar itu, bahasa berfungsi menunjukkan cara pandang seseorang terhadap dunia atau realitas serta mempengaruhi tingkah lakunya.

Bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat desa ada sesuai dengan keadaan dimana mereka berada, karena bahasa yang digunakan yaitu bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari yang merupakan hasil kebudayaan warga setempat untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Bahasa penghubung dengan komunitas luar menggunakan bahasa persatuan Indonesia, namun apabila antar desa dalam lingkup satu wilayah menggunakan bahasa daerah yang sama. Sedangkan untuk bahasa luar daerah tersebut agak sulit diterima dikarenakan sedikit nya jumlah pendatang yang menempati desa.

Teori relativitas bahasa mengalami perkembangan dari para ahli bahasa baik di benua Eropa maupun Amerika. Para ahli bahasa yang mengembangkan teori tersebut antara lain adalah Edward Sapir yang menyatakan pentingnya bahasa untuk dapat mempelajari kebudayaan dari suatu masyarakat. Pemikirannya mengenai relativitas bahasa sangat mempengaruhi muridnya Benjamin Lee Whorf. Keduanya menyatakan bahwa struktur bahasa suatu bahasa menggambarkan bagaimana penuturnya memandang dunianya, dan bagaimana kebudayaan mempunyai hubungan dengan bahasa. Pemikiran Sapir dan Whorf mengenai kaitan antara bahasa dan kebudayaan yang sejalan dengan pandangan relativitas bahasa lebih dikenal sebagai Hipotesis Sapir-Whorf (Kadarisman, 2008:3).

3. Sistem Teknologi

Pada umumnya penduduk perdesaan di Indonesia ini apabila ditinjau dari segi kehidupannya sangat terikat dan sangat tergantung dari tanah, maka mereka sama-sama mempunyai kepentingan pokok yang sama, sehingga mereka juga akan bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Cara-cara bertani sangat tradisional teknologinya dan tidak efisien, karena belum dikenalnya mekanisasi dalam pertanian. Biasanya mereka bertani semata-mata untuk mencukupi kehidupannya sendiri dan tidak untuk dijual. Cara bertani yang demikian lazimnya dinamakan subsistence farming. Mereka merasa puas apabila kebutuhan keluarga telah dicukupinya.

Masyarakat desa di Indonesia itu memang dapat kita pandang juga sebagai suatu bentuk masyarakat yang ekonomis terbelakang dan yang harus dikembangkan dengan berbagai-bagai cara. Dalam hal itu mengadakan sistem-sistem perangsang yang akan menarik aktivitas warga desa adalah amat perlu. Konsep Hoselitz dalam prinsipnya memang benar, tetapi unsur pertama dalam konsepsi itu, ialah perangsang untuk menarik aktivitas orang bekerja. Walaupun orang desa itu bisa dan biasa bekerja keras, tetapi kalau ia harus bekerja dalam sistem-sistem produksi modern, maka harus banyak mengubah adat dan kebiasaan bekerjanya. Teknologi yang digunakan oleh masyarakat desa untuk meringankan aktivitas kerja saat ini tidak hanya menggunakan alat yang bersifat tradisional,

namun sebagian telah dikerjakan memakai tenaga mesin. Alat tersebut digunakan untuk menghemat tenaga dan efisiensi waktu.

Masyarakat perkotaan jika dilihat dari aspek teknologinya lebih maju bahkan lebih canggih dari masyarakat desa. Hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan mesin-mesin canggih, robot-robot yang dipergunakan untuk membantu pekerja pabrik dalam proses produksi, penggunaan traktor untuk membajak sawah, tidak lagi menggunakan kerbau yang kita kenal sebagai alat pembajak sawah pada masyarakat desa. Teknologi canggih tersebut juga dapat dilihat dengan akses internet yang menyebar dan kemudahan akses dimana-mana, penggunaan media e-learning di sekolah-sekolah perkotaan, dll.

Hal tersebut adalah sebagian contoh adanya kemajuan dalam hal iptek karena sarana prasarana di perkotaan mendukung untuk hal tersebut. Di perkotaan pula berdiri lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dengan fasilitas yang memadai bahkan tergolong mewah, adanya hal tersebut tak lain karena adanya perkembangan teknologi dan adanya pengetahuan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan tentunya. Adanya lembaga atau sarana pendidikan di perkotaan tersebut yang mendorong masyarakat perkotaan sangat mempergunakan kecanggihan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Teknologi di perkotaan dibutuhkan karena untuk mempermudah pekerjaan atau alat bantu manusia untuk efisiensi waktu.

Bila adanya kemajuan teknologi tersebut diterapkan dalam masyarakat perdesaan, kami rasa hal tersebut harus dibarengi dengan pembenahan sarana prasarana yang mendukung adanya perbaikan teknologi di perdesaan. Di Indonesia sekarang sedang di galakkan adanya internet masuk kampung karena mungkin diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, mengenal bagaimana kemajuan arus globalisasi dan modernisasi ini. Tetapi untuk menuju hal tersebut tidaklah gampang. Perubahan di dalam bidang iptek ini terkadang tidak diterima oleh masyarakat desa karena ada sebagian masyarakat desa yang masih sangat menjaga keaslian alam dan menjauhkan diri dari dampak arus globalisasi dan modernisasi. Pemikiran masyarakat perdesaan pun bila akan menggunakan teknologi seperti di perkotaan, mereka sangat memikirkan biaya

dan dampak dari hal tersebut misalnya pemikiran masyarakat desa “untuk makan saja susah, apalagi untuk mempergunakan atau mengikuti arus perkembangan iptek?”. Pernyataan tersebut sudah mewakili bahwa masyarakat perdesaan untuk mengikuti perkembangan tersebut tidak dapat dengan cepat begitu saja. Adapula yang berpikiran bahwa “memanfaatkan alat seadanya saja”. Kebanyakan masyarakat di perdesaan memang seperti itu.

Antara warga masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan juga terdapat perbedaan dalam perhatian, khususnya terhadap keperluan-keperluan hidup. Di desa-desa, yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama daripada kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian, makan-makanan, rumah, dan sebagainya. Lain dengan orang-orang kota yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Orang-orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup, sehubungan dengan pandangan masyarakat sekitarnya. Ada beberapa ciri lagi yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu :

1. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa. Hal ini disebabkan adanya cara berfikir yang rasional, yang didasarkan pada pengetahuan eksak yang berhubungan dengan realita masyarakat. Memang di kota-kota, orang-orang juga beragama, akan tetapi pada umumnya pusat kegiatan hanya tampak di tempat-tempat beribadat seperti misalnya gereja, mesjid, dan sebagainya. Di luar itu, kehidupannya masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Cara kehidupan demikian mempunyai kecenderungan ke arah keduniawian dibandingkan dengan kehidupan warga desa yang cenderung ke arah agama.
2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus diri sendiri tanpa harus bergantung pada orang-orang lain. Yang penting di sini adalah manusia perseorangan atau individu. Di desa orang lebih mementingkan kelompok atau keluarganya. Di kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, karena perbedaan kepentingan, perbedaan paham politik, perbedaan agama dan sebagainya. Di kota-kota para individu kurang berani untuk seorang diri menghadapi orang-orang lain dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang tak sama,

kepentingan yang berbeda dan lain-lain. Nyata bahwa kebebasan yang diberikan kepada individu, tak dapat memberikan kebebasan yang sebenarnya kepada yang bersangkutan.

3. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Di kota-kota, tinggal orang-orang dengan aneka warna latar belakang social dan pendidikan yang menyebabkan individu memperdalam suatu bidang kehidupan khusus yang menyebabkan suatu gejala bahwa warga kota tak mungkin hidup sendirian secara individualistis. Pasti akan dihadapinya persoalan-persoalan hidup yang di luar jangkauan kemampuannya. Gejala demikian dapat menimbulkan kelompok-kelompok kecil yang didasarkan pada pekerjaan yang sama, keahlian yang sama, kedudukan sosial yang sama dan lain-lain, yang kesemuanya dalam batas-batas tertentu membentuk pembatasan-pembatasan di dalam pergaulan hidup.
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga-warga desa, karena sistem pembagian kerja yang tegas tersebut di atas.
5. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
6. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.
7. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, karena kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Hal ini sering menimbulkan pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda, oleh karena golongan muda yang belum sepenuhnya terwujud kepribadiannya, lebih senang mengikuti pola-pola baru dalam kehidupan.

Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai perkembangan teknologi diantara masyarakat perdesaan dan perkotaan sangatlah beda dan tidak dapat di samakan. Mereka mempunyai ciri khas sendiri dan tanggapan tersendiri mengenai perkembangan teknologi tersebut. Adanya perbedaan mengenai hal

tersebut diharapkan tidak menjadikan keunggulan satu sama lain, karena tentunya ada alasan tersendiri dimana keduanya tidak dapat disamakan.

D. Urbanisasi

Urbanisasi merupakan fenomena yang dialami oleh kota-kota besar di Indonesia khususnya. Urbanisasi tersebut terjadi karena belum meratanya pertumbuhan wilayah terutama antar daerah pedalaman dengan daerah perkotaan. Semakin besarnya perbedaan antar tingkat pertumbuhan wilayah menyebabkan semakin tingginya tingkat urbanisasi. Ekspektasi atas tingkat pendapatan yang lebih besar masih sangat menjanjikan bagi pelaku urbanisasi walaupun pada gilirannya urbanisasi tersebut akan meningkatkan jumlah penduduk kota tujuan. Peningkatan jumlah penduduk ini selanjutnya akan menimbulkan beberapa permasalahan bagi kota tujuan.

Menurut ahli Geografi yaitu Bintarto (1986: 27) urbanisasi berarti perpindahan penduduk dari desa ke kota. Angka kepadatan penduduk desa lebih kecil daripada angka kepadatan penduduk kota. Jadi urbanisasi ini penduduk bergerak dari daerah yang renggang ke daerah yang padat. Dengan demikian berlawanan dengan arah perpindahan penduduk pada transmigrasi yaitu dari daerah padat ke daerah renggang atau dari Jawa ke luar Jawa.

Sedangkan menurut Daldjoeni (1981: 117) Urbanisasi adalah suatu gejala yang menunjukkan suatu proses perubahan tempat tinggal penduduk yang didorong oleh kondisi kemasyarakatan dalam arti luas. Arti luas disini merupakan kondisi masyarakat yang sudah lebih maju dalam berpikir dan kompleks dalam perkembangannya. Pada umumnya urbanisasi dipandang sebagai bagian dari proses perkembangan ekonomi dan sebagai akibat dari penambahan penduduk yang pesat yang tidak dapat dicegah.

Menurut Said Rusli, (1988: 109) perpindahan penduduk dari desa ke kota sering merupakan sumber kerisauan di berbagai negara berkembang karena terbatasnya kemampuan penyediaan lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas perkotaan bagi penduduk desa yang datang. Salah satu sebab meningkatnya jumlah penduduk perkotaan adalah adanya perpindahan atau migrasi penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan.

Di tinjau dari konsep keruangan (spatial) dan ekologis urbanisasi merupakan gejala geografis. Pertama, karena adanya gerakan/ perpindahan penduduk dalam satu wilayah atau perpindahan penduduk ke luar wilayahnya. Kedua, gerakan/ perpindahan penduduk yang terjadi di sebabkan adanya salah satu komponen dari ekosistemnya kurang/tidak berfungsi secara baik, sehingga terjadi ketimpangan dalam ekosistem setempat. Ketiga, terjadi adaptasi ekologis yang baru bagi penduduk yang pindah dari daerah asal ke daerah yang baru, dalam hal ini kota.

Ketika jumlah penduduk meningkat, daya dukung lingkungan juga harus meningkat misalnya daya dukung untuk tempat bermukim dan daya dukung sarana dan prasarana publik. Salah satu sarana dan prasarana publik adalah armada transportasi. Peningkatan jumlah penduduk akan menuntut terjadinya peningkatan sarana transportas misalnya jaringan jalan dan ketersediaan armada angkutan dn lain sebagainya.

Menurut Bintarto (1986:21-23) terdapat tiga pengertian urbanisasi yaitu :

1. Proses meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk kota , kota menjadi lebih menggelembung atau membengkak, sebagai akibat dari penambahan penduduk, baik oleh hasil kenaikan fertilitas penguni kota maupun karena adanya tambahan penduduk dari desa yang bermukim dan berkembang di kota.
2. Bertambahnya jumlah kota dalam suatu negara atau wilayah sebagai akibat dari perkembangan ekonomi, budaya, dan teknologi yang baru.
3. Berubahnya kehidupan desa atau suasana desa menjadi suasana kehidupan kota.

Di Indonesia tingkat arus urbanisasi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal itu membuktikan bahwa negara Indonesia belum mampu mengatasi urbanisasi yang terus meningkat tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) presentase penduduk di daerah perkotaan setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berikut Tabel Presentase Penduduk daerah Perkotaan:

Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Aceh	28,1	30,5	33,2	36,2	39,5	43,2
Sumatera Utara	49,2	52,6	56,3	60,1	64,1	68,1
Sumatera Barat	38,7	44,2	49,6	54,6	59,4	63,8
Riau	39,2	39,6	40,1	40,7	41,2	41,8
Jambi	30,7	32,0	33,3	34,8	36,5	38,2
Sumatera Selatan	35,8	36,5	37,3	38,2	39,1	40,1
Bengkulu	31,0	31,7	32,6	33,5	34,5	35,6
Lampung	25,7	28,3	31,3	34,6	38,3	42,4
Kepulauan Bangka Belitung	49,2	52,5	56,0	59,7	63,5	67,4
Kepulauan Riau	82,8	83,0	83,3	83,8	84,5	85,3
DKI Jakarta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jawa Barat	65,7	72,9	78,7	83,1	86,6	89,3
Jawa Tengah	45,7	48,4	51,3	54,3	57,5	60,8
DI Yogyakarta	66,4	70,5	74,6	78,0	81,3	84,1
Jawa Timur	47,6	51,1	54,7	58,6	62,6	66,7
Banten	67,0	67,7	69,9	73,7	78,8	84,9
Bali	60,2	65,5	70,2	74,3	77,8	81,2
Nusa Tenggara Barat	41,7	45,4	49,4	53,6	58,1	62,7
Nusa Tenggara Timur	19,3	21,6	24,3	27,3	30,7	34,6

(Sumber : BPS)

Dari data tabel tersebut dapat dilihat beberapa kota dengan tingkat kepadatan penduduk perkotaan yang tinggi:

1. DKI Jakarta
2. Kepulauan Riau
3. Banten
4. DIY
5. Jawa Barat

Beberapa kota dengan tingkat kepadatan penduduk perkotaan mulai dari yang terendah:

1. NTT
2. Lampung
3. Aceh

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Jakarta masih menjadi kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia disusul oleh Kepulauan Riau, Banten, DIY dan Jawa Barat, sedangkan NTT, Lampung dan Aceh menjadi kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Melihat hasil dari BPS tersebut sudah seharusnya pemerintah menggalakkan program transmigrasi dari

kota yang berkepadatan penduduk tinggi ke kota yang berkepadatan penduduk rendah, khususnya dari Jakarta ke kota dengan kepadatan penduduk yang rendah seperti NTT, Lampung atau Aceh agar terjadi suatu pemerataan sumber daya manusia di kota-kota Indonesia.

1. Faktor Penyebab Urbanisasi

Secara umum faktor – faktor penyebab terjadinya urbanisasi dibagi menjadi dua (Jefta Leibo, 1995: 78-79) yaitu :

a. Faktor Pendorong (*Push Factor*)

Adapun faktor pendorong bagi penduduk desa meninggalkan desanya yaitu :

- a. Lapangan kerja yang relatif sangat langka.
- b. Di desa tidak ada kesempatan untuk menanbah pengetahuan. Oleh karena itu yang mempunyai keinginan lebih maju, kemudian meninggalkan desanya.
- c. Penduduk desa terutama kaum mudanya, merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat yang menyebabkam cara hidup yang ada monoton saja. Untuk mengembangkan pertumbuhan jiwanya mereka banyak yang pergi ke kota.
- d. Bagi penduduk desa yang ingin mengembangkan keahlian atau skil yang lain dari pertanian
- e. Rekreasi sebagai salah satu faktor penting di bidang spiritual sangat kurang kalaupun ada sangat lambat perkembangannya.

2. Faktor Penarik (*Pull Factor*)

Adapun faktor penarik bagi penduduk desa yang melakukan urbanisasi yaitu :

- a. Penduduk desa kebanyakan dihinggapi anggapan bahwa di kota banyak tersedia lapangan pekerjaan
- b. Kota merupakan pusat fasilitas. Misalnya: di bidang pendidikan, rekreasi dll.
- c. Kota merupakan tempat pergaulan dari segala macam dari berbagai lapisan.

d. Kota merupakan tempat untuk dapat mengembangkan skill.

Selain faktor-faktor tersebut, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecepatan urbanisasi lainnya adalah:

1. Aspek Geografi

a. Perkembangan transportasi di perkotaan yang semakin meningkat.

Fasilitas dan perkembangan transportasi di daerah perkotaan semakin lama semakin maju, berbeda dengan daerah perdesaan yang umumnya fasilitas dan perkembangan transportasi belum di optimalkan, oleh karena itu masyarakat perdesaan pergi mencari fasilitas yang lebih baik dan pergi ke daerah perkotaan.

b. Kesempatan kerja yang lebih banyak dan bervariasi di perkotaan.

Mayoritas penduduk perdesaan menjalankan roda perekonomiannya dari sektor agraris seperti petani, sedangkan di daerah perkotaan banyak sekali menawarkan berbagai macam jenis pekerjaan, oleh karena itu masyarakat perdesaan ingin mencoba hal baru dan datang ke daerah perkotaan.

2. Aspek Ekonomi

a. Beragamnya kegiatan atau aktifitas ekonomi di kota.

Daerah perkotaan yang memiliki masyarakat yang heterogen membuat kegiatan dan aktifitas yang dilakukan oleh mereka pun beragam hal itu memicu masyarakat perdesaan untuk mencari keberuntungan di daerah perkotaan.

b. Kesempatan kerja dengan upah yang menarik

Kota yang memiliki industri-industri yang besar menarik masyarakat perdesaan dengan gaji yang dikatakan orang perdesaan cukup tinggi padahal di daerah perkotaan dan perdesaan biaya kehidupan di kedua daerah tersebut sangatlah berbeda, biaya hidup di perkotaan jauh lebih mahal daripada biaya hidup di perdesaan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan masyarakat perdesaan untuk tetap datang ke daerah perkotaan.

3. Aspek Sosial

a. Pembangunan di kota semakin maju

Pembangunan di daerah perkotaan yang semakin cepat dengan didukung kemajuan teknologi yang canggih membuat pembangunan di daerah perkotaan menjadi semakin tak terbendung, hal itu membuat kecemburuan sosial pada masyarakat perdesaan sehingga banyak masyarakat perdesaan yang memutuskan untuk datang ke daerah perkotaan.

b. Tingkat dan fasilitas kesehatan masyarakat

Tingkat kesehatan di daerah perdesaan secara umum sangat rendah karena tidak didukung dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, berbeda dengan tingkat kesehatan masyarakat di perkotaan yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan canggih sehingga membuat tingkat kesehatan di daerah perkotaan cukup tinggi.

4. Aspek Budaya

Urbanisasi terjadi tidak hanya dari faktor ekonomi, geografi, maupun sosial, namun dapat terjadi karena faktor budaya. Sebagai contoh salah satu budaya di minangkabau. Di Minangkabau seorang bujang atau lelaki dewasa dikatakan belum berguna jika belum pergi merantau atau pergi ke tanah orang.

2. Dampak yang ditimbulkan dari urbanisasi

Akibat dari meningkatnya proses urbanisasi menimbulkan dampak-dampak terhadap lingkungan kota, baik dari segi tata kota, masyarakat, maupun keadaan sekitarnya. Berikut dampak negatif dan positif akibat adanya arus urbanisasi :

a. Dampak Negatif :

Permasalahan akibat urbanisasi dapat dikatakan bahwa jumlahnya tidak sedikit, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kepadatan penduduk kota yang menimbulkan masalah kesehatan lingkungan, masalah perumahan, masalah persampahan. Prasarana

pemukiman seperti air, listrik dan lainnya sudah tidak mencukupi dan sarana lingkungan seperti tempat MCK makin tidak memenuhi syarat karena kurang kebersihannya, dan masalah pembuangan sampah yang sembarangan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan (Herlianto, 1986 : 23).

- 2) Pertambahan penduduk kota yang menimbulkan masalah kesempatan dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan memadai, masalah pengangguran dan gelandangan.
- 3) Penyempitan ruang dengan segala akibat negatifnya di kota karena banyaknya orang, bertambahnya bangunan untuk perumahan, perkantoran, kegiatan industri, dan bertambahnya kendaraan bermotor yang terus menerus membanjiri kota-kota di negara berkembang.
- 4) Masalah lalu lintas, kemacetan jalan, dan masalah parkir yang menghambat kelancaran kota.
- 5) Industrialisasi di kota yang menimbulkan polusi udara, polusi air, dan polusi kebisingan (Bintarto, 1986: 35).

Selain itu, masalah urbanisasi tidak dapat dilepaskan dari masalah pengangguran dan gelandangan, dua hal yang merupakan ciri yang jelas bisa dilihat di kota-kota. Seperti diketahui, melonjaknya penduduk kota adalah masalah kependudukan yang bisa diakibatkan faktor alamiah atau juga faktor urbanisasi, hal mana akan menyebabkan ketidak seimbangan daya serap tenaga kerja.

Urbanisasi yang mengakibatkan kepadatan dan konsentrasi penduduk yang berlebihan di dalam kota atau dapat dikatakan sebagai daerah yang kelebihan penduduk dari pada yang seharusnya dapat ditampung di daerah tersebut, akan berlanjut dengan timbulnya masalah kekurangan akan berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, lapangan kerja dan tempat tinggal. Kekurangan akan lapangan pekerjaan menyebabkan banyak penduduk terpaksa menganggur, dan para pendatang yang tidak berhasil memperoleh tempat tinggal akan terpaksa hidup menjadi gelandangan (Herlianto, 1986 : 26-27).

Pengaruh urbanisasi tidak hanya membawa hal negatif bagi masyarakat tempat mereka bermukim, akan tetapi hal yang sama berlaku juga bagi tempat yang mereka tinggalkan (desanya). Desa yang ditinggalkan terlihat hal-hal sebagai berikut :

- a. Hilangnya tenaga muda sebagai tenaga potensial bagi pembangunan di desanya.
 - b. Terjadinya perubahan hubungan dalam keluarga seperti (hubungan anak dengan orang tua menjadi renggang).
 - c. Timbulnya pendidikan anak yang matriachal. Artinya pendidikan anak-anak diperoleh dari ibu saja, karena yang meninggalkan desa biasanya kaum lelaki. Pendidikan di sini maksudnya dalam proses sosialisasi anak (Jefta Leibo, 1995:82).
- b. Dampak positif

Pandangan yang positif terhadap urbanisasi, melihat urbanisasi sebagai usaha pembangunan yang menyeluruh, tidak terbatas dalam pagar administrasi kota. Selain itu kota dianggap sebagai “agen modernisasi dan perubahan”. Mereka melihat kota sebagai suatu tempat pemusatan modal, keahlian, daya kreasi dan segala macam fasilitas yang mutlak diperlukan bagi pembangunan. Beberapa dampak positif akibat adanya urbanisasi adalah :

1. Bagi Kota

- a. Kota mendapatkan tenaga kerja yang melimpah karena banyak penduduk desa yang ke kota. Tenaga kerja tersebut biasanya gajinya murah dan bisa bekerja secara fisik.
- b. Penduduk kota yang banyak menyebabkan terjadinya perdagangan yang besar. Hal ini disebabkan karena penduduk itu merupakan potensi konsumen yang baik untuk memasarkan produk-produk hasil produksi, makanya di kota banyak kita temui mal atau supermarket.
- c. Pembangunan kota menjadi lebih cepat karena dukungan sumber daya manusia yang melimpah pada semua sektor kehidupan.

- d. Munculnya banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas. Karena persaingan yang begitu ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak maka banyak penduduk yang memilih lembaga pendidikan yang berkualitas.
 - e. Industri berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja dan banyaknya konsumen yang ada di kota.
2. Bagi Desa
- a. Kesejahteraan penduduk desa meningkat, karena penduduk yang berhasil di kota akan mengirimkan uang ke desa.
 - b. Munculnya penduduk desa yang punya pendidikan tinggi, karena ada sebagian penduduk yang sekolah pada perguruan tinggi di kota.
 - c. Adanya alih teknologi. Penduduk desa yang di kota akan memberikan pengetahuannya kepada penduduk desa tentang teknologi yang suda berkembang di kota.
 - d. Adanya perhatian dari pemerintah untuk membangun desa supaya pemerintah bisa sukses untuk menghambat laju urbanisasi.
 - e. Adanya industri kecil dan keluarga yang berkembang di desa, karena penduduk kota yang kembali ke desa akan membuat industri skala kecil di desa, dimana pengetahuan kerajinan itu dia dapatkan sebelumnya di kota.

Memperhatikan berbagai penelitian dan informasi ternyata urbanisasi ini memiliki implikasi terhadap berbagai sektor kehidupan seperti :

- a. Dalam sektor ekonomi, struktur ekonomi menjadi lebih bervariasi. Bermacam-macam usaha atau kegiatan di bidang transportasi, perdagangan, dan jasa timbul dari mereka yang bermodal gurem sampai yang bermodal besar, terutama timbulnya di sektor informal seperti kaki lima dan di bidang jasa yang juga dilaksanakan oleh kaum wanita, sebagai tenaga angkut di pasar dan tenaga anak-anak sebagai penyemir sepatu dan penjual surat kabar.
- b. Perkembangan di bidang wiraswasta juga nampak meluas di berbagai bidang seperti peternakan, kerajinan, pariwisata dsb.

- c. Dalam bidang pendidikan makin banyak diusahakan adanya pendidikan kejuruan.
- d. Implikasi lain yang juga dapat diamati jumlah perluasan fisik kota ke arah daerah tepian atau pinggiran kota yang menimbulkan permasalahan baru mengenai persoalan administratif pertanahan dan administratif pemerintahan.
- e. Demikian pula dapat dipahami bahwa harga atau nilai tanah baik di kota maupun di daerah tepian kota cenderung menaik. Dan keadaan ini juga mulai dirasakan oleh penduduk desa.
- f. Perubahan tata guna lahan . Banyak daerah hijau telah menjadi daerah industri atau daerah pemukiman, keadaan ini berpengaruh terhadap kehidupan dan lingkungan pedesaan.

Untuk mengatasi dan mengelola berbagai masalah yang ditimbulkan oleh urbanisasi diperlukan adanya suatu kebijaksanaan atau *policy* terhadap permasalahan urbanisasi.

1. Aspek Geografi

- a. Menertibkan dan mengoptimalkan program transmigrasi sehingga nantinya tercapai suatu pemerataan SDM di berbagai wilayah Indonesia
- b. Mengembangkan daerah perdesaan agar menjadi salah satu tempat wisata daerah, sehingga nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar.
- c. Mengatur arus penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan melalui kegiatan administratif dan kebijaksanaan lainnya.
- d. Menghidupkan daerah perdesaan dengan berbagai kegiatan pembangunan antara lain pengembangan dan peningkatan jalur transportasi dan komunikasi.

2. Aspek Ekonomi

- a. Mengembangkan industri kecil atau industri rumah tangga di berbagai daerah perdesaan di Indonesia.

- b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan sehingga dapat membuat masyarakat pedesaan memiliki modal untuk mendirikan usaha yang mampu diterapkan oleh masyarakat pedesaan.

3. Aspek Sosial

- a. Pembangunan perumahan rakyat yang murah dan memenuhi syarat kesehatan di daerah tepi.
- b. Melancarkan kegiatan keluarga berencana dengan lebih ketat baik di desa maupun di kota.

Berbagai solusi dan alternatif di atas akan dapat dilaksanakan apabila ada jalinan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pihak pemerintah. Dalam hal ini partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan, sehingga program-program pembangunan akan berjalan lebih tertib dan lancar yang nantinya akan mempercepat terselesaikannya pembangunan.

Selain itu, beberapa usaha yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah urbanisasi (Bintarto, 1986:50-51) adalah antara lain :

1. Mempelajari, meneliti dan melaksanakan pengembangan wilayah di pelbagai tempat, terutama di kota-kota besar di Jawa dan di luar Jawa.
2. Mengembangkan industri kecil atau industri rumah tangga di pelbagai daerah pedesaan di Indonesia.
3. Mengatur arus penduduk dari daerah pedesaan ke kota melalui kegiatan administratif dan kebijaksanaan lainnya.
4. Melancarkan kegiatan keluarga berencana dengan lebih ketat baik di desa maupun di kota.
5. Menghidupkan daerah pedesaan dengan pelbagai kegiatan pembangunan antara lain pengembangan dan peningkatan jalur transportasi dan komunikasi.
6. Pembangunan perumahan rakyat yang murah dan memenuhi syarat kesehatan di daerah tepi.

BAB IV

PENUTUP

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang banyak dan bersatu dengan cara tertentu oleh karena hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Jadi ada beberapa syarat untuk timbulnya masyarakat, yaitu: 1) harus ada pengumpulan manusia yang banyak, 2) telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama, 3) adanya aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama. Perkumpulan manusia tinggal di masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian. Potensi desa terdiri dari potensi fisis (tanah, air, iklim, ternak, individu sebagai produsen) dan potensi non fisis (lembaga sosial, pamong desa, masyarakat)

Masyarakat Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Ciri-ciri kota dibedakan menjadi ciri fisik (adanya sarana perekonomian, tempat-tempat parkir, tempat-tempat rekreasi dan olah raga, alun-alun/lapangan luas, gedung pemerintahan) dan ciri sosial masyarakatnya (masyarakat heterogen, individualisme dan materialistis, toleransi sosial, jarak sosial, penilaian sosial).

Interaksi tidak hanya terbatas pada gerak manusianya, tetapi merupakan proses perpindahan barang maupun informasi. Interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, proses politik dan sebagainya. Interaksi antara desa dan kota terjadi karena adanya berbagai faktor yang ada di dalam desa dan kota. Dari pengertian interaksi antar wilayah, dapat dipahami

bahwa dalam interaksi wilayah terkandung tiga hal pokok yaitu 1) hubungan timbal balik terjadi antara dua wilayah atau lebih; 2) hubungan timbal balik antar wilayah menimbulkan adanya proses pergerakan atau perpindahan, dapat berupa pergerakan manusia, informasi atau gagasan, ataupun pergerakan/perpindahan materi atau barang; 3) hubungan timbal balik menimbulkan gejala, kenampakan, dan permasalahan baru, baik yang bersifat positif maupun negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrein T. Sugihen. 1997. *Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Beratha, Nyoman. 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bintaro, R. 1989. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto. 1986. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Brian, Ilberry,1997. *The Geography of Rural Change*. Longman.
- Charles, Whyne, Hammond,1979.*Element of Human Geography*. London: George Allen & Unwin.
- Daldjoeni, N.,1987.*Geografi Desa – Kota*. Bandung: Alumni.
- Daldjoeni. 1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota: Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial*. Bandung : Alumni.
- Hadi, Sabari, Yunus, 2001.*Struktur Tata Ruang Kota*..Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herlianto. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*.Bandung: Alumni
- Jakob, Soemadjo.2000. *Sosiologi Seniman Indonesia*.Bandung: ITB.
- Johara,T., Jayadinat. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perdesaan dan Perkotaan*. Bandung.
- Kadarisman. 2008. *Sistem Jaringan Mutu Industri Pangan*.Bogor: IPB Press.
- Koentjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lauer, Robert. H. 1977. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Diterjemahkan oleh Alimandan). Jakarta: Bina Aksara.
- Leibo, Jefta.1995.*Sosiologi Pedesaan*.Yogyakarta: Andi Offset
- Lubis, FL. 2012. *Interaksi Desa Kota terhadap Tingkat Kesejahteraan*. Diakses dari www.repository.usu.ac.id pada Kamis 25 September 2014.

- Mansyur, Cholil.1983. Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional
- Nanang. 2012. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. diunduh dari kompasiana.com pada tanggal 5 Oktober 2015.
- Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan.2011. diunduh dari www kemdikbud.go.id pada tanggal 2 September 2015.
- Sajogyo, Pudjiwati Sajogyo. 1995. Sosiologi Pedesaan: kumpulan bacaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Shahab, Kurnadi.2013. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia*
- Sibarani, R. 2002. Hakikat Bahasa. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto,Soejono.2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soyomukti, Nurani. 2013. Pengantar Sosiologi:Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial ,Perubahan Sosial dan Kajian-Kajian Strategis. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media
- Sugihen, Bahrein, T. 1996. Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suparmini. 2012. Pola Keruangan Desa Dan Kota. Diunduh pada tanggal 28 Juli 2015 dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Suparmini,Dra.M.Si./MODUL%20DESA-KOTA.pdf>:
- Suryochondro, Sukanti (Ed). 1984. *Kota Dunia Ketiga*. Jakarta: PT.Bhratara Karya Aksara.
- T.O.Ihromi (ed.).2006. Pokok-pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia